LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

(audited)

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2021

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB..... i

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ii

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH iv

LAPORAN NERACA..... v

LAPORAN ARUS KAS..... vii

LAPORAN OPERASIONAL ix

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..... x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xvi

DAFTAR GRAFIK xxv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 2

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan..... 4

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan..... 6

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro 8

2.1.1 Tingkat Kemiskinan 9

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka 14

2.1.3 Gini Ratio..... 15

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 18

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)..... 20

2.1.6 Inflasi..... 23

2.2. Kebijakan Keuangan 24

2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah..... 27

2.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah 27

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD..... 29

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PPKD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan PPKD 36

3.1.1 Pendapatan 36

3.1.2 Belanja 38

3.1.3 Pembiayaan 39

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan 39

3.2.1 Target Pendapatan 39

3.2.2 Target Belanja 40

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 41

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 42

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 42

4.3.1 Kebijakan Pengukuran Laporan Realisasi Anggaran 43

4.3.2 Kebijakan Pengukuran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 46

4.3.3 Kebijakan Pengukuran Neraca 46

4.3.4 Kebijakan Pengukuran Laporan Arus Kas 59

4.3.5 Kebijakan Pengukuran Laporan Operasional 60

4.3.6 Kebijakan Pengukuran Laporan Perubahan Ekuitas 62

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah 62

4.4.1 Koreksi Kesalahan 62

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran 63

5.1.1 Pendapatan-LRA 65

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 67

5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA 76

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA 77
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA..... 81
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA..... 81
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah..... 82
5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya-LRA 82
5.1.2 Belanja..... 83
5.1.2.1 Belanja Operasi..... 84
5.1.2.2 Belanja Modal 93
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga..... 98
5.1.3 Transfer 99
5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan 99
5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan..... 101
5.1.4 Surplus/Defisit 104
5.1.5 Pembiayaan Daerah 104
5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan..... 105
5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan..... 105
5.1.5.3 Pembiayaan Netto..... 105
5.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 106
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 107
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal..... 108
5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih..... 108
5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 108
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 109
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih..... 109
5.3 Neraca 109
5.3.1 Aset..... 110
5.3.1.1 Aset Lancar 111
5.3.1.1.1 Kas 111
5.3.1.1.2 Piutang 118

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang 126
5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka 127
5.3.1.1.5 Persediaan 130
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang 132
5.3.1.3 Aset Tetap 136
5.3.1.4 Aset Lainnya 167
5.3.2 Kewajiban 181
5.3.3 Ekuitas 185
5.4 Laporan Operasional (LO) 186
5.4.1 Pendapatan-LO 187
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO 189
5.4.1.2 Pendapatan Transfer 194
5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO 198
5.4.2 Beban 200
5.4.3 Beban Transfer 206
5.4.4 Surplus/(Defisit) Non Operasional 207
5.4.5 Pos Luar Biasa 207
5.5 Laporan Arus Kas (LAK) 208
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 208
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 210
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 211
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 212
5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 213
5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya, Kas BLUD, Kas BOS 214
5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya 214
5.5.8 Saldo Akhir Kas 214
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 214
5.7 Pengungkapan Perbedaan Laporan Operasional (LO) dengan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 216
5.7.1 Perbedaan Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA..... 216
5.7.2 Perbedaan Beban Operasi pada Laporan Operasional dan Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran. 222
5.7.3 Perbedaan Transfer pada Laporan Operasional dan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran 228
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
6.1 Kondisi Umum Sulawesi Tengah 230
6.2 Gambaran Umum Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah 232
6.3 Informasi Tambahan Lainnya 233
BAB VII P E N U T U P
L A M P I R A N

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Di Sulawesi Tengah Menurut Daerah Posisi September 2019 – September 2020 12

Tabel 2.2 Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah Maret – September 2020 12

Tabel 2.3 Gini Ratio Menurut Provinsi Se-Sulawesi 18

Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia Periode 2014 – 2020 18

Tabel 2.5 Struktur dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2019 (Persen) 22

Tabel 2.6 Target dan Realisasi Penganggaran Perubahan Tahun Anggaran 2020 26

BAB III

Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi APBD 2020 Propinsi Sulawesi Tengah..... 36

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Urusan Tahun Anggaran 2020 37

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Tahun Anggaran 2020 38

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020..... 39

BAB IV

Tabel 4.1 Masa Manfaat Aset Tetap 55

BAB V

Tabel 5.1 Rekapitulasi Realisasi APBD 2020 63

Tabel 5.2 Ringkasan Realisasi Pendapatan Belanja Tahun 2020 dan 2019 65

Tabel 5.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019 66

Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020..... 67

Tabel 5.5 Realisasi Rincian Pajak Daerah Tahun 2020 68

Tabel 5.6 Realisasi Rincian Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020..... 68

Tabel 5.7 Realisasi Rincian Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2020 69

Tabel 5.8 Rincian Jenis Pajak Bahan Bakar – Kendaraan Bermotor Tahun 2020 .. 69

Tabel 5.9 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 70

Tabel 5.10 Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Tahun 2020. 73

Tabel 5.11 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang SAH Tahun 2020 74

Tabel 5.12 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 Dan 2019..... 77

Tabel 5.13 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2020 dan 2019 77

Tabel 5.14 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020..... 78

Tabel 5.15 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2020 79

Tabel 5.16 Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2020 80

Tabel 5.17 Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 80

Tabel 5.18 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2020 dan 2019..... 81

Tabel 5.19 Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020..... 82

Tabel 5.20 Realisasi Belanja Tahun 2020 83

Tabel 5.21 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 84

Tabel 5.22 Realisasi Rincian Belanja Pegawai Tahun 2020 86

Tabel 5.23 Realisasi Rincian Belanja Barang dan Jasa 88

Tabel 5.24 Realisasi Rincian Hibah Tahun 2020 90

Tabel 5.25 Realisasi Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2020 90
Tabel 5.26 Realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemsyarakatan Tahun 2020 92
Tabel 5.27 Realisasi Hibah Dana Bantuan Operasi Sekolah Tahun 2020 92
Tabel 5.28 Realisasi Bantuan Sosial Tahun 2020 93
Tabel 5.29 Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 94
Tabel 5.30 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah 95
Tabel 5.31 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96
Tabel 5.32 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 97
Tabel 5.33 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 97
Tabel 5.34 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 98
Tabel 5.35 Rincian Obyek Belanja Tak Terduga Kejadian Luar Biasa Lainnya 2020 99
Tabel 5.36 Realisasi Transfer Tahun 2020 99
Tabel 5.37 Realisasi Tranfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2020 101
Tabel 5.38 Realisasi Tranfer Bantuan Keuangan Tahun 2020 102
Tabel 5.39 Realisasi Tranfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 102
Tabel 5.40 Realisasi Tranfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020 103
Tabel 5.41 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 104
Tabel 5.42 Perhitungan SiLPA Tahun 2020 106
Tabel 5.43 Rincian Perhitungan SiLPA Tahun 2020 106
Tabel 5.44 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Labih Tahun 2020 dan 2019 107
Tabel 5.45 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 108
Tabel 5.46 Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 109
Tabel 5.47 Rincian Saldo Anggaran Lebih Tahun 2020 dan 2019 109
Tabel 5.48 Posisi Jumlah Aset Tahun 2020 dan 2019 110
Tabel 5.49 Posisi Aset Lancar Tahun 2020 111
Tabel 5.50 Posisi Kas Tahun 2020 111
Tabel 5.51 Posisi Saldo Kas Daerah 112

Tabel 5.52 Kas di Bendahara Pengeluaran 113
Tabel 5.53 Kas di Badan Layanan Umum Daerah 114
Tabel 5.54 Kas di Badan Layanan Umum Daerah Undata 114
Tabel 5.55 Kas di Badan Layanan Umum Daerah Madani 115
Tabel 5.56 Kas Bendahara BOS 115
Tabel 5.57 Rekapitulasi Jasa Giro Dana BOS Tahun 2020 117
Tabel 5.58 Piutang Berdasarkan Kategori 118
Tabel 5.59 Rincian Piutang Pendapatan 118
Tabel 5.60 Perubahan Saldo piutang Pendapatan 119
Tabel 5.61 Rincian Piutang Pajak Daerah 119
Tabel 5.62 Rincian Piutang Retribusi 121
Tabel 5.63 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang SAH 122
Tabel 5.64 Piutang BLUD RSD Madani 123
Tabel 5.65 Piutang BLUD RSUD Undata 124
Tabel 5.66 Rincian Piutang Lainnya 125
Tabel 5.67 Piutang Bagian Lancar TGR 2020 125
Tabel 5.68 Penyisihan Piutang 127
Tabel 5.69 Rincian Beban DiBayar Dimuka 127
Tabel 5.70 Posisi Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 2019 130
Tabel 5.71 Daftar Per Jenis Barang Persediaan Tahun 2020 131
Tabel 5.72 Rekapitulasi Persediaan Rusak dan Usang/Kadaluarsa
Tahun Anggaran 2020 132
Tabel 5.73 Jenis Investasi Jangka Panjang 132
Tabel 5.74 Investasi Permanen 133
Tabel 5.75 Daftar Aset Tetap Tahun 2020 dan 2019 136
Tabel 5.76 Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Tahun 2020 138
Tabel 5.77 Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Akm. Penyusutan Aset Tetap
Tahun 2020 138
Tabel 5.78 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tahun 2020 139

Tabel 5.79 Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2020 139
Tabel 5.80 Rekapitulasi Hibah Aset Tetap Tahun 2020 141
Tabel 5.81 Rekapitulasi Unit Aset Tetap 143
Tabel 5.82 Daftar Mutasi Tanah 144
Tabel 5.83 Aset Tanah yang Dipinjampakaikan Kepada Pihak Lain Tahun 2020 147
Tabel 5.84 Mutasi Peralatan dan Mesin 148
Tabel 5.85 Rekapitulasi Unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020 151
Tabel 5.86 Mutasi Gedung dan Bangunan 153
Tabel 5.87 Rekapitulasi Unit Aset Gedung dan Bangunan 156
Tabel 5.88 Rincian BMD Gedung dan Bangunan yang Dipinjampakaikan Tahun 2020 157
Tabel 5.89 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan 158
Tabel 5.90 Rincian Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi 159
Tabel 5.91 Mutasi Aset Tetap Lainnya 161
Tabel 5.92 Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya 162
Tabel 5.93 Rekapitulasi Aset Tetap Renovasi (ATR) 164
Tabel 5.94 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 165
Tabel 5.95 Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020 166
Tabel 5.96 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020 167
Tabel 5.97 Jenis Aset Lainnya Tahun 2020 167
Tabel 5.98 Kasus Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pada Bendahara 168
Tabel 5.99 Kasus Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pada Pegawai Negeri Bukan Bendahara 168
Tabel 5.100 Panjar Uang Muka 169
Tabel 5.101 Tagihan Jangka Panjang Kemitraan 169
Tabel 5.102 Aset Tidak Berwujud 171
Tabel 5.103 Mutasi Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud 172
Tabel 5.104 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud 174

Tabel 5.105 Mutasi Aset Lain-lain 174
Tabel 5.106 Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain Tahun 2020 175
Tabel 5.107 Mutasi Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Tidak Ditemukan 176
Tabel 5.108 Jumlah Unit Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Tidak Ditemukan Tahun 2020 177
Tabel 5.109 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 2020 178
Tabel 5.110 Mutasi Aset Lain-lainnya 178
Tabel 5.111 Mutasi Aset Belum Jelas Statusnya 179
Tabel 5.112 Rincian Kewajiban Jangka Pendek 181
Tabel 5.113 Daftar Pendapatan Diterima DiMuka 2020 182
Tabel 5.114 Utang Belanja Tahun 2020 183
Tabel 5.115 Utang Jangka Pendek Lainnya 2020 184
Tabel 5.116 Mutasi Saldo Ekuitas 185
Tabel 5.117 Rekapitulasi Pendapatan – LO Tahun 2020 187
Tabel 5.118 Komposisi Realisasi Pendapatan – LO 2020 188
Tabel 5.119 Pedapatan Asli Daerah – LO 189
Tabel 5.120 Pendapatan Pajak Daerah – LO 191
Tabel 5.121 Pendapatan Retribusi Daerah – LO 192
Tabel 5.122 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO ... 192
Tabel 5.123 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO 193
Tabel 5.124 Rekapitulasi Pendapatan Transfer – LO 194
Tabel 5.125 Rekapitulasi Pendapatan Transfer pemerintah Pusat – LO 195
Tabel 5.126 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO 195
Tabel 5.127 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LO 197
Tabel 5.128 Pendapatan Dana Alokasi Khusus - LO 198
Tabel 5.129 Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang SAH – LO 198
Tabel 5.130 Rekapitulasi Pendapatan Hibah – LO 199
Tabel 5.131 Beban Tahun 2020 200
Tabel 5.132 Beban Operasi 201

Tabel 5.133 Beban Pegawai 202
Tabel 5.134 Beban Barang dan Jasa 202
Tabel 5.135 Beban Hibah Tahun 2020 204
Tabel 5.136 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 205
Tabel 5.137 Rincian Beban Penyisihan Piutang 205
Tabel 5.138 Beban Lain-lain 206
Tabel 5.139 Beban Tranfer 206
Tabel 5.140 Surplus/(Defisit) Non Operasional 207
Tabel 5.141 Pos Luar Biasa 207
Tabel 5.142 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 208
Tabel 5.143 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 209
Tabel 5.144 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi 209
Tabel 5.145 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 210
Tabel 5.146 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi 211
Tabel 5.147 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi 211
Tabel 5.148 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 211
Tabel 5.149 Arus Kas dari Aktivitas Transitori 212
Tabel 5.150 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitori 212
Tabel 5.151 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitori 213
Tabel 5.152 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020 215
Tabel 5.153 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020 215
Tabel 5.154 Pendapatan – LO dan Realisasi Pendapatan– LRA Tahun 2020 216
Tabel 5.155 Rincian Pendapatan – LO dan Realisasi Pendapatan– LRA Tahun 2020 216
Tabel 5.156 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah – LO dan
Pendapatan Asli Daerah – LRA 217
Tabel 5.157 Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Tahun 2020 218
Tabel 5.158 Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan – LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan – LRA 219
Tabel 5.159 Perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang SAH – LO
Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang SAH – LRA..... 219
Tabel 5.160 Perbandingan Pendapatan Transfer – LO dan
Perbandingan Pendapatan Transfer – LRA 220
Tabel 5.161 Perbandingan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang SAH – LO dan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang SAH – LRA 221
Tabel 5.162 Perbandingan Beban Operasi dengan Belanja Operasi Tahun 2020 223
Tabel 5.163 Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2020 ... 223
Tabel 5.164 Perbandingan Beban Barang dan Jasa dengan
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 224
Tabel 5.165 Perbandingan Beban Hibah dengan Belanja Hibah Tahun 2020..... 226
Tabel 5.166 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 227
Tabel 5.167 Rincian Beban Penyisihan Piutang 227
Tabel 5.168 Rincian Beban Lain-lain 228
Tabel 5.169 Perbandingan Beban Transfer dan Belanja Transfer Tahun 2020 228

BAB VI

Tabel 6.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 230
Tabel 6.2 Batas Administrasi Kabupaten / Kotamadya dalam Wilayah
Provinsi Sulawesi Tengah 231
Tabel 6.3 Daftar Jumlah Pegawai Tahun 2020 233
Tabel 6.4 Rekapitulasi Realisasi Dana Dekontrasi APBN Per 31 Desember 2020 .. 236
Tabel 6.5 Rekapitulasi Realisasi Dana Tugas Pembantuan APBN
Per 31 Desember 2020..... 238

DAFTAR GAMBAR

BAB II

Gambar 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2020 10

Gambar 2.2 Perkembangan TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pada Periode 2019-2020 14

Gambar 2.3 Perkembangan Gini Ratio, Maret 2016 – September 2020 17

Gambar 2.4 Indeks Pembangunan Manusia Periode Tahun 2014 – 2020 19

Gambar 2.5 Pertumbuhan dan Struktur PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2020 (C-to-C) 20

Gambar 2.6 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 (C-to-C) 21

BAB V

Gambar 5.1 Perbandingan Realisasi APBD 2020 dan 2019 64

Gambar 5.2 Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Realisasi Pendapatan Tahun 2020 66

Gambar 5.3 Realisasi Belanja Tahun 2020 83

Gambar 5.4 Komposisi Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 84

Gambar 5.5 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 85

Gambar 5.6 Kontribusi Aset Tahun 2020 110

Gambar 5.7 Komposisi Aset Tetap Tahun 2020 138

Gambar 5.8 Perbandingan Pendapatan – LO 2020 dan 2019 188

Gambar 5.9 Komposisi Pendapatan – LO Tahun 2020 188
Gambar 5.10 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah LO 2020 dan 2019 190
Gambar 5.11 Perbandingan Pendapatan Transfer – LO Tahun 2020 dan 2019 194
Gambar 5.12 Komposisi Pendapatan Hibah – LO 199
Gambar 5.13 Komposisi Beban – LO Tahun 2020 200

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palu, 19 Mei 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

LONGKI DJANGGOLA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
PENDAPATAN	**4.106.116.585.244,95**	**4.193.329.057.130,07**	**102,12**	**4.128.153.120.869,78**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.054.606.448.582,08**	**1.122.670.398.589,07**	**106,45**	**1.090.854.785.057,78**
Pendapatan Pajak Daerah	850.700.000.000,00	914.780.331.698,60	107,53	896.321.261.948,00
Pendapatan Retribusi Daerah	13.167.996.775,00	14.690.106.655,58	111,56	12.670.320.760,42
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22.380.692.073,00	21.914.954.430,00	97,92	18.375.395.982,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	168.357.759.734,08	171.285.005.804,89	101,74	163.487.806.367,36
PENDAPATAN TRANSFER	**3.031.522.762.193,87**	**3.055.555.418.224,00**	**100,79**	**3.014.996.800.097,00**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.006.594.138.193,87	3.030.626.794.224,00	100,80	2.994.301.818.097,00
Dana Bagi Hasil Pajak	96.760.482.433,46	89.136.505.394,00	92,12	51.489.956.127,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	93.640.448.178,41	186.784.605.210,00	199,47	98.123.993.969,00
Dana Alokasi Umum	1.492.182.666.000,00	1.488.847.818.000,00	99,78	1.637.588.970.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.324.010.541.582,00	1.265.857.865.620,00	95,61	1.207.098.898.001,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	24.928.624.000,00	24.928.624.000,00	100,00	20.694.982.000,00
Dana Penyesuaian	24.928.624.000,00	24.928.624.000,00	100,00	20.694.982.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**19.987.374.469,00**	**15.103.240.317,00**	**75,56**	**22.301.535.715,00**
Pendapatan Hibah	19.306.293.943,00	14.422.159.791,00	74,70	13.713.424.715,00
Pendapatan Lainnya	681.080.526,00	681.080.526,00	100,00	8.588.111.000,00
BELANJA	**4.049.510.086.061,55**	**3.810.416.446.556,90**	**94,10**	**3.660.334.086.927,17**
BELANJA OPERASI	3.323.714.689.404,76	3.142.577.173.852,95	94,55	2.823.714.259.401,10
Belanja Pegawai	1.432.594.909.077,30	1.348.495.563.229,00	94,13	1.315.443.298.690,00
Belanja Barang	971.561.127.504,06	907.419.260.623,95	93,40	1.046.327.640.711,10
Belanja Hibah	918.079.152.823,40	885.470.850.000,00	96,45	461.119.320.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.479.500.000,00	1.191.500.000,00	80,53	824.000.000,00
BELANJA MODAL	**708.302.065.359,98**	**665.439.891.390,95**	**93,95**	**836.619.827.526,07**
Belanja Tanah	835.750.000,00	835.750.000,00	100,00	1.181.910.100,00
Belanja Peralatan dan Mesin	262.683.174.277,28	229.478.761.975,00	87,36	257.512.641.350,35
Belanja Bangunan dan Gedung	251.912.945.663,70	244.805.546.096,95	97,18	265.391.804.467,88
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.912.415.411,00	147.282.208.399,00	99,57	265.461.184.605,84
Belanja Aset Tetap Lainnya	44.957.780.008,00	43.037.624.920,00	95,73	47.072.287.002,00
BELANJA TAK TERDUGA	**17.493.331.296,81**	**2.399.381.313,00**	**13,72**	**0,00**
Belanja Tak Terduga	17.493.331.296,81	2.399.381.313,00	13,72	0,00
TRANSFER	**486.546.154.983,00**	**470.641.471.334,00**	**96,73**	**438.437.132.524,00**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**443.270.948.483,00**	**427.382.228.304,00**	**96,42**	**419.070.467.846,00**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	443.270.948.483,00	427.382.228.304,00	96,42	419.070.467.846,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**43.275.206.500,00**	**43.259.243.030,00**	**99,96**	**19.366.664.678,00**
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	41.128.840.000,00	41.112.876.530,00	99,96	18.122.094.278,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.146.366.500,00	2.146.366.500,00	100,00	1.244.570.400,00
SURPLUS / (DEFISIT)	**(429.939.655.799,60)**	**(87.728.860.760,83)**	**20,40**	**29.381.901.418,61**
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH	**429.939.655.799,60**	**429.929.141.925,60**	**100,00**	**439.594.405.001,99**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	429.939.655.799,60	429.929.141.925,60	100,00	439.594.405.001,99
PENGELUARAN DAERAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.038.000.000,00**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	39.038.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	**429.939.655.799,60**	**429.929.141.925,60**	**100,00**	**400.556.405.001,99**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**342.200.281.164,77**	**0,00**	**429.938.306.420,60**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

LONGKI DJANGGOLA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	2020	2019
Saldo Anggaran Lebih Awal	429.938.306.420,60	439.534.795.927,97
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	429.929.141.925,60	439.594.405.001,99
Sub Total	**9.164.495,00**	**(59.609.074,02)**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	342.200.281.164,77	429.938.306.420,60
Sub Total	**342.209.445.659,77**	**429.878.697.346,58**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(9.164.495,00)	59.609.074,02
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**342.200.281.164,77**	**429.938.306.420,60**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

LONGKI DJANGGOLA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	316.571.833.399,24	417.477.463.604,65
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.357.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	238.480,00	0,00
Kas di BLUD	7.666.118.451,53	9.182.066.112,65
Kas di Bendahara BOS	17.962.090.834,00	3.164.298.483,00
Kas Lainnya	0,00	114.470.599,30
Piutang Pendapatan	64.221.969.676,83	85.314.901.949,38
Piutang Lainnya	4.541.407.866,00	8.220.371.920,00
Penyisihan Piutang	(10.931.931.822,01)	(10.618.076.502,09)
Beban Dibayar Dimuka	276.235.789,33	240.035.240,00
Persediaan	52.384.805.206,15	47.200.905.650,64
JUMLAH ASET LANCAR	452.692.767.881,08	560.297.794.057,53
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	394.589.859.721,16	389.083.595.721,92
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	394.589.859.721,16	389.083.595.721,92
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	394.589.859.721,16	389.083.595.721,92
ASET TETAP		
Tanah	956.308.142.832,81	941.427.507.832,81
Peralatan dan Mesin	1.497.930.809.655,61	1.270.586.308.474,61
Gedung dan Bangunan	2.290.021.784.916,83	1.927.215.708.837,26
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.883.559.327.970,16	3.616.675.726.931,06
Aset Tetap Lainnya	73.880.877.288,55	69.849.193.232,55
Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.452.549.125,64	56.718.855.835,00
Akumulasi Penyusutan	(3.374.813.249.571,19)	(2.827.061.542.508,62)
JUMLAH ASET TETAP	5.363.340.242.218,41	5.055.411.758.634,67
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	12.839.668.335,00	12.190.648.335,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.585.568.880,90	3.585.568.880,83
Aset Tidak Berwujud	5.089.666.619,00	4.008.027.676,54
Aset Lain-lain	276.450.834.227,99	90.478.959.376,97
JUMLAH ASET LAINNYA	297.965.738.062,89	110.263.204.269,34
JUMLAH ASET	**6.508.588.607.883,54**	**6.115.056.352.683,46**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	1.349.379,00
Pendapatan Diterima Dimuka	161.510.603,99	150.603.986,66
Utang Belanja	113.181.040.262,89	502.093.414,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.671.256.929,00	101.776.207.359,53
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	118.013.807.795,88	102.430.254.139,19
JUMLAH KEWAJIBAN	**118.013.807.795,88**	**102.430.254.139,19**
EKUITAS		
EKUITAS	6.390.574.800.087,66	6.012.626.098.544,27
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**6.508.588.607.883,54**	**6.115.056.352.683,46**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

LONGKI DJANGGOLA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	**3.821.710.781.330,37**	**4.355.223.682.033,42**	**(533.512.900.703,05)**	**(12,25)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	**1.153.918.332.147,52**	**1.163.727.554.484,33**	**(9.809.222.336,81)**	**(0,84)**
Pendapatan Pajak Daerah - LO	915.678.224.318,70	897.127.735.155,00	18.550.489.163,70	2,07
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	14.442.114.805,58	12.941.066.055,42	1.501.048.750,16	11,60
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	66.742.299.552,32	62.036.454.577,66	4.705.844.974,66	7,59
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	157.055.693.470,92	191.622.298.696,25	(34.566.605.225,33)	(18,04)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	**2.600.610.433.395,00**	**3.023.584.911.097,00**	**(422.974.477.702,00)**	**(13,99)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	2.575.681.809.395,00	2.994.301.818.097,00	(418.620.008.702,00)	(13,98)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	24.928.624.000,00	20.694.982.000,00	4.233.642.000,00	20,46
Bantuan Keuangan - LO	0,00	8.588.111.000,00	(8.588.111.000,00)	(100,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	**67.182.015.787,85**	**167.911.216.452,09**	**(100.729.200.664,24)**	**(59,99)**
Pendapatan Hibah - LO	66.500.935.261,85	167.911.216.452,09	(101.410.281.190,24)	(60,40)
Pendapatan Lainnya - LO	681.080.526,00	0,00	681.080.526,00	0,00
BEBAN	**3.499.154.779.563,84**	**3.905.654.559.116,70**	**(406.499.779.552,86)**	**(10,41)**
Beban Pegawai - LO	1.355.874.150.078,00	1.318.530.690.852,00	37.343.459.226,00	2,83
Beban Barang dan Jasa - LO	896.929.145.395,13	966.574.485.372,90	(69.645.339.977,77)	(7,21)
Beban Hibah - LO	354.001.850.000,00	583.016.266.316,34	(229.014.416.316,34)	(39,28)
Beban Bantuan Sosial - LO	1.191.500.000,00	824.000.000,00	367.500.000,00	44,60
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	351.834.698.902,58	569.113.732.453,84	(217.279.033.551,26)	(38,18)
Beban Penyisihan Piutang - LO	4.238.255.606,78	598.766.823,12	3.639.488.783,66	607,83
Beban Lain-lain - LO	39.644.797.523,35	21.731.246.601,50	17.913.550.921,85	82,43
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	452.181.139.028,00	425.898.706.019,00	26.282.433.009,00	6,17
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	41.112.876.530,00	18.122.094.278,00	22.990.782.252,00	126,87
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.146.366.500,00	1.244.570.400,00	901.796.100,00	72,46
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**322.556.001.766,53**	**449.569.122.916,72**	**(127.013.121.150,19)**	**(28,25)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	6.442.034.573,90	0,00	6.442.034.573,90	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(6.442.034.573,90)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**316.113.967.192,63**	**449.569.122.916,72**	**(133.455.155.724,09)**	**(29,69)**
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa - LO	2.369.404.263,00	0,00	2.470.604.263,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**(2.369.404.263,00)**	**0,00**	**(2.369.404.263,00)**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**313.744.562.929,63**	**449.569.122.916,72**	**(135.824.559.987,09)**	**(30,21)**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

LONGKI DJANGGOLA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	914.780.331.698,60	896.321.261.948,00
Pendapatan Retribusi Daerah	14.690.106.655,58	12.670.320.760,42
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	21.914.954.430,00	18.375.395.982,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	170.211.316.456,89	163.424.676.367,36
Dana Bagi Hasil Pajak	89.136.505.394,00	51.489.956.127,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	186.784.605.210,00	98.123.993.969,00
Dana Alokasi Umum	1.488.847.818.000,00	1.637.588.970.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.265.857.865.620,00	1.207.098.898.001,00
Dana Penyesuaian	24.928.624.000,00	20.694.982.000,00
Pendapatan Hibah	14.422.159.791,00	13.713.424.715,00
Pendapatan Lainnya	681.080.526,00	8.588.111.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	4.192.255.367.782,07	4.128.089.990.869,78
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	1.348.495.563.229,00	1.315.443.298.690,00
Belanja Barang	907.419.260.623,95	1.046.327.640.711,10
Belanja Hibah	885.470.850.000,00	461.119.320.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.191.500.000,00	824.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	43.259.243.030,00	19.366.664.678,00
Belanja Tak Terduga	2.399.381.313,00	-
Bagi Hasil Pajak	427.382.228.304,00	419.070.467.846,00
Jumlah Arus Kas Keluar	3.615.618.026.499,95	3.262.151.391.925,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**576.637.341.282,12**	**865.938.598.944,68**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	86.360.000,00	61.182.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	1.081.950,00	500.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	986.247.398,00	1.448.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.073.689.348,00	63.130.000,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	835.750.000,00	1.181.910.100,00
Belanja Peralatan dan Mesin	229.478.761.975,00	257.512.641.350,35
Belanja Bangunan dan Gedung	244.805.546.096,95	265.391.804.467,88
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.282.208.399,00	265.461.184.605,84
Belanja Aset Tetap Lainnya	43.037.624.920,00	47.072.287.002,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintahan Daerah		39.038.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	665.439.891.390,95	875.657.827.526,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(664.366.202.042,95)**	**(875.594.697.526,07)**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**-**	**-**

URAIAN	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	178.352.937.929,74	215.259.625.598,41
Jumlah Arus Kas Masuk	178.352.937.929,74	215.259.625.598,41
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	178.354.287.308,74	215.259.625.598,41
Jumlah Arus Kas Keluar	178.354.287.308,74	215.259.625.598,41
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(1.349.379,00)**	**-**
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	**(87.730.210.139,83)**	**(9.656.098.581,39)**
Saldo Awal	**429.939.655.799,60**	**439.536.145.306,97**
Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya	**(9.164.495,00)**	**59.609.074,02**
Saldo Akhir	**342.200.281.164,77**	**429.939.655.799,60**
Kas di Kas Daerah	316.571.833.399,24	417.477.463.604,65
Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.357.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	238.480,00	-
Kas di BLUD	7.666.118.451,53	9.182.066.112,65
Kas di Bendahara BOS	17.962.090.834,00	3.164.298.483,00
Kas Lainnya	-	114.470.599,30

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

LONGKI DJANGGOLA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	**6.012.626.098.544,27**	**5.239.731.314.140,64**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**313.744.562.929,63**	**449.569.122.916,72**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi ekuitas lainnya	64.204.138.613,76	323.325.661.486,91
EKUITAS AKHIR	**6.390.574.800.087,66**	**6.012.626.098.544,27**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

LONGKI DJANGGOLA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Nomor 64 tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah adalah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan berbasis akrual tersebut yang terdiri dari gabungan Laporan Keuangan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.

Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan mengacu berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah APBD Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019

dan Peraturan Daerah Perubahan APBD Nomor 5 Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 November 2020.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan gambaran akan pemenuhan kepatuhan terhadap realisasi anggaran pendapatan daerah serta pemenuhan akan target realisasi anggaran belanja daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya, Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan posisi keuangan daerah yang terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Dari neraca dapat diperkirakan potensi pemasukan dari nilai aset produktif dan dana yang harus dicadangkan untuk pelunasan kewajiban jangka pendek, Laporan Arus Kas menggambarkan pergerakan kas dari beberapa aktivitas yang berbeda, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non-anggaran dan Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya serta Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan, CaLK dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan sebagaimana dijelaskan diatas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 secara umum disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode pelaporan tahun anggaran 2020 dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi yaitu

masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Pelaporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan/belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas.

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen.

   Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam tahun anggaran 2020 sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi.

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang memuat:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan aset, kewajiban, ekuitas dana, perubahan saldo anggaran lebih, arus kas pemerintah daerah, laporan operasional, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan dibuat untuk lebih memudahkan para pembaca laporan keuangan dan merupakan penjelasan atas nilai-nilai pos-pos/rekening dalam komponen laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 dasar penyusunannya adalah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

1. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;
2. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.4 Penjelasan Laporan Arus Kas

5.5 Penjelasan Laporan Operasional

5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.7 Pengungkapan Perbedaan LRA dan LO

5.8 Pengungkapan Akun-Akun Lainnya

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Kondisi Umum Sulawesi Tengah

6.2 Gambaran Umum Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah

6.3 Informasi Tambahan Lainnya

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 13,18%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,11%;
c. Gini Ratio sebesar 0,339%;
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,88%;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 7,15%;
f. Tingkat Inflasi sebesar 6,64%.

Indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 13,06%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,77 %;
c. Gini Ratio sebesar 0,321%;
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,55%;

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,86%;
f. Tingkat Inflasi sebesar 1,62%.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya

Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Tengah mencapai 403,74 ribu orang (13,06 persen), bertambah sebesar 5 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 398,73 ribu orang (12,92 persen).

Selama periode Maret 2020-September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 6,7 ribu orang (dari 80,73 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 87,43 ribu orang pada September 2020), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 1,7 ribu orang (dari 318 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 316,31 ribu orang pada September 2020).

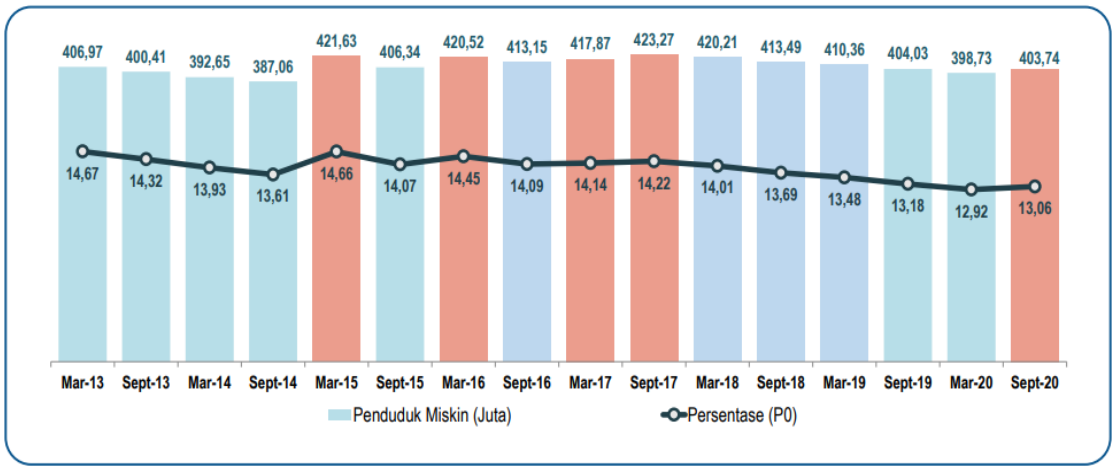

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2020

Gambar 2.1
Jumlah dan Persentase Penduduk miskin di Sulawesi Tengah
Tahun 2013- 2020

Dilihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin di kawasan perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan kawasan pedesaan. Dimana jumlah penduduk miskin perkotaan tahun 2020 adalah sebesar 87,44 ribu orang (9,21%) dan penduduk miskin pedesaan sebesar 316,31 ribu orang (14,76%). Hal ini bisa dipahami karena penduduk pedesaan memiliki akses layanan publik yang lebih rendah, seperti rendahnya tingkat pendidikan. Disamping itu mayoritas penduduk pedesaan bekerja disektor pertanian dimana nilai produk pertanian semakin menurun. Karenanya penduduk pedesaan memiliki pendapatan yang relative rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan.Upaya-upaya pengurangan kesenjangan dengan memfokuskan pembangunan dikawasan pedesaan menjadi prioritas dengan pengembangan wilayah pesisir secara terpadu, mengingat wilayah pesisir Sulawesi Tengah merupakan daerah tertinggal dan miskin. Perencanaan tata ruang juga mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan daya dukung lingkungan. Selain itu upaya peningkatan pendapatan untuk mendorong pengentasan kemiskinan juga perlu dilakukan dengan memfokuskan program penanggulangan kemiskinan diwilayah yang menjadi kantong kemiskinan. Sinergi program pengentasan kemiskinan termasuk dengan pihak non pemerintah dilakukan untuk menguatkan fokus program pengentasan kemiskinan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya persentase tingkat kemiskinan selama periode Maret 2020 - September 2020 antara lain adalah:

1. Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan September 2020 meningkat sebesar 2,13 persen menjadi 94,59 dari 96,72 pada Maret 2020.
2. Laju inflasi Maret 2020 – September 2020 turun sebesar 0,06% menjadi 0,98% pada September 2019 – Maret 2020.
3. TPT Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,79% menjadi 3,77% dari 2,98% pada Februari 2020.
4. Beberapa komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan mengalami penurunan harga, seperti: tongkol/tun/cakalang, daging, susu, dan cabe.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2020-September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2020 adalah 2,58 dan pada September 2020 naik menjadi 2,78. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,77 menjadi 0,87 pada periode yang sama. Begitu juga apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu September 2019-September 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peurunan.

Indeks kedalamam kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Tengah menurut daerah posisi September 2019-September 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Indeks kedalamam kemiskinan dan indeks keparahan emiskinan di Sulawesi Tengah menurut daerah
posisi September 2019-September 2020

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Sep-19	1,98	3,71	3,19
Mar-20	1,68	2,96	2,58
Sep-20	1,83	3,2	2,78
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Sep-19	0,54	1,41	1,15
Mar-20	0,43	0,92	0,77
Sep-20	0,43	1,07	0,87

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk daerah perkotaan sebesar 1,83, sementara di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 3,20. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan adalah 0,43 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 1,07. Selanjutnya tabel dibawah ini menunjukan garis kemiskinan Sulawesi Tengah dalam perspektif regional Sulawesi, pada kondisi Bulan Maret 2020-September 2020.

Tabel 2.2
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah
Maret – September 2020

No	Tahun	Perkotaan		Perdesaan		Total	
		Mar-20	Sep-20	Mar-20	Sep-20	Mar-20	Sep-20
71	SuLawesi Utara	395.983	402.502	385.957	392.818	391.197	398.026
72	**SuLawesi Tengah**	**489.881**	**492.758**	**467.770**	**478.687**	**474.627**	**483.662**
73	SuLawesi Selatan	363.361	375.463	339.743	350.791	350.264	362.031
74	SuLawesi Tenggara	366.063	383.839	350.019	360.123	356.444	368.529
75	Gorotalo	371.201	375.740	366.811	373.911	368.990	374.843
76	SuLawesi Barat	354.993	356.967	349.695	352.269	350.743	352.874
	Indonesia	**471.822**	**475.477**	**433.281**	**437.902**	**454.652**	**458.947**

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2020

Tabel diatas menunjukan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berada pada urutan kedua perbandingan garis kemiskinan dalam perspektif regional Sulawesi pada periode Bulan Maret-September 2020. Pada periode Maret 2020 garis kemiskinan di Sulawesi Tengah (Rp/kapita/bulan) untuk perkotaan sebesar 489.811 dan bulan September sebesar 492.758. Sedangkan garis kemiskinan di Sulawesi Tengah (Rp/kapita/bulan) untuk pedesaan periode Maret 2020 tercatat sebesar 467.770 dan periode September sebesar 478.687.

Penurunan angka kemiskinan kedepan merupakan peran dan komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta para stakeholder dalam upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Pemerintah bersama instansi terkait akan mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah yang harus dibangun terus-menerus yaitu :

1. Memperluas kesempatan kerja (*Pomoting Opportunities for the Poor*);
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment);*
3. Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security).*

   Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan.

Peran pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dilakukan melalui program :

- Program penanganan fakir miskin.
- Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
- Program perlindungan sosial koban bencana alam.
- Program Perlindungan sosial korban bencana sosial.
- Program Jaminan sosial keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/PKH)

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Gambar dibawah ini menunjukan perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2019-2020.

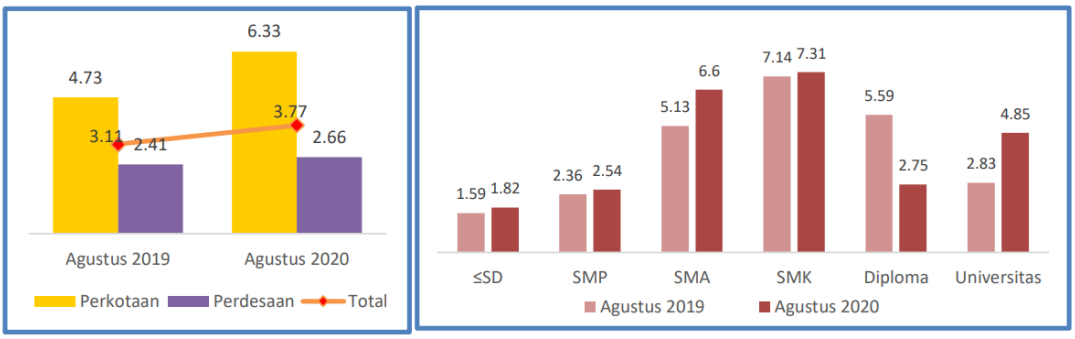

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2020

Gambar 2.2
Perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2019-2020.

Dari gambar diatas Jika dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan. Pada Agustus 2020, TPT di perkotaan sebesar 6,33 persen, sedangkan TPT di perdesaan sebesar 2,66 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka didaerah perkotaan sebesar 1,60 persen poin, begitu juga dengan TPT di perdesaan yang meningkat 0,25 persen poin.

Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2020, TPT pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 7,31 persen, kemudian diikuti oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,6 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang lebih terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA.

Mereka yang berpendidikan rendah, cenderung mau menerima pekerjaan yang tersedia di pasar kerja, dapat dilihat dari TPT untuk pendidikan

SD ke bawah memiliki nilai paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 1,82 persen. Pada Agustus 2020 jika dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT yang mengalami penurunan terjadi pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III, sedangkan peningkatan terjadi pada tingkat pendidikan SD kebawah, SMP, SMA, SMK, dan Universitas.

Dengan adanya pandemi covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Penurunan yang sempat terjadi pada triwulan II berdampak pada dinamika ketenagakerjaan. Namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah sudah berangsur pulih pada triwulan III. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Berkurangnya jam kerja adalah dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja, sebanyak 202,92 ribu orang atau sebesar 10,09 persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak 9,12 ribu orang atau sekitar 15,37 persen terhadap total penganggur di Sulawesi Tengah. Secara umum, pada semua kategori tersebut, penduduk laki-laki lebih banyak terdampak dibandingkan perempuan. Sedangkan menurut tempat tinggal, penduduk perkotaan dan perdesaan sama-sama terdampak Covid-19.

2.1.3 Gini Ratio

Gini Ratio merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepincangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah

yang telah diakui secara luas. Indeks Gini ratio dengan asumsi-asumsi tertentu dapat pula dipergunakan untuk bahan analisis perbandingan pembagian pendapatan relatif antar masyarakat dari beberapa negara atau wilayah dan kecenderungan kepincangan pembagian pendapatan antara anggota masyarakat tertentu. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama

b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah berasarkan data BPS Sulawesi Tengah selama periode Maret 2016 - September 2020 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2016 hingga September 2018 nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015 hingga September 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2018 hingga September 2019 nilainya mengalami relatif sedikit peningkatan, dan selanjutnya kembali menunjukkan trend penurunan higga September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 0,334 mengalami penurunan sebesar 0,005 poin dibanding September 2019 yang sebesar 0,339, dan stagnan dibanding Maret 2020 yang juga sebesar 0,334. Untuk daerah perdesaan, pada September 2020 Gini Ratio sebesar 0,295 naik 0,003 poin dibanding September 2019 yang sebesar 0,292 namun stagnan dibanding Maret 2020 di angka yang sama.

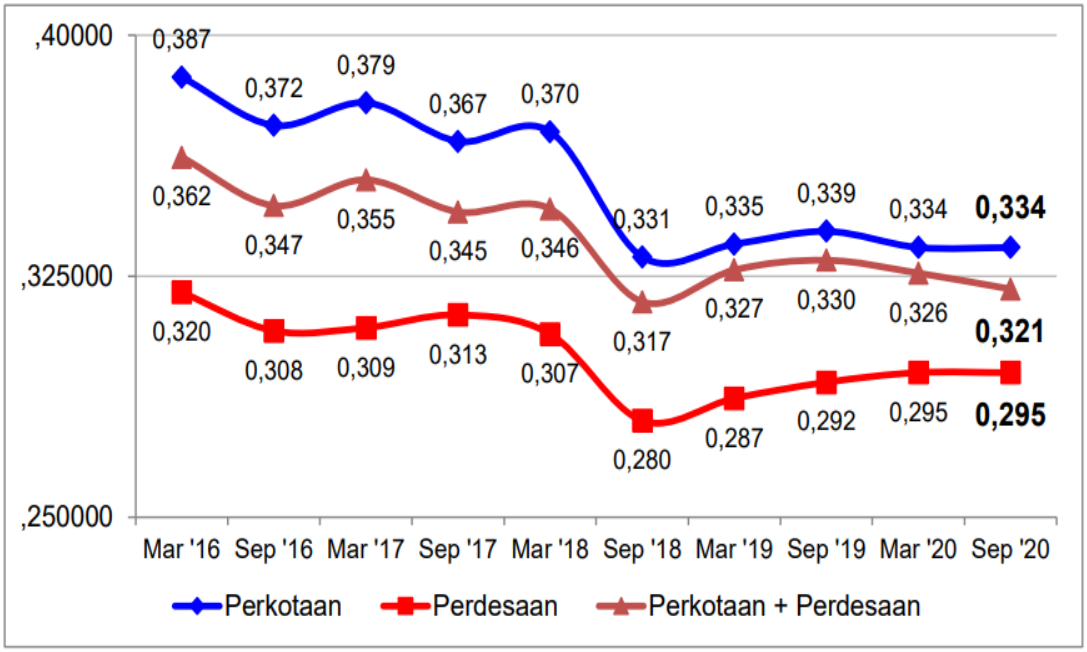

Gambar 2.3
Perkembangan Gini Ratio, Maret 2016 – September 2020

Faktor utama yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2020 adalah perubahan pengeluaran per kapita penduduk. Berdasarkan data Susenas, tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami penurunan yang lebih besar dibanding penduduk kelompok 40 persen terbawah. Pada kelompok penduduk 20 persen teratas penurunan tersebut mencapai 3,24 persen, sedangkan pada kelompok 40 persen terbawah hanya menurun sebesar 1,16 persen. Secara distribusi juga tercatat bahwa porsi pengeluaran enduduk kelompok 20 persen teratas secara total mengalami penurunan sebesar 0,22 persen, sedangkan pada kelompok 40 persen terbawah justru meningkat 0,30 persen.

Selama periode September 2019 - September 2020, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah merupakan yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi, baik secara total maupun menurut kategori wilayah perkotaan dan

perdesaan. Pada skala nasional, posisi nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah dalam setahun terakhir relatif stagnan. Pada September 2019 nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah berada pada urutan ke-11 terendah se-Indonesia, sedangkan pada Maret 2020 posisi tersebut hanya naik satu peringkat ke posisi 10, dan bertahan hingga September 2020.

Tabel 2.4
Gini Ratio Menurut Provinsi Se-Sulawesi

Provinsi	Setpember 2019		
	Kota	Desa	K+D
Sulawesi Utara	0,375	0,364	0,376
Sulawesi Tengah	**0,339**	**0,292**	**0,33**
Sulawesi Selatan	0,393	0,354	0,391
Sulawesi Tenggara	0,402	0,353	0,393
Gorontalo	0,399	0,393	0,41
Sulawesi Barat	0,438	0,32	0,365
Inodenesia	**0,391**	**0,315**	**0,38**

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia suatu negara. Indikator yang menjadi tolok ukur diantaranya kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bahkan indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu wilayah adalah wilayah maju, wilayah berkembang, atau wilayah terbelakang.

Tabel. 2.5
Indeks Pembangunan Manusia
Periode Tahun 2014 -2020

IPM						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
66,43	66,76	67,47	68,11	68,88	69,50	69,55

Tabel 2.4 maupun gambar 2.4 menunjukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Tengah dari tahun 2014 hingga 2019. Dapat dilihat bahwa nilai IPM Sulawesi Tengah di tahun 2014 hingga 2019 mengalami meningkat dari 63,29 pada tahun 2010 menjadi 69,55 pada tahun 2020 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,95 persen per tahun. Pada 2019-2020, IPM Sulawesi Tengah tumbuh 0,07 persen, angka pertumbuhan ini melambat dibandingkan dengan kenaikan pada 2018-2019, yang tumbuh sebesar 0,90 persen. Meskipun selama periode 2010 hingga 2020 IPM Sulawesi Tengah menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Sulawesi Tengah masih sama. Hingga saat ini, pembangunan manusia Sulawesi Tengah masih berstatus "sedang", yang disandang sejak tahun 2010.

Hal ini menunjukan bahwa tingkat kualitas sumber daya manusia maupun tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan. IPM Sulawesi Sulawesi tengah tahun 2020 mencapai 69,55 masih dibawah IPM nasional yang mencapai 71,94. Berikut grafik yang menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2014 hingga tahun 2020.

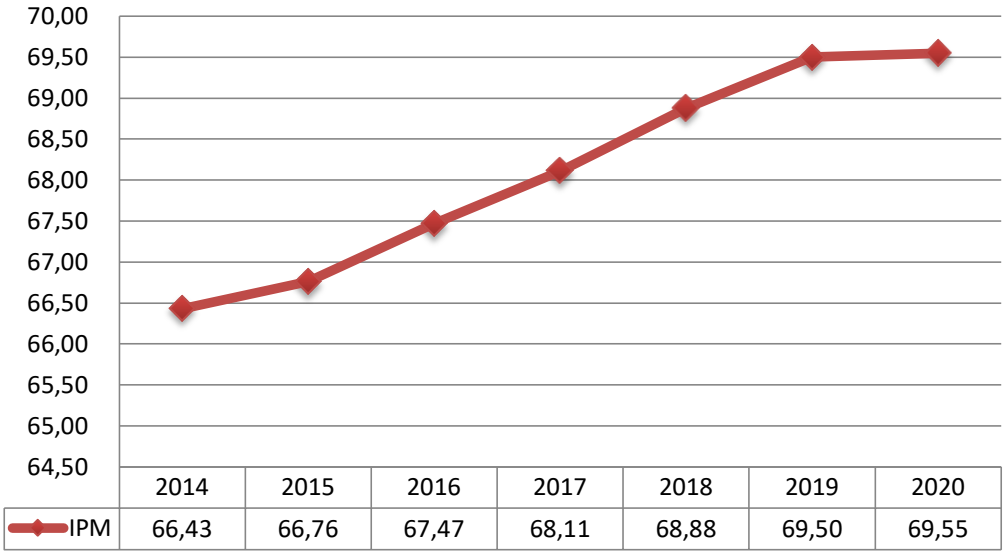

Gambar 2.4
Indeks Pembangunan Manusia Periode Tahun 2014 -2020

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

1. Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 (c-to-c) tumbuh 4,86 persen di atas pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tumbuh 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada 9 dari 17 lapangan usaha. Lima lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 23,68 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,36 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,80 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,56 persen serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,11 persen. Untuk

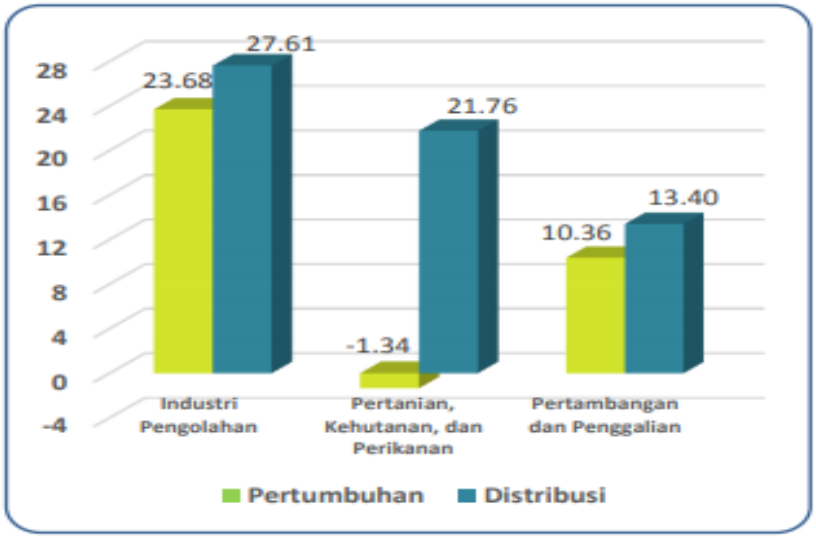

Gambar 2.5
Pertumbuhan dan Struktur PDRB Beberapa Lapangan Usaha
Tahun 2020 (c-to-c)

Sedangkan 8 lapangan usaha mengalami kontraksi. Tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi terbesar yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 33,12 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,05 persen; serta Konstruksi sebesar 8,47 persen.

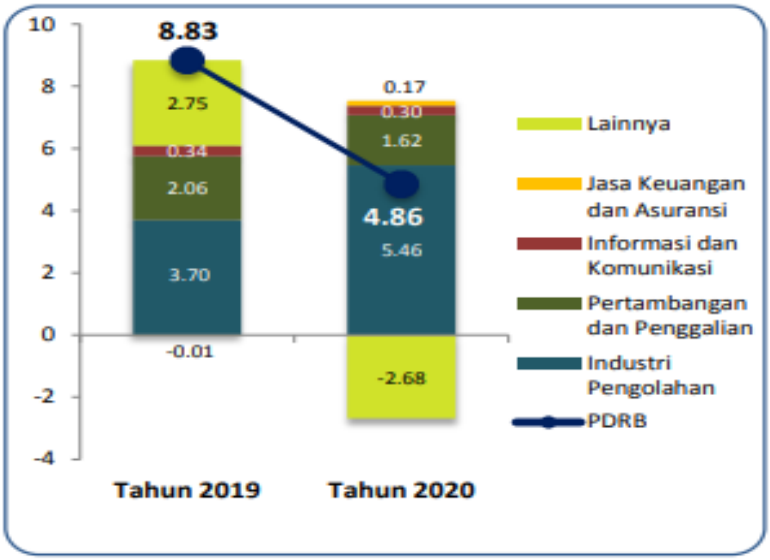

Gambar 2.6
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 (c-to-c)

Bila dilihat dari sumber pertumbuhannya, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 4,86 persen (c-to-c) tersebut paling besar disumbang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,46 persen, diikuti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,62 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,30 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,17 persen.

Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha tahun 2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (27,61 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,76 persen); Pertambangan dan Penggalian (13,40 persen); serta Konstruksi (10,14 persen).

Tabel 2.6
Struktur dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017 - 2019 (Persen)

Lapangan Usaha		Struktur Ekonomi				Laju Pertumbuhan		
		2018	2019*	2020**		2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,96	23,20	21,76		4,30	2,23	-1,34
B	Pertambangan dan Penggalian	12,84	13,39	13,40		22,72	13,78	10,36
C	Industri Pengolahan	20,89	22,42	27,61		106,29	17,30	23,68
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,03	0,03	0,03		7,29	1,90	3,12
E	Pengadaan Air	0,11	0,11	0,10		5,47	-0,15	0,80
F	Konstruksi	10,95	11,32	10,14		4,54	14,34	-8,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran. Dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,99	7,87	7,08		4,82	2,51	-6,15
H	Transportasi dan Pergudangan	3,56	3,53	2,26		7,66	2,94	-33,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48	0,45	0,38		5,99	-1,98	-11,05
J	Informasi dan Komunikasi	3,04	3,05	3,07		9,34	9,81	8,56
K	Jasa Keuangan	1,99	1,81	1,87		1,63	-0,63	9,80
L	Real Estate	1,61	1,51	1,45		4,87	0,19	0,38
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,21	0,20		5,72	5,26	-2,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,83	5,79	5,55		10,37	5,69	0,21
P	Jasa Pendidikan	3,43	3,31	3,10		5,37	3,41	-1,63
Q	Kasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,29	1,31		9,42	8,37	6,11
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,77	0,73	0,69		5,08	2,22	0,04
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**20,56**	**8,83**	**4,86**

Keteragan :
*) Angka Semetara
**) Angka Sangat Sementara

2. Menurut Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah selama tahun 2020 dibanding dengan tahun sebelumnya (c-to-c) mencapai 4,86 persen. Di tengah pandemi Covid-19, kinerja Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 27,78 persen mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah secara keseluruhan tetap bergerak positif. Pertumbuhan juga terjadi pada komponen Impor Barang dan Jasa, namun komponen ini merupakan faktor pengurang. Sedangkan komponen yang lain mengalami kontraksi.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 80,11 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2020, komponen yang memiliki sumbangsih paling besar adalah komponen Ekspor Barang dan Jasa dengan kontribusi sebesar 24,40 persen, sedangkan komponen lain seperti PK-RT, PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami kontraksi.

2.1.6 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Pada bulan Desember 2020 inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 0,46 persen, sedangkan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2019 hingga Desember 2020 adalah sebesar 1,62 persen. Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi 0,63 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,81 persen. Sementara Kota Luwuk pada bulan ini mengalami deflasi sebesar 0,26 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 0,83 persen.

Inflasi pada bulan Desember 2020 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,15 persen, diikuti oleh kelompok transportasi (0,90 persen), kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (0,50 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,32 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,03 persen), kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,01 persen), serta kelompok kesehatan (0,01 persen). Sementara penurunan indeks harga satusatunya terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen. Pada saat yang sama, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran relatif stabil.

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 yang meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah dikelompokkan kepada:
    a. Pendapatan Asli Daerah.
    b. Pendapatan transfer.
    c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
2. Belanja dikelompokkan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung.

a. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program kegiatan, terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
b. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

3. Pembiayaan meliputi :
   a. Penerimaan Pembiayaan Daerah.
   b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

   Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

   Sejalan dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 yang merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terdapat beberapa permasalahan pokok yang menjadi prioritas pembangunan daerah yaitu:
   1. Pendidikan dan Kesehatan.
   2. Pengentasan kemiskinan.
   3. Revitalisasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan.
   4. Iklim investasi dan iklim usaha.
   5. Peningkatan infrastruktur dan Energi.
   6. Reformasi birokrasi dan tata kelola.
   7. Pembangunan hukum dan ketertiban, dan
   8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

   Kebutuhan APBD lebih diorientasikan pada upaya:
   1. Penanggulangan kemiskinan.
   2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah serta penciptaan keamanan.

3. Penyediaan sarana dan prasarana dasar.
4. Peningkatan daya saing dan daya tarik investasi.
5. Revitalisasi pertanian, perikanan kelautan dan perdesaan.
6. Penegakan hukum dan HAM.
7. Mitigasi dan penanggulangan bencana.
8. Pemantapan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Untuk tercapainya sasaran program dan kegiatan yang diharapan dapat menyelesaikan atau mengurangi kualitas dan kuantitas masalah pada tahun berjalan seluruh program prioritas dituangkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Sejalan dengan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 dan RKPD tahun 2020 yang merupakan acuan dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari pokok-pokok ketentuan perundang-undangan dan kebijakan nasional sehingga keserasian, sinkronisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat tercapai.

Secara garis besar rencana target anggaran setelah perubahan dan realisasi dari struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2020

Uraian	2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	4.106.116.585.244,95	4.193.329.057.130,07	102,12
BELANJA	4.536.056.241.044,55	4.281.057.917.890,90	94,38
SURPLUS / (DEFISIT)	(429.939.655.799,60)	(87.728.860.760,83)	20,40
PEMBIAYAAN NETTO	429.939.655.799,60	429.929.141.925,60	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	342.200.281.164,77	-

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada:

1. Peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien;
2. Perluasan potensi obyek sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
3. Peningkatan kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kebijakan-kebijakan diatas diharapkan dapat memberi dampak untuk peningkatan pendapatan daerah yang perlu ditunjang dengan pengembangan sistem administrasi, Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang memadai agar semua unsur terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah terintegrasi, serta dapat menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang dominan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah dengan total realisasi sebesar Rp914.780.331.698,60 mencapai 107,53% dari total target Pajak Daerah sebesar Rp850,700,000,000.00.

2.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Struktur APBD diklasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah sebagai pusat pertanggung jawaban sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi masing-masing dan dituangkan dalam klasifikasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, belanja bunga dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Berdasarkan Perubahan Anggaran tahun anggaran 2020 Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp2.737.675.267.394,51 terealisasi sebesar Rp2.567.426.158.275,00 atau kurang sebesar Rp170.249.109.119,51 atau mencapai 93,78% sedangkan untuk Belanja Langsung dianggarkan Rp1.798.380.973.650,04 terealisasi Rp1.713.631.759.615,90 atau kurang sebesar Rp84.749.214.034,14 atau hanya mencapai 95,29%.

Melihat total realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang hanya mencapai jumlah Rp4.281.057.917.890,90 maka terdapat besaran jumlah anggaran yang tidak terserap pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp254.998.323.153,65 secara keseluruhan belanja langsung dan tidak langsung mencapai 94,38%.

Tidak tercapainya realisasi belanja sebagaimana diuraikan diatas disebabkan antara lain:

a. Dari sisi Belanja Tidak Langsung diantaranya disebabkan banyak pegawai telah memasuki masa purnabakti/pensiun atau pindah tugas dan efisiensi belanja berkenaan.
b. Insentif Pajak Daerah tidak seluruhnya dicairkan karena beberapa target penerimaan atas pajak tersebut tidak dapat direalisasikan, serta adanya pemotongan Tambahan Penghasilan atas hak pegawai yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan pemberian tambahan penghasilan tersebut.
c. Dari sisi Belanja Langsung disebabkan antara lain: adanya penghematan pemakaian listrik, air dan telpon, selisih pagu dengan kontrak pengadaan,

efisiensi penggunaan perjalanan dinas, dan kegiatan lain yang pekerjaan fisiknya mencapai 100%.

d. Adanya penghematan lain atas belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
e. Beberapa paket pekerjaan yang bersumber dari dana DAK terlambat dilaksanakan karena keterlambatan Petunjuk Teknis dari Kementerian terkait dan juga terdapat beberapa paket pekerjaan DAK yang tidak dapat direalisasikan tahun 2019 disebabkan sumber pendapatan DAK dari pusat tidak ditransfer sehingga atas belanja tersebut dibebankan pada APBD tahun 2020.
f. Kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap situasi dan kondisi dilapangan sehingga mengakibatkan terdapat beberapa paket pekerjaan mengalami keterlambatan.
g. Terjadinya gagal lelang untuk beberapa kegiatan dikarenakan kurangnya minat dari penyedia barang dan jasa yang disebabkan oleh pagu yang rendah dan ketidakmampuan penyedia barang jasa melakukan pelelangan secara online.
h. Pengadaan melalui ULP dan LPSE berjalan kurang optimal disebabkan antara lain jumlah Kelompok Kerja di ULP kurang memadai dibandingkan dengan jumlah paket yang harus di lelangkan sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang dan ketidaklengkapan dokumen lelang.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan program dengan indikator pada tingkat *input, output,* dan *outcome*. Capaian kinerja pada kegiatan diukur dalam tataran *output*. Sedangkan tingkat capaian kinerja program diukur dalam tataran *outcome*. Indikator kinerja *input* terdiri atas besaran dana yang terpakai dan besaran

pemakaian sumber daya manusia yang dihitung dengan penggunaan hari produktif. Sedangkan indikator kinerja *output* merupakan hasil yang diperoleh saat kegiatan selesai dilaksanakan. Dan terakhir, indikator kinerja *outcome* merupakan hasil dari pemanfaatan *output*, dimana indikator *outcome* tersebut akan menjadi indikator kinerja sasaran pada setiap kegiatan yang dibiayai oleh APBD.

Berdasarkan LAKIP 2020, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan 23 (dua puluh tiga) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan RPJMD 2016-2021. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa secara umum sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam LAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dengan ringkasan berdasarkan masing-masing Sasaran Kinerja sebagai berikut:

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

IKU	Satuan	2017		2018		2019		2019		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2019 THD RPJMD
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	83,21	102%	94,83%	116%	82,71%	101,80%	97,00%	119,38%	81,26-100	97,00%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH	Capaian 2020 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	WTP	
2	Nilai akuntabilitas kinerja	Predikat	B	B	B	B	B	100%	-	-	BB	-
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61,6	99,50%	61,8	96,56%	62,92	96,80%	-	-	70	-

Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Jaringan Jalan	persen	60,89	103,09	60,46	100,77	60,57	93,18			62,00	97,96
2	Rumah tangga pengguna listrik	persen	59,26	100,00	60,10	96,28	60,10	97,74	75,38	105,08	72,00	104,07
3	Rumah tangga pengguna air bersih	persen	59,29	100,00	60,10	96,28	60,10	97,74			71,00	84,65
4	Rumah layak huni	persen	70,02	99,90	74,74	104,90	62,86	86,88	68,65	93,46	74,55	92,08
5	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	persen	12,69	106,90	13,60	112,77	15,13	107,50	13,40	90,85	15,45	86,73

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Menurunnya Angka Kemiskinan

IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	85,8	97,60%	86,20%	99,65%	86,82%	99,70%	99,92%	86,00%	85,91-86,31%	79,00%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi

IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
Indeks gini	0,345	127,50%	0,32%	111,30%	0,33%	95,90%	0,32%	91,71%	0,334-0,324	91,71%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri

IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
koperasi aktif	6,41	9,78	73,44	111,64	57	86,8	55,5	84,44	65,78	84,37

Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktifitas perdagangan

IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
Ekspor bersih perdagangan	US$	1.734,23	192,69%	2.288,10	254,23%	2.758,55	275,86%	50,9571	463,25%	5.000,00	237,53%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 8
Terwujudnya Industri Yang tangguh, Profesional dan Mandiri

IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
Pertumbuhan industri	7,20%	100%	8,21%	110,95%	19,42%	255,53%	11,08%	142,05%	8,00%	138,50%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Meningkatnya Nilai dan Realisasi Investasi

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Nilai realisasi investasi											
	- PMDN	Rp	1.929.657.000.000	175,42%	12.689.562.560.000	1046%	4.438.790.800.000	333%	5.261.315.800.000,00	1052%	6.250.000.000.000	84,18%
	- PMA	Rp.	16.335.000.000.000	110%	9.010.437.440.000	55,16%	27.075.580.350.000	151%	25.617.411.570.000,00	1066%	16.940.000.000.000	151,22%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
Meningkatnya Kesejahteraan Gender Dalam Pembangunan Ekonomi

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender	Persen	91,66	100	92,08	100	92,2	100	92,43	100	93	99,38
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	70,38	100	73,95	100	74,5	100	75,5	100	76,00-77,00	98,05

Evaluasi Pencapaian Sasaran 11
Meningkatnya Jumlah Wisatawan

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	Orang	63.207	341%	25.741	135%	24.660	126%	11.921,00	59,60%	21.500	55,44%
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	3.200.614	100,02%	3.432.178	99%	3.090.171	86%	18.129,95	48%	4.000.000	45,32%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
Terciptanya Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,81	88,3	3,43	99,71	3,15	93,8			3,42	92,1
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,14	90,12%	69,52	92,39%	67,59	92,52	69,44	90,47	70,01	99,18

Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
Terbukanya Keterisolasian Daerah-daerah Terpencil

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2019 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Kabupaten/Kota tidak tertinggal	persen	30,8	79,8	30,8	79,8	76,92	142,84	69,23	111,11

Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lahan Ditingkat Tapak

IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
Kontribusi PDRB sub sektor kehutanan	%	3	100	856,82	95,14	1541,04	171,21	607,05	67,45	9	67,45

Evaluasi Pencapaian Sasaran 15
Optimalnya Tata Kelola Hutan

IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
Kerusakan kawasan hutan	persen	0,01	5,55	0,01	5,9	0,01	6,25	0,06	40	0,14	42,85

Evaluasi Pencapaian Sasaran 16
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	69,39	102,04%	69,5	100,72%	83	118,57%	80,23	113,80%	71	113,00%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 17
Meningkatnya Kesejahteraan Petani.

IKU	Satuan	2017		2018		2019		2019		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
Nilai tukar petani	%	96,01	97,48%	108,68	107,30%	99,41	94,92%	88,87%	84,72%	99,5-100,5	88,42%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 18
Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Holtikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan.

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	28,98	94,27%	26,14	94,03%	24,33	85,67%	26,24%	93,31%	28,92	90,73%
2	Jumlah PDRB sub sektor perkebunan	Rp	11.551.515	96,33%	12.009.909	97,23	12.480.042	98,1	12.480.042,00	95,24%	13.497.176	92,46%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 19
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan dan Perikanan Budidaya

IKU	Satuan	2017		2018		2019		2019		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
Nilai ekspor hasil perikanan	US$	3.227.836	68,31%	4.961.250	100,2%	3.763.124,02	117,60%	3.763.124,02	106,90%	3.784.000	99,45

Evaluasi Pencapaian Sasaran 20
Tuntasnya Angka Melek Aksara

IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
Persentase Angka Melek Aksara	%	96,1	98,11%	96,50	98,65%	96,53	97,75%	97%	97,13%	99,25-100	96,5

Evaluasi Pencapaian Sasaran 21
Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Untuk Menuntaskan Pendidikan Dasar Dan Pengembangan Pendidikan Menengah

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
APK												
1	SD/MI/Paket A	%	104	97,70%	103	98,10%	104,3	99,48%	104,00%	100,00%	102,75-103,75%	100,24%
2	SMP/MTs/Paket B	%	91,5	99,60%	92	99,66%	92,3	99,66%	92,50%	99,19%	93,00-93,75%	98,66%
3	SMA/MA/SMK/Paket C	%	83,5	99,60%	83,75	99,41%	84,75	99,88%	85,25%	100,00%	85,00-85,75%	99,41%
APM												
1	SD/MI/Paket A	%	92,5	99,70%	103	93,00%	94	99,47%	94,00%	99,20%	94,5-96,25	97,66%
2	SMP/MTs/Paket B	%	72	99,40%	73	99,32%	74	99,66%	74,00%	98,99%	74,50-75,25	98,34%
3	SMA/MA/SMK/Paket C	%	64,5	99,36%	64,75	98,85%	65,75	99,62%	66,00%	99,24%	66,00-70,00	93,93%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 22
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
Usia Harapan Hidup	Tahun	67,35	101%	67,32	99,96%	67,78	99,50%	67,78	99,67%	68	99,68

Evaluasi Pencapaian Sasaran 23
Suksesnya Keluarga Berencana dan Terciptanya Keluarga Berkualitas.

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Cakupan peserta KB aktif	persen	78	90,2	77	88,74	78	89,85	78,1	89,96	87,01	89,75
2	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	persen	68,4	50,4	68,13	45,41	65,77	60,77	65,48	54,65	35	12,91

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PPKD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan PPKD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah diklasifikasikan pada bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020. Capaian ringkasan realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD 2020
Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
PENDAPATAN	**4.106.116.585.244,95**	**4.193.329.057.130,07**	**87.212.471.885,12**	**102,12**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.054.606.448.582,08	1.122.670.398.589,07	68.063.950.006,99	106,45
DANA PERIMBANGAN	3.006.594.138.193,87	3.030.626.794.224,00	24.032.656.030,13	100,80
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	44.915.998.469,00	40.031.864.317,00	(4.884.134.152,00)	89,13
BELANJA	**4.536.056.241.044,55**	**4.281.057.917.890,90**	**(254.998.323.153,65)**	**94,38**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.737.675.267.394,51	2.567.426.158.275,00	(170.249.109.119,51)	93,78
BELANJA LANGSUNG	1.798.380.973.650,04	1.713.631.759.615,90	(84.749.214.034,14)	95,29
SURPLUS / DEFISIT	**(429.939.655.799,60)**	**(87.728.860.760,83)**	**342.210.795.038,77**	**20,40**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	429.939.655.799,60	429.929.141.925,60	(10.513.874,00)	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	429.939.655.799,60	429.929.141.925,60	(10.513.874,00)	100,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**-**	**342.200.281.164,77**	**342.200.281.164,77**	**-**

Berdasarkan Kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja berdasarkan urusan, maka dapat disajikan realisasi pendapatan dan belanja APBD tahun 2020 per urusan sebagai berikut :

3.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan yang diperoleh di tahun anggaran 2020 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan pencapaiannya sebesar Rp4.193.329.057.130,07 atau 102,12%, dari total anggaran pendapatan sebesar Rp4.106.116.585.244,95.

Dari total realisasi sebesar Rp4.193.329.057.130,07 diperoleh dari SKPD yang disajikan per urusan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Urusan
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENDAPATAN	**4.106.116.585.244,95**	**4.193.329.057.130,07**	**87.212.471.885,12**	**102,12**
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**144.950.153.570,40**	**149.897.113.288,78**	**4.946.959.718,38**	**103,41**
Pendidikan	8.011.688,00	267.435.250,00	259.423.562,00	3.338,06
Kesehatan	143.521.141.882,40	147.624.154.896,78	4.103.013.014,38	102,86
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.326.000.000,00	1.920.361.000,00	594.361.000,00	144,82
Sosial	95.000.000,00	85.162.142,00	(9.837.858,00)	89,64
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	**744.882.140,40**	**914.895.171,58**	**170.013.031,18**	**122,82**
Tenaga Kerja	375.000.000,00	625.727.678,00	250.727.678,00	166,86
Pangan	8.000.000,00	6.878.800,00	(1.121.200,00)	85,99
Perhubungan	151.861.650,00	219.659.979,00	67.798.329,00	144,64
Komunikasi dan Informatika	6.419.206,40	2.293.200,00	(4.126.006,40)	35,72
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	166.000.000,00	25.177.230,58	(140.822.769,42)	15,17
Penanaman Modal	27.601.284,00	27.601.284,00	0,00	100,00
Perpustakaan	10.000.000,00	7.557.000,00	(2.443.000,00)	75,57
Urusan Pilihan	**11.464.950.820,00**	**11.873.491.440,00**	**408.540.620,00**	**103,56**
Kelautan dan Perikanan	8.563.560.000,00	9.262.575.300,00	699.015.300,00	108,16
Pariwisata	75.000.000,00	13.400.000,00	(61.600.000,00)	17,87
Pertanian	1.523.340.820,00	2.043.879.640,00	520.538.820,00	134,17
Kehutanan	1.090.300.000,00	378.819.850,00	(711.480.150,00)	34,74
Perindustrian	212.750.000,00	174.816.650,00	(37.933.350,00)	82,17
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	**3.948.956.598.714,15**	**4.030.643.557.229,71**	**81.686.958.515,56**	**102,07**
Administrasi Pemerintahan	96.489.569,00	79.626.600,00	(16.862.969,00)	82,52
Perencanaan	5.163.189,60	0,00	(5.163.189,60)	-
Keuangan	3.943.439.036.265,95	4.029.263.164.129,71	85.824.127.863,76	102,18
Kepegawaian	5.163.189,60	0,00	(5.163.189,60)	-
Pendidikan dan Pelatihan	5.410.746.500,00	1.300.766.500,00	(4.109.980.000,00)	24,04

Tabel 3.2 menunjukan bahwa capaian realisasi pendapatan tahun 2020 mencapai 102,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.106.116.585.244,95. Realisasi pendapatan terbesar pada bidang keuangan sebesar Rp4.029.263.164.129,71 dan realisasi pendapatan terendah pada bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp2.293.200,00. Terdapat pula target pendapatan yang tidak terealisasi pada bidang perencanaan dengan besaran target sebesar Rp5.163.189,60 dan pada bidang kepegawaian dengan besaran target sebesar Rp5.163.189,60

3.1.2 Belanja

Realiasi belanja daerah tahun anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp4.281.057.917.890,90 atau sebesar 94,38% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp4.536.056.241.044,55. Dari total realisasi sebesar Rp4.281.057.917.890,90 terbelanjakan pada urusan dan bidang sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
BELANJA	**4.536.056.241.044,55**	**4.281.057.917.890,90**	**(254.998.323.153,65)**	**94,38**
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**1.974.415.756.907,96**	**1.865.072.003.145,32**	**(109.343.753.762,64)**	**94,46**
Pendidikan	1.052.192.059.575,13	975.574.391.338,86	(76.617.668.236,27)	92,72
Kesehatan	507.806.037.063,06	483.391.274.961,90	(24.414.762.101,16)	95,19
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	338.941.030.372,08	334.694.476.612,00	(4.246.553.760,08)	98,75
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	37.585.708.600,79	35.629.006.718,06	(1.956.701.882,73)	94,79
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	13.958.418.777,25	13.187.590.099,00	(770.828.678,25)	94,48
Sosial	23.932.502.519,65	22.595.263.415,50	(1.337.239.104,15)	94,41
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	**300.255.528.162,03**	**289.478.691.082,00**	**(10.776.837.080,03)**	**96,41**
Tenaga Kerja	34.480.512.376,85	33.122.611.763,00	(1.357.900.613,85)	96,06
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.966.887.144,37	14.433.450.547,00	(533.436.597,37)	96,44
Pangan	61.513.922.616,35	59.740.333.415,00	(1.773.589.201,35)	97,12
Lingkungan Hidup	11.414.950.258,29	10.851.114.787,00	(563.835.471,29)	95,06
Administrasi Kependudukan dan Capil	9.505.933.942,32	9.136.759.568,00	(369.174.374,32)	96,12
Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.523.634.168,15	15.304.326.215,00	(1.219.307.953,15)	92,62
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.087.044.786,97	6.677.073.871,00	(409.970.915,97)	94,22
Perhubungan	15.498.520.213,43	14.755.497.313,00	(743.022.900,43)	95,21
Komunikasi dan Informatika	14.874.049.151,56	14.496.949.123,00	(377.100.028,56)	97,46
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.677.385.522,30	15.271.680.024,00	(1.405.705.498,30)	91,57
Penanaman Modal	15.731.013.720,40	15.182.854.712,00	(548.159.008,40)	96,52
Kepemudaan dan Olah Raga	61.825.986.129,74	61.147.217.664,00	(678.768.465,74)	98,90
Kebudayaan	2.316.013.879,00	2.131.003.600,00	(185.010.279,00)	92,01
Perpustakaan	16.411.785.658,30	15.818.626.536,00	(593.159.122,30)	96,39
Kearsipan	1.427.888.594,00	1.409.191.944,00	(18.696.650,00)	98,69
Urusan Pilihan	**315.426.072.461,04**	**300.104.948.585,64**	**(15.321.123.875,40)**	**95,14**
Kelautan dan Perikanan	44.243.941.920,46	40.067.660.699,00	(4.176.281.221,46)	90,56
Pariwisata	16.519.531.297,85	15.690.132.545,16	(829.398.752,69)	94,98
Pertanian	147.398.875.632,24	142.559.584.709,00	(4.839.290.923,24)	96,72
Kehutanan	60.447.204.718,92	57.463.569.482,00	(2.983.635.236,92)	95,06
Energi dan Sumberdaya Mineral	17.354.608.907,91	16.190.786.047,00	(1.163.822.860,91)	93,29
Perdagangan	3.162.385.023,00	3.051.298.897,00	(111.086.126,00)	96,49
Perindustrian	26.299.524.960,66	25.081.916.206,48	(1.217.608.754,18)	95,37
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	**1.945.958.883.513,52**	**1.826.402.275.077,94**	**(119.556.608.435,58)**	**93,86**
Administrasi Pemerintahan	269.543.351.981,78	244.146.539.551,49	(25.396.812.430,29)	90,58
Pengawasan	17.272.523.831,55	16.534.651.216,00	(737.872.615,55)	95,73
Perencanaan	30.491.469.413,82	27.952.193.562,00	(2.539.275.851,82)	91,67
Keuangan	1.587.015.840.447,71	1.498.763.006.131,45	(88.252.834.316,26)	94,44
Kepegawaian	15.046.840.737,71	14.078.705.118,00	(968.135.619,71)	93,57
Pendidikan dan Pelatihan	16.010.808.377,85	14.836.608.793,00	(1.174.199.584,85)	92,67
Penelitian dan Pengembangan	10.578.048.723,10	10.090.570.706,00	(487.478.017,10)	95,39

Realisasi Belanja secara keseluruhan mencapai 94,38%, dimana pencapaian yang paling rendah terdapat pada urusan pilihan pada bidang kelautan dan perikanan sebesar 90,56%. Pencapaian realisasi tertinggi pada urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan capaian sebesar 98,90%. Secara umum capaian rata-rata per-masing-masing fungsi urusan wajib pelayanan dasar sebesar 95,06%, urusan wajib bukan pelayanan dasar 95,62%, urusan pilihan 94,64% dan urusan pemerintahan fungsi penunjang 93,44%.

3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

Target penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2020 sejumlah Rp429.939.655.799,60 terealisasi sejumlah Rp429.929.141.925,60 atau 100,00%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2020 tidak dianggarkan sehingga pembiyaan netto tahun 2020 sebesar Rp Rp429.929.141.925,60.

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Pembiyaan
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	429.939.655.799,60	429.929.141.925,60	(10.513.874,00)	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	**429.939.655.799,60**	**429.929.141.925,60**	**(10.513.874,00)**	**100,00**

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

3.2.1 Target Pendapatan

Dari sisi pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah secara umum dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada kendala dalam pencapaiannya walaupun pada masa-masa pandemic covid-19 karena realisasi pendapatan tersebut terealisasi

sebesar 106,46%. Setelah terkoreksi berkurangnya pendapatan secara nasional dan refocusing dalam rangka penanggulangan covid-19

3.2.2 Target Belanja

Dari sisi Belanja dimana pencapaian realisasi sebesar 94,36%. faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target belanja 100% antara lain disebabkan:

a. Dari sisi Belanja Tidak Langsung diantaranya disebabkan terdapat pegawai telah memasuki masa purnabakti/pensiun atau pindah tugas dan efisiensi belanja berkenaan.
b. Insentif Pajak Daerah tidak seluruhnya dicairkan karena beberapa target penerimaan atas pajak tersebut tidak dapat direalisasikan, serta adanya pemotongan Tambahan Penghasilan atas hak pegawai yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan pemberian tambahan penghasilan tersebut.
c. Dari sisi Belanja Langsung disebabkan antara lain: adanya penghematan pemakaian listrik, air dan telpon, selisih pagu dengan kontrak pengadaan, efisiensi penggunaan perjalanan dinas, dan kegiatan lain yang pekerjaan fisiknya mencapai 100%.
d. Situasi pandemic Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan tidak jadi dilaksanakan.
e. Adanya penghematan lain atas belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
f. Kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap situasi dan kondisi dilapangan sehingga mengakibatkan terdapat beberapa paket pekerjaan mengalami keterlambatan.
g. Terjadinya gagal lelang untuk beberapa kegiatan dikarenakan kurangnya minat dari penyedia barang dan jasa yang disebabkan oleh pagu yang rendah dan ketidakmampuan penyedia barang jasa melakukan pelelangan secara online.
h. Pengadaan melalui ULP dan LPSE berjalan kurang optimal disebabkan antara lain jumlah Kelompok Kerja di ULP kurang memadai dibandingkan dengan jumlah paket yang harus di lelangkan sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang dan ketidaklengkapan dokumen lelang.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika memenuhi peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan daerah.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Necara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ditetapkan sebagai Entitas pelaporan Keuangan Daerah yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Sulawesi Tengah yang mencakup atau merupakan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020. Disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran II, akan tetapi penyajiannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013. Dengan maksud bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Pengukuran Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

a. Pendapatan
   1. Pendapatan adalah merupakan semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
   2. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
   3. Akuntasi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
   4. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja
   1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
   2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

c. Transfer
   1. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
   2. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
   3. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
   4. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
   5. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

d. Surplus atau Defisit
   1. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
   2. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
   3. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

e. Pembiayaan

1. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
3. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
4. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
5. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
6. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
7. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
8. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

1. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
2. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.2 Kebijakan Pengukuran Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Labih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

4.3.3 Kebijakan Pengukuran Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

   a. Kas di Kas Daerah

      1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
      2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
      3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Fihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, iuran bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
      4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

   b. Kas di Bendahara Penerimaan

      1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas

tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2020.
3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan dalam ekuitas sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2020.

d. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

e. Kas lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

f. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua

belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

g. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebagai aset lancar sebesar nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKP2PS; dan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai

aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

   1. Kualitas lancar;
      Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
   2. Kualitas kurang lancar;
      Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
   3. Kualitas diragukan;
      Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
   4. Kualitas macet.
      Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

   1. Kualitas lancar;
      Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar;

   Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

   Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet.

   Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar;

   Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar;

   Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

   Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet.

   Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.

b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan

d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

h. Beban di bayar dimuka

1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.
4. Perhitungan jatuh tempo beban dibayar dimuka dihitung berdasarkan :
   a. Jika jatuh tempo terhitung mulai tanggal 1 s.d 15 bulan berjalan maka perhitungan beban dibayar dimuka di mulai dibulan berkenaan.
   b. Jika jatuh tempo terhitung diatas tanggal 15 bulan berjalan maka perhitungan beban dibayar dimuka di mulai dibulan berikutnya.

i. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.
3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
   a. Investasi Permanen
      1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.
      2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
   b. Investasi Non Permanen
      1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan

investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.

2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya

perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aaset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**			**ASET TETAP**	
1	**3**	**2**		**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	**3**	**3**		**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	40
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50
1	3	3	6	Candi	50
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	**3**	**4**		**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

d. Dana Cadangan

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan di nilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Aset Lainnya

1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat di kapitalisasi.
2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan,

direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).

4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.

3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

   a. Kewajiban Jangka Pendek

      1. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
      2. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Pendapatan diterima di muka dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
      3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
      4. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
      5. Perhitungan jatuh tempo pendapatan diterima di muka dihitung berdasarkan :
         a) Jika jatuh tempo terhitung mulai tanggal 1 s.d 15 bulan berjalan maka perhitungan pendapatan diterima di muka di mulai dibulan berkenaan.
         b) Jika jatuh tempo terhitung diatas tanggal 15 bulan berjalan maka perhitungan pendapatan diterima di muka di mulai dibulan berikutnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

   Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SiLPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

   Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.4 Kebijakan Pengukuran Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi (tahun 2020), dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (Per 31 Desember 2020), yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan

berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Kebijakan akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

1. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.
2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktifitas operasi.
3. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukkannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

4.3.5 Kebijakan Pengukuran Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

a. Pendapatan-LO
    1. Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
    2. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut

diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

3. Pendapatan–LO dapat diakui:
   a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
   b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
4. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

b. Beban-LO

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
   a. Beban Operasi
   b. Beban Transfer
   c. Beban Non Operasional
   d. Beban Luar Biasa
2. Beban dapat diakui pada saat :
   a. Timbulnya kewajiban;
   b. Terjadinya konsumsi aset; dan
   c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Beban diukur sesuai dengan:
   a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
   b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.6 Kebijakan Pengukuran Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding.

Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target–target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai dengan peraturan Perundang–Undangan, maka berikut ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penjelasan secara teknis tentang Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Anggaran dan realisasi APBD TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rekapitulasi Realisasi APBD TA 2020 dan 2019

Uraian	2020			Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan	4.106.116.585.244,95	4.193.329.057.130,07	102,12	4.128.153.120.869,78
Belanja dan Transfer	4.536.056.241.044,55	4.281.057.917.890,90	94,378	4.098.771.219.451,17
Surplus / (Defisit)	(429.939.655.799,60)	(87.728.860.760,83)	20,405	29.381.901.418,61
Pembiayaan Netto	429.939.655.799,60	429.929.141.925,60	99,998	400.556.405.001,99
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	342.200.281.164,77	0	429.938.306.420,60

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2020 menargetkan pendapatan sebesar Rp4.106.116.585.244,95, dengan realisasi sebesar Rp4.193.329.057.130,07 atau mencapai 102,12% dari target. Realisasi pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.122.670.398.589,07, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.055.555.418.224,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp15.103.240.317,00.

Pengeluaran daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja dan Transfer. Anggaran belanja daerah sebesar Rp4.049.510.086.061,55, dengan realisasi sebesar Rp3.810.416.446.556,90 atau 94,10%, sedangkan anggaran transfer sebesar Rp486.546.154.983,00 dengan realisasi sebesar Rp470.641.471.334,00 atau 96,73%.

Belanja daerah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp150.082.359.629,73 atau 4.10% dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2019 Rp3.660.334.086.927,17. Pengeluaran transfer TA 2020 juga mengalami kenaikan sebesar Rp32.204.338.810,00 atau 7,35% dibandingkan dengan realisasi transfer daerah TA 2019 sebesar Rp438.437.132.524,00.

Realisasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3.142.577.173.852,95, belanja modal sebesar Rp665.439.891.390,95, belanja tak terduga sebesar Rp2.399.381.313. Realisasi transfer terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp427.382.228.304,00 dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp43.259.243.030,00.

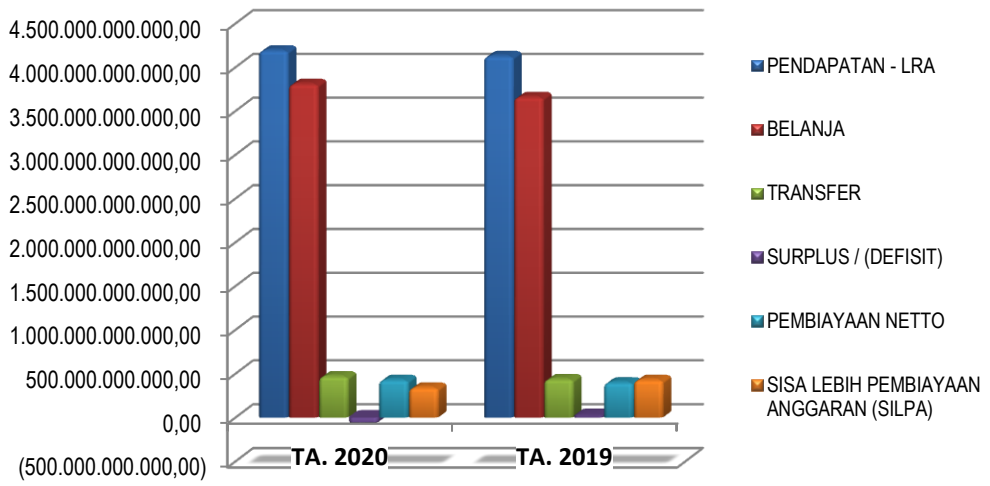

Gambar 5.1 Perbandingan Realisasi APBD 2020 dan 2019

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4.193.329.057.130,07, realisasi belanja daerah sebesar Rp3.810.416.446.556,90 dan transfer daerah sebesar Rp470.641.471.334,00 maka terjadi defisit realisasi pada TA 2020 sebesar Rp(87.728.860.760,83), disisi pembiayaan menunjukkan adanya Pembiayaan Netto pada TA 2019 sebesar Rp429.929.141.925,60. Dengan demikian dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2020 menunjukkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp342.200.281.164,77.

5.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode TA 2020 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Ringkasan Realiasi Pendapatan Belanja Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020			Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Asli Daerah - LRA	1.054.606.448.582,08	1.122.670.398.589,07	106,45	1.090.854.785.057,78
Pendapatan Transfer - LRA	3.031.522.762.193,87	3.055.555.418.224,00	100,79	3.014.996.800.097,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA	19.987.374.469,00	15.103.240.317,00	75,56	22.301.535.715,00
Jumlah	**4.106.116.585.244,95**	**4.193.329.057.130,07**	**102,12**	**4.128.153.120.869,78**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa target total pendapatan daerah yang terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah sebesar Rp4.106.116.585.244,95 sampai dengan akhir periode tahun anggaran 2020 dapat terealisasi sejumlah Rp4.193.329.057.130,07 atau 102,12%. Jika capaian realisasi pendapatan tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan capaian realisasi pendapatan tahun 2019 dengan realisasi mencapai Rp4.128.153.120.869,78 maka terjadi peningkatan sebesar Rp65.175.936.260,29 atau terjadi peningkatan 1,58%.

Berikut ini dapat dilihat kontribusi realisasi jenis pendapatan terhadap total pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020.

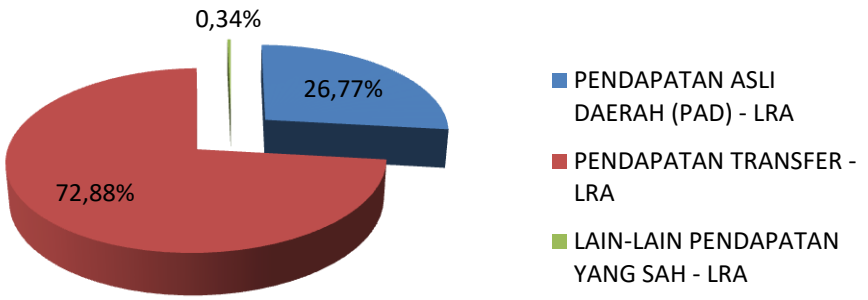

Gambar 5.2
Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Realisasi Pendapatan Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas, tahun 2020 kontribusi terbesar atas pendapatan adalah Pendapatan Transfer sebesar 72,88% dari total pendapatan. Sedangkan kontribusi terendah atas pendapatan adalah Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,34%. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 26,77% terhadap total pendapatan. Untuk jelasnya rincian target dan realisasi perjenis pendapatan pada masing-masing kelompok pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Uraian	2020			Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	850.700.000.000,00	914.780.331.698,60	107,53	896.321.261.948,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	13.167.996.775,00	14.690.106.655,58	111,56	12.670.320.760,42
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	22.380.692.073,00	21.914.954.430,00	97,92	18.375.395.982,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	168.357.759.734,08	171.285.005.804,89	101,74	163.487.806.367,36
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	3.006.594.138.193,87	3.030.626.794.224,00	100,80	2.994.301.818.097,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	24.928.624.000,00	24.928.624.000,00	100,00	20.694.982.000,00
Pendapatan Hibah - LRA	19.306.293.943,00	14.422.159.791,00	74,70	13.713.424.715,00
Pendapatan Lainnya - LRA	681.080.526,00	681.080.526,00	100,00	8.588.111.000,00
Jumlah	**4.106.116.585.244,95**	**4.193.329.057.130,07**	**102,12**	**4.128.153.120.869,78**

Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar realisasi jenis pendapatan pada kelompok pendapatan asli daerah melampaui target, kecuali pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 97,92%. Pada kelompok Pendapatan Transfer keseluruhan melampaui target, sedangkan pada kelompok Pendapatan Lain-lain Yang Sah, pendapatan hibah tidak mencapai target hanya terealisasi sebesar 74,70%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

2020	2019
Rp1.122.670.398.589,07	Rp1.090.854.785.057,78

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar. Dalam periode tahun anggaran 2020 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kewenangannya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020			Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	850.700.000.000,00	914.780.331.698,60	107,53	896.321.261.948,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	13.167.996.775,00	14.690.106.655,58	111,56	12.670.320.760,42
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	22.380.692.073,00	21.914.954.430,00	97,92	18.375.395.982,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	168.357.759.734,08	171.285.005.804,89	101,74	163.487.806.367,36
Jumlah	**1.054.606.448.582,08**	**1.122.670.398.589,07**	**106,45**	**1.090.854.785.057,78**

1) Pajak Daerah – LRA

Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dianggarkan sebesar Rp850.700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp914.780.331.698,60 atau mencapai 107,53%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, Pajak Daerah meningkat sebesar Rp18.459.069.750,60 atau sebesar 2,06% dari nilai realisasi tahun 2019 sebesar Rp896.321.261.948,00. Rincian realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5
Realisasi Rincian Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	227.000.000.000,00	245.771.629.745,00	108,27	244.884.823.890,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	220.000.000.000,00	225.916.116.700,00	102,69	280.461.607.145,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	212.500.000.000,00	216.310.270.970,00	101,79	225.656.836.080,00
Pajak Air Permukaan - LRA	11.200.000.000,00	11.457.926.930,60	102,30	10.701.824.334,00
Pajak Rokok - LRA	180.000.000.000,00	215.324.387.353,00	119,62	134.616.170.499,00
JUMLAH	**850.700.000.000,00**	**914.780.331.698,60**	**107,53**	**896.321.261.948,00**

Berdasarkan tabel 5.5 diketahui bahwa dari 5 (lima) jenis pajak daerah keseluruhannya mencapai bahkan melebihi dari anggaran pendapatan yang ditetapkan. Rincian objek dari masing-masing jenis pajak sebagai berikut :

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi sebesar Rp245.771.629.745,00 atau 108,27% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD 2020 sebesar Rp227.000.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp244.884.823.890,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp886.805.855,00,00 atau sebesar 0,36%. Pemungutan PKB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai berikut:

Tabel 5.6
Realisasi Rincian Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA	1.961.850.000,00	5.350.294.300,00	272,72	4.494.087.900,00
PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA	10.150.800.000,00	12.281.778.150,00	120,99	11.438.407.500,00
PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	90.191.280.000,00	108.860.494.925,00	120,7	105.012.390.375,00
PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	425.500.000,00	496.536.800,00	116,69	488.046.100,00
PKB - Mobil Bus - Bus - LRA	44.000.000,00	27.904.800,00	63,42	55.212.300,00
PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	26.095.500.000,00	28.733.468.400,00	110,11	28.441.924.650,00
PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	21.652.800.000,00	23.190.784.625,00	107,1	22.804.551.200,00
PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	4.017.600.000,00	4.537.283.800,00	112,94	3.795.145.100,00
PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA	72.185.477.250,00	61.855.644.200,00	85,69	67.708.283.800,00
PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA	90.180.000,00	70.489.700,00	78,166	78.555.300,00
PKB - Kendaraan Alat Berat/Besar - LRA	185.012.750,00	364.899.245,00	197,23	568.219.665,00
PKB - Kendaraan Khusus - LRA	-	2.050.800,00		-
Jumlah	**227.000.000.000,00**	**245.771.629.745,00**	**108,27**	**244.884.823.890,00**

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan realisasi sebesar Rp225.916.116.700,00 atau 102,69% dari target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar Rp220.000.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp280.461.607.145,00 maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp54.545.490.445,00 atau sebesar 19,45%. Pemungutan BBN-KB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai berikut:

Tabel 5.7
Realisasi Rincian Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBN-KB) Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA	372.000.000,00	11.193.047.600,00	3.008,88	18.940.268.000,00
BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA	6.875.000.000,00	7.923.470.000,00	115,25	9.796.110.000,00
BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LRA	80.400.000.000,00	77.845.711.200,00	96,82	98.752.977.500,00
BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LRA	1.884.000.000,00	986.068.500,00	52,34	879.806.500,00
BBNKB -Mobil Bus - Bus - LRA	-	381.000,00	-	21.823.500,00
BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	23.478.000.000,00	25.909.458.500,00	110,36	28.328.500.000,00
BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	12.624.000.000,00	9.248.046.200,00	73,26	15.146.185.000,00
BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	4.320.000.000,00	7.178.546.000,00	166,17	4.317.766.500,00
BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA	89.242.000.000,00	85.179.628.600,00	95,45	103.783.760.000,00
BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA	805.000.000,00	429.964.100,00	53,41	479.395.500,00
BBNKB - Kendaraan Alat Berat/Besar - LRA	-	21.795.000,00	-	15.014.645,00
Jumlah	**220.000.000.000,00**	**225.916.116.700,00**	**102,69**	**280.461.607.145,00**

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan realisasi sebesar Rp216.310.270.970,00 atau 101,79% dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp212.500.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp225.656.836.080,00 maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp9.346.565.110,00 atau sebesar 4,14%. Pemungutan PBB-KB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai berikut:

Tabel 5.8
Rincian Jenis Pajak Bahan Bakar – Kendaraan Bermotor Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Bahan Bakar Premium - LRA	62.234.605.960,00	43.594.606.319,00	70,05	59.906.142.118,00
Pajak Bahan Bakar Pertamx - LRA	5.419.063.280,00	5.202.465.091,00	96,00	3.838.194.626,00
Pajak Bahan Bakar Solar - LRA	55.817.041.256,00	55.042.256.504,00	98,61	63.970.166.485,00
Pajak Bahan Bakar Pertalite - LRA	85.095.558.252,00	106.204.611.903,00	124,81	93.235.477.422,00
Pajak Bahan Bakar Dexalite - LRA	3.933.731.252,00	6.266.331.153,00	159,30	4.706.855.429,00
Jumlah	**212.500.000.000,00**	**216.310.270.970,00**	**101,79**	**225.656.836.080,00**

d. Pajak Air Permukaan (PAP) terealisasi sebesar Rp11.457.926.930,60 atau 102,30% dari target APBD 2020 sebesar Rp11.200.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp10.701.824.334,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp756.102.596,60 atau 7,07%.

e. Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp215.324.387.353,00 atau 119,62% dari target APBD 2020 sebesar Rp180.000.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp134.616.170.499,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp80.708.216.854,00 atau 59,95%.

2) Retribusi Daerah – LRA

Retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp13.167.996.775,00 dengan realisasi sebesar Rp14.690.106.655,58 atau lebih sejumlah Rp1.522.109.880,58 atau 111,56% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, retribusi daerah meningkat sebesar Rp2.019.785.895,16 atau sebesar 15.94% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp12.670.320.760,42. Berikut rincian retribusi daerah:

Tabel 5.9
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	708.967.805,00	456.312.200,00	64,36	1.638.850.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	7.500.000,00	4.400.000,00	58,67	26.250.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	2.629.292.320,00	3.367.229.420,58	128,07	4.090.359.878,42
Retribusi Terminal - LRA	45.000.000,00	39.971.000,00	88,82	32.611.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	2.298.166.650,00	2.811.600.450,00	122,34	2.966.031.850,00
Retribusi Penyebrangan Air - LRA	78.000.000,00	109.503.979,00	140,39	145.346.232,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	1.671.325.000,00	1.345.823.400,00	80,52	3.207.822.200,00
Retribusi Izin Trayek - LRA	5.695.000,00	15.215.000,00	267,16	11.292.600,00
Retribusi Izin Perikanan - LRA	5.464.050.000,00	6.064.489.850,00	110,99	390.215.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	250.000.000,00	468.004.356,00	187,20	146.537.000,00
Retribusi Pelayanan Perpustakaan - LRA	10.000.000,00	7.557.000,00	75,57	15.005.000,00
Jumlah	**13.167.996.775,00**	**14.690.106.655,58**	**111,56**	**12.670.320.760,42**

Tabel 5.9 menjelaskan bahwa capaian retribusi daerah TA 2020 melebihi dari target yang di tetapkan. Tercapainya realisasi retribusi daerah yang melebihi dari target di pengaruhi oleh :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA

Retribsi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA terealisasi sebesar Rp3.367.229.420,58 atau sebesar 128,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.629.292.320,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi

Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah tahun 2020 menurun sebesar Rp723.130.457,84 atau 17,68%.

b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LRA terealisasi sebesar Rp2.811.600.450,00 atau sebesar 122,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.298.166.650,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tahun 2020 menurun sebesar Rp154.431.400,00 atau 5,21%.

c. Retribusi Penyebrangan Air – LRA

Retribusi Penyebrangan Air – LRA terealisasi sebesar Rp109.503.979,00 atau sebesar 140,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Retribusi Penyebrangan Air tahun 2020 menurun sebesar Rp35.842.253,00 atau 24,66%.

d. Retribusi Izin Trayek – LRA

Retribusi Izin Trayek – LRA terealisasi sebesar Rp15.215.000,00 atau sebesar 267,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.695.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Retribusi Izin Trayek tahun 2020 meningkat sebesar Rp3.922.400,00 atau 34,73%.

e. Retribusi Izin Perikanan – LRA

Retribusi Izin Perikanan – LRA terealisasi sebesar Rp6.064.489.850,00 atau sebesar 110,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.464.050.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Retribusi Izin Perikanan tahun 2020 meningkat sebesar Rp5.674.274.850,00 atau 1.454,14%.

f. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LRA

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LRA terealisasi sebesar Rp468.004.356,00 atau sebesar 187,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) - LRA tahun 2020 meningkat sebesar Rp321.467.356,00 atau 219,38%.

Namun demikian masih terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang capaiannya tidak mencapai target yang dianggarkan :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA

Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA terealisasi sebesar Rp456.312.200,00 atau sebesar 64,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp708.967.805,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2020 menurun sebesar Rp1.182.537.800,00 atau 72,16%.

b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LRA

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LRA terealisasi sebesar Rp4.400.000,00 atau sebesar 58,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tahun 2020 menurun sebesar Rp21.850.000,00 atau 83,24%.

c. Retribusi Terminal – LRA

Retribusi Terminal – LRA terealisasi sebesar Rp39.971.000,00 atau sebesar 88,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Retribusi Terminal tahun 2020 meningkat sebesar Rp7.360.000,00 atau 22,57%.

d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA terealisasi sebesar Rp1.345.823.400,00 atau sebesar 80,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.671.325.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha tahun 2020 menurun sebesar Rp1.861.998.800,00 atau 58,05%.

e. Retribusi Pelayanan Perpustakaan – LRA

Retribusi Pelayanan Perpustakaan – LRA terealisasi sebesar Rp7.557.000,00 atau sebesar 75,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Retribusi Pelayanan Perpustakaan tahun 2020 menurun sebesar Rp7.448.000,00 atau 49,64%.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp21.914.954.430,00 atau sebesar 97,92% dari target yang di tetapkan sebesar Rp22.380.692.073,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp3.539.558.448,00 atau sebesar 19,26%.

Tabel 5.10
Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	21.775.347.318,00	21.725.347.318,00	99,77	17.900.528.077,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	605.344.755,00	189.607.112,00	31,32	474.867.905,00
JUMLAH	**22.380.692.073,00**	**21.914.954.430,00**	**97,92**	**18.375.395.982,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah. Pencapaian target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam tahun 2020 tercapai 97,92% dari anggaran yang ditetapkan yang merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Milik Swasta.

Perolehan dividen tahun 2020 dari PT Bank Sulteng sebesar Rp21.725.347.318,00. Sedangkan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta, perolehan dividen atas PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2020 sebesar Rp189.607.112,00.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan daerah yang tidak dapat diklasifikasikan baik dalam kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan Rp168.357.759.734,08 dengan realisasi sebesar Rp171.285.005.804,89 atau 101,74%. Jika dibanding dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 163.487.806.367,36, realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2020 meningkat sebesar Rp7.797.199.437,53 atau 4,77% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020			Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA	1.070.921.498,00	986.247.398,00	92,09	63.130.000,00
Penerimaan Jasa Giro - LRA	11.706.633.857,00	13.832.780.653,81	118,16	17.219.360.818,85
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	50.000.000,00	11.154.000,00	22,31	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	112.714.632,00	176.742.257,00	156,81	886.264.001,14
Pendapatan Denda Pajak - LRA	5.225.962.867,00	5.162.779.487,00	98,79	15.705.947.996,00
Pendapatan dari Pengembalian	651.485.107,08	714.451.181,08	109,67	2.348.762.854,89
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA	-	87.441.950,00	-	-
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	-	826.176.084,00	-	
Pendapatan BLUD - LRA	142.669.454.871,00	147.024.372.696,78	103,05	106.616.443.530,39
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	1.729.856.902,00	1.432.110.097,22	82,79	4.996.033.713,09
Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA	5.140.730.000,00	1.030.750.000,00	20,05	4.897.355.000,00
Penerimaan Klaim Asuransi - LRA	-	-	-	10.754.508.453,00
JUMLAH	**168.357.759.734,08**	**171.285.005.804,89**	**101,74**	**163.487.806.367,36**

Tabel 5.11 menjelaskan bahwa capaian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2020 melebihi dari target yang di tetapkan. Berikut ini adalah penjelasan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

a) Realisasi Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp986.247.398,00. dari target Rp1.070.921.498,00 atau 92,09% merupakan penjualan kendaraan dinas roda empat pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp63.130.000,00 realisasi Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan tahun 2020 meningkat sebesar Rp923.117.398,00 atau 1.462,25%

b) Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp13.832.780.653,81 dari target Rp11.706.633.857,00 atau 118,16% realisasi tersebut terdiri atas:

- Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2020 sebesar Rp13.502.673.259,81.
- Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara Pengeluaran SKPD selama tahun 2020 sebesar Rp155.229.382,00.
- Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara BOS SMA/SMK/SLB selama tahun 2020 sebesar Rp174.878.012,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp17.219.360.818,85, realisasi Penerimaan Jasa Giro tahun 2020 menurun sebesar Rp3.386.580.165,04 atau 19,67%

c) Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) daerah pada tahun 2020 sebesar Rp11.154.000,00 atau 22,31% dari target Rp50.000.000,00.

d) Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan selama tahun 2020 sebesar Rp176.742.257,00 atau 156,81% dari target Rp112.714.632,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp886.264.001,14, realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2020 menurun sebesar Rp709.521.744,14 atau 80,06%.

e) Realisasi Pendapatan Denda Pajak selama tahun 2020 sebesar Rp5.162.779.487,00 dari target Rp5.225.962.867,00 atau 98,79% realisasi Pendapatan Denda Pajak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
   - Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.366.548.750,00,
   - Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp783.371.794,00.
   - Denda Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp12.858.943,00.

   Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp15.705.947.996,00, realisasi Pendapatan Denda Pajak tahun 2020 menurun sebesar Rp10.543.168.509,00 atau 67,13%

f) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian selama tahun 2020 sebesar Rp714.451.181,08 atau 109,67% dari target Rp651.485.107,708

g) Realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan selama tahun 2020 sebesar Rp87.441.950,00.

h) Realisasi Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah selama tahun 2020 sebesar Rp826.176.084,00.

i) Realisasi Pendapatan BLUD selama tahun 2020 sebesar Rp147.024.372.696,78 dari target Rp142.669.454.871,00 atau 103.05%. Dengan rincian sebagai berikut:
   - Realisasi Pendapatan RSUD Undata sebesar Rp104.427.559.106,13 dari target Rp112.669.454.871,00 atau 92,68%.
   - Realisasi Pendapatan RSUD Madani sebesar Rp42.596.813.590,65 dari target Rp30.000.000.000,00 atau 141,99%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp106.616.443.530,39, realisasi Pendapatan BLUD tahun 2020 meningkat sebesar Rp40.407.929.166,39 atau 37,90%

j) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya selama tahun 2020 sebesar Rp1.432.110.097,22 dari target Rp1.729.856.902,00 atau 82,79%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp4.996.033.713,09, realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya tahun 2020 menurun sebesar Rp3.563.923.615,87 atau 71,34%. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut :
   - Penerimaan Pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp117.582.016,00
   - Penerimaan atas kelebihan setoran pendapatan dan setoran pengembalian belanja Sebesar Rp312.884.869,22
   - Penerimaan Pemanfaatan Kehutanan dan Mitra Kehutanan Sebesar Rp259.167.850,00
   - Penerimaan setoran temuan dana BOS Sebesar Rp104.380.307,00
   - Penerimaan Hasil Pembongkaran Bangunan sebesar Rp263.896.000,00
   - Penerimaan atas Kelebihan Bayar Gaji/Tunjangan Pegawai Pensiunan melalui TASPEN Rp374.199.055,00

k) Realisasi Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat selama tahun 2020 sebesar Rp1.030.750.000,00 dari target Rp5.140.730.000,00 atau 20,05%.

	2020	2019
5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA	**Rp3.055.555.418.224,00**	**Rp3.014.996.800.097,00**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi atau disebut juga dana perimbangan dan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang merupakan dana penyesuaian.

Tabel 5.12
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020			Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	3.006.594.138.193,87	3.030.626.794.224,00	100,80	2.994.301.818.097,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	24.928.624.000,00	24.928.624.000,00	100,00	20.694.982.000,00
JUMLAH	**3.031.522.762.193,87**	**3.055.555.418.224,00**	**100,79**	**3.014.996.800.097,00**

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2020 sebesar Rp3.055.555.418.224,00 atau 100.79% dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp3.031.522.762.193,87. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp3.014.996.800.097,00 terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp40.558.618.127,00 atau 1,35%.

		2020	2019
5.1.1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA**	**Rp3.030.626.794.224,00**	**Rp2.994.301.818.097,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sampai dengan 31 Desember 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp3.030.626.794.224,00 dari target Rp3.006.594.138.193,87 atau 100,80%. tercapainya realisasi tersebut disebabkan capaian realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terealisasi sebesar 199,47% dari yang ditetapkan.

Tabel 5.13
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020			Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Bagi Hasil Pajak - LRA	96.760.482.433,46	89.136.505.394,00	92,12	51.489.956.127,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	93.640.448.178,41	186.784.605.210,00	199,47	98.123.993.969,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.492.182.666.000,00	1.488.847.818.000,00	99,78	1.637.588.970.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	1.324.010.541.582,00	1.265.857.865.620,00	95,61	1.207.098.898.001,00
JUMLAH	**3.006.594.138.193,87**	**3.030.626.794.224,00**	**100,80**	**2.994.301.818.097,00**

Untuk lebih jelasnya masing-masing pos pendapatan dana perimbangan tersebut dapat diurai sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak - LRA

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan UU-APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah.

Pencapaian target Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dalam tahun 2020 sebesar Rp89.136.505.394,00 atau mencapai 92,12% dari anggaran yang ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD sebesar Rp96.760.482.433,46. Jika dibandingkan dengan realisasi 2019 sebesar Rp51.489.956.127,00 maka realisasi tahun 2019 naik sebesar Rp37.646.549.267,00 atau 73,11%.

Realisasi dan Anggaran per objek Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat pada tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 5.14
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	31.910.655.257,00	27.069.787.057,00	84,83	22.302.977.438,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA	55.693.995.757,00	41.324.375.699,00	74,20	23.252.589.067,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA	1.895.971.109,00	806.008.709,00	42,51	2.471.105.663,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	114.573.000,00	45.829.200,00	40,00	269.158.032,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	329.704.591,00	308.925.398,00	93,70	2.235.998.945,00
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan (Upah Pungut) - LRA	84.254.427,00	35.818.227,00	42,51	109.826.969,00
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan (Upah Pungut) - LRA	4.455.000,00	1.782.000,00	40,00	10.467.587,00
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan (Upah Pungut) - LRA	1.064.658.361,00	903.088.761,00	84,82	743.432.726,00
Bagi Hasi dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	217.749.117,00	158.682.117,00	72,87	91.354.497,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Lainnya (Upah Pungut) - LRA	4.045.870,00	5.289.070,00	130,73	3.045.203,00
Kurang Bayar Bagi Hasil Non Migas Lainnya Bagian Daerah Tahun Anggaran 2019	32.758.053,21	121.326.123,00	370,37	-
Kurang Bayar Bagi Hasil Migas Lainnya Bagian Daerah Tahun Anggaran 2020	342.228.534,57	1.267.513.091,00	370,37	-
Kurang Bayar DBH PBB Sektor Perkebunan Tahun Anggaran 2019	30.638.057,49	113.474.287,00	370,37	-
Kurang Bayar DBH PBB Sektor Perhutanan Tahun Anggaran 2019	1.940.647,14	7.187.582,00	370,37	-
Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah Tahun Anggaran 2019	7.768.023,39	28.770.457,00	370,37	-
Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 TA. 2019 Yang Dialokasikan TA. 2020	5.025.086.628,66	16.938.647.616,00	337,08	-
JUMLAH	**96.760.482.433,46**	**89.136.505.394,00**	**92,12**	**51.489.956.127,00**

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA

Dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan UU-APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah.

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA mencapai 199,47% atau sebesar Rp186.784.605.210,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp93.640.448.178,41, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp98.123.993.969,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp88.660.611.241,00 atau 90,36%. Realisasi dan Anggaran per objek Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat pada tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 5.15
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA	1.101.401.000,00	585.325.150,00	53,14	1.681.688.627,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	1.080.586.811,00	708.769.461,00	65,59	859.059.635,00
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA	3.842.848.557,00	3.100.046.857,00	80,67	6.596.996.676,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA	3.703.323.795,00	2.955.151.195,00	79,80	2.283.676.384,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	20.395.956.486,00	18.663.504.536,00	91,51	26.544.169.479,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	9.340.555.393,00	4.822.290.764,00	51,63	6.581.153.150,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	14.551.728.000,00	14.388.240.200,00	98,88	53.577.250.018,00
Kurang Bayar DBH SDA Minerba (Royalti) TA. 2019	2.134.566.574,02	13.958.972.361,00	653,95	0,00
Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi 15% TA. 2018 Dialokasikan TA. 2020	4.160.081.229,00	4.160.081.229,00	100,00	0,00
Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi TA. 2019 Dialokasikan TA. 2020	3.683.165.994,99	13.641.355.537,00	370,37	0,00
Kurang Bayar Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi TA. 2019	29.646.234.338,40	109.800.867.920,00	370,37	0,00
JUMLAH	**93.640.448.178,41**	**186.784.605.210,00**	**199,47**	**98.123.993.969,00**

3. Dana Alokasi Umum – LRA

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan UU-APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah.

Tabel 5.16
Realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2020

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Dana Alokasi Umum - LRA	1.492.182.666.000,00	1.488.847.818.000,00	99,78	1.637.588.970.000,00

Pencapaian target DAU dalam tahun 2020 mencapai 99,78% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.637.588.970.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp148.741.152.000,00 atau 9,08%.

4. Dana Alokasi Khusus - LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan UU-APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah.

Tabel 5.17
Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Fisik - LRA				
DAK Bidang Pendidikan - LRA	246.385.060.000,00	217.324.922.790,00	88,21	135.853.044.505,00
DAK Bidang Kesehatan - LRA	79.975.168.000,00	75.501.694.954,00	94,41	73.254.875.525,00
DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	76.404.063.000,00	76.404.062.408,00	100,00	62.332.912.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	-	-	-	47.290.994.099,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	3.535.491.000,00	444.642.000,00	12,58	8.475.472.961,00
DAK Bidang Pertanian - LRA	-	-	-	15.369.321.293,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	-	-	-	-
DAK Bidang Kehutanan - LRA	-	-	-	10.963.471.348,00
DAK Bidang Pariwisata - LRA	2.099.648.000,00	2.099.648.000,00	100,00	1.482.756.270,00
DAK Non Fisik - LRA				
Dana Bos - LRA	726.230.360.000,00	705.157.040.000,00	97,10	679.249.395.000,00
Dana Koperasi dan UKM - LRA	2.300.000.000,00	2.180.244.300,00	94,79	3.787.720.000,00
Dana Tunjangan Profesi Guru - LRA	155.242.974.000,00	155.242.974.000,00	100,00	156.470.058.000,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru - LRA	2.171.938.000,00	2.171.938.000,00	100,00	2.729.250.000,00
Dana Tunjangan Khusus Guru - LRA	909.955.000,00	909.955.000,00	100,00	2.193.995.000,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	410.431.000,00	362.961.530,00	88,43	1.802.882.000,00
Dana Bantuan Operasional Kesehatan - LRA	26.845.453.582,00	26.845.453.582,00	100,00	3.554.250.000,00
Dana Batnuan Operasional Penyelenggaran Museum Taman Budaya - LRA	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	838.500.000,00
Dana Batnuan Operasional Penyelenggaran Museum - LRA	1.400.000.000,00	1.112.329.056,00	79,45	1.450.000.000,00
JUMLAH	**1.324.010.541.582,00**	**1.265.857.865.620,00**	95,61	**1.207.098.898.001,00**

Realisasi Dana DAK tahun 2020 sebesar Rp1.265.857.865.620,00 atau mencapai 95.61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.324.010.541.582,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.207.098.898.001,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp58.758.967.619,00 atau 4,87%.

Dari total realisasi DAK terdapat pendapatan transfer berupa dana BOS sebesar Rp536.124.850.000,00 yang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

tidak berhak menggunakan dana tersebut secara langsung akan tetapi harus mengakui dalam pelaporan realisasi anggaran. Dengan demikian transfer dana BOS yang hanya disalurkan tersebut tidak diakui dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

	2020	2019
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA	**Rp24.928.624.000,00**	**Rp20.694.982.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya merupakan penerimaan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020 sebesar Rp24.928.624.000,00 atau 100% dari total yang dianggarkan Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp20.694.982.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.233.642.000,00 atau 20,46%.

	2020	2019
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	**Rp15.103.240.317,00**	**Rp22.301.535.715,00**

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan lainnya berupa Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut :

Tabel 5.18

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah	19.306.293.943,00	14.422.159.791,00	74,70	13.713.424.715,00
Pendapatan Lainnya	681.080.526,00	681.080.526,00	100,00	8.588.111.000,00
JUMLAH	**19.987.374.469,00**	**15.103.240.317,00**	**75,56**	**22.301.535.715,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2020 sebesar Rp15.103.240.317,00 atau 75,56% dari anggaran sebesar Rp19.987.374.469,00. Realisasi tahun 2020 lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, turun sebesar Rp7.198.295.398,00 atau 32,28%. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2019 terdapat pendapatan diterima untuk penanggulangan bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami tahun 2018.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

2020	2019
Rp14.422.159.791,00	**Rp13.713.424.715,00**

Pencapaian target Lain-lain Pendapatan yang Sah pada pendapatan hibah dalam tahun 2020 sebesar Rp14.422.159.791,00 mencapai 74.70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.306.293.943,00. Adapun rincian pendapatan hibah tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.19
Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	**16.426.951.443,00**	**11.684.125.791,00**	**71,13**	**11.763.640.215,00**
Program IPDMIP	13.970.739.443,00	9.199.054.989,00	65,85	11.239.405.966,00
Program READSI	2.456.212.000,00	2.485.070.802,00	101,17	524.234.249,00
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	**949.930.000,00**	**949.930.000,00**	**100,00**	**0,00**
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	949.930.000,00	949.930.000,00	100,00	**0,00**
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	**1.929.412.500,00**	**1.788.104.000,00**	**92,68**	**1.949.784.500,00**
Jasa Raharja	1.116.000.000,00	1.137.000.000,00	101,88	1.116.000.000,00
Dealer Kendaraan Bermotor	813.412.500,00	651.104.000,00	80,05	833.784.500,00
JUMLAH	**19.306.293.943,00**	**14.422.159.791,00**	**74,70**	**13.713.424.715,00**

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya merupakan penerimaan sisa penggunaan dana bantuan penanggulangan bencana tahun sebelumnya sebesar Rp949.930.000,00.

5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya – LRA

2020	2019
Rp681.080.526,00	**Rp8.588.111.000,00**

Realisasi Pendapatan Lainnya mencapai 100,00% atau sebesar Rp681.080.526,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp681.080.526,00, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp8.588.111.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp7.907.030.474,00 atau 92,07%.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam

periode TA 2020 yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp3.810.416.446.556,90 atau 94,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.049.510.086.061,55. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp3.660.334.086.927,17, realisasi belanja tahun 2020 meningkat sebesar Rp150.082.359.629,73 atau 4,10%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.20
Realisasi Belanja Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Operasi	3.323.714.689.404,76	3.142.577.173.852,95	94,55	2.823.714.259.401,10
Belanja Modal	708.302.065.359,98	665.439.891.390,95	93,95	836.619.827.526,07
Belanja Tak Terduga	17.493.331.296,81	2.399.381.313,00	13,72	0,00
Jumlah	**4.049.510.086.061,55**	**3.810.416.446.556,90**	**94,10**	**3.660.334.086.927,17**

Lebih lanjut realisasi anggaran belanja tahun 2020 diatas dapat juga diuraikan dalam grafik berikut ini:

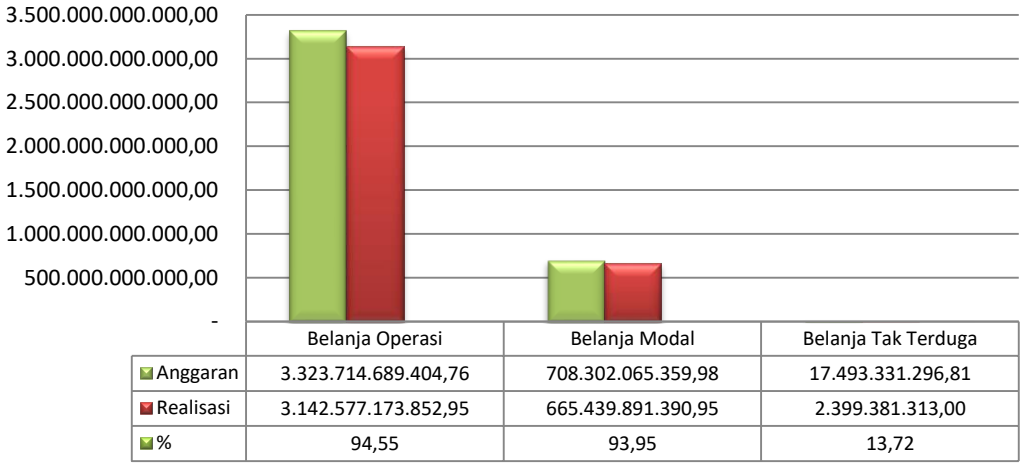

Gambar 5.3
Realisasi Belanja tahun 2020

Gambar 5.3 menggambarkan bahwa di tahun 2020 jenis Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp3.142.577.173.852,95 atau 94,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.323.714.689.404,76. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp665.439.891.390,95 atau 93,95% dari yang dianggarkan sebesar

Rp708.302.065.359,98 dan Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp2.399.381.313,00 atau 13,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.493.331.296,81.

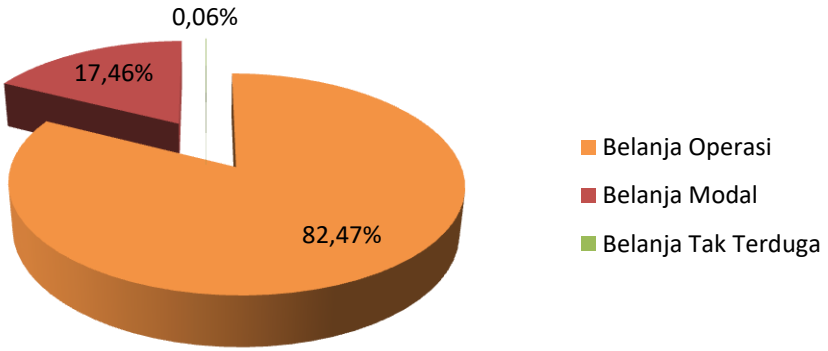

Gambar 5.4
Komposisi Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020

Gambar 5.4 menjelaskan bahwa dari total realisasi belanja daerah, sebesar 82,47% dibelanjakan untuk kebutuhan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 17,46% untuk belanja modal daerah dan sisanya 0,06% belanja tidak terduga.

5.1.2..1 Belanja Operasi

2020	2019
Rp3.142.577.173.852,95	**Rp2.823.714.259.401,10**

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.142.577.173.852,95 atau 94,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.323.714.689.404,76 jika dibandingkan dengan tahun 2019 Belanja Operasi tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp318.862.914.451,85 atau 11,29% dari realisasi Belanja Operasi tahun 2019. Belanja Operasi terdiri dari obyek belanja sebagai berikut;

Tabel 5.21
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Pegawai	1.432.594.909.077,30	1.348.495.563.229,00	94,13	1.315.443.298.690,00
Belanja Barang dan Jasa	971.561.127.504,06	907.419.260.623,95	93,40	1.046.327.640.711,10
Belanja Hibah	918.079.152.823,40	885.470.850.000,00	96,45	461.119.320.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.479.500.000,00	1.191.500.000,00	80,53	824.000.000,00
Jumlah	**3.323.714.689.404,76**	**3.142.577.173.852,95**	**94,55**	**2.823.714.259.401,10**

Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Pada komponen belanja Non PNS tidak dapat direalisasikan karena beberapa Pegawai Non PNS tidak aktif lagi sehingga honorarium yang telah dianggarkan tidak dapat dibayarkan.
2. Efisiensi beberapa komponen belanja yaitu belanja perjalanan dinas, telepon, listrik, air, makan minum kegiatan dan belanja lainnya yang termasuk dalam komponen belanja barang dan jasa yang pelaksanaan fisik kegiatannya pada tataran indikator output telah dilaksanakan 100%.
3. Adanya beberapa penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak dibayarkan karena tidak dapat melengkapi persyaratan pencairan Hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada pembatasan mobilitas manusia pada kebijakan perlakuan protokol kesehatan sehingga beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

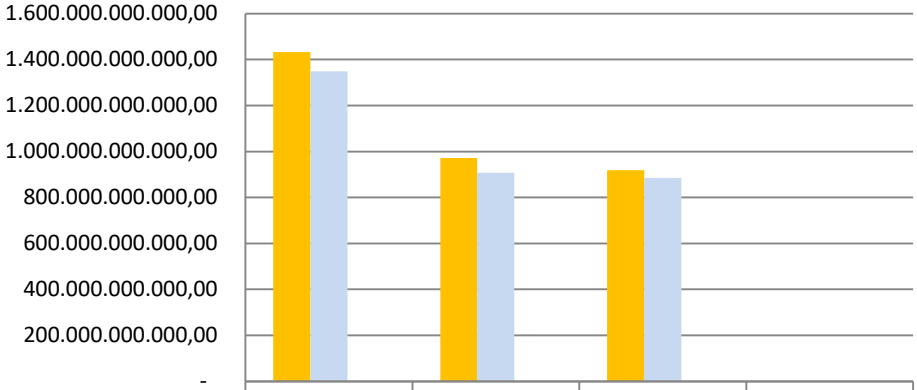

	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
Anggaran	1.432.594.909.	971.561.127.50	918.079.152.82	1.479.500.000,
Realisasi	1.348.495.563.	907.419.260.62	885.470.850.00	1.191.500.000,
%	94,13	93,40	96,45	80,53

Gambar 5.5
Realisasi Belanja Operasi tahun 2020

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Penganggaran belanja pegawai di alokasikan untuk :

1) Membiayai gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
3) Tambahan penghasilan bagi PNS sesuai kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD.
4) Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5) Pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp1.432.594.909.077,30 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp1.348.495.563.229,00 atau 94,13%. Jika dibandingkan degan realisasi tahun 2019, Belanja Pegawai tahun 2020 meningkat sebesar Rp33.052.264.539,00 atau 2,51%. Berikut rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2020.

Tabel 5.22
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020			Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.048.928.816.131,17	951.345.494.759,00	90,70	971.115.310.035,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	234.709.072.352,66	226.155.257.845,00	96,36	214.907.676.607,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.762.199.904,22	9.617.196.000,00	98,51	1.830.047.280,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	20.282.000.000,00	20.279.100.000,00	99,99	18.457.867.379,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	395.039.903,25	325.907.024,00	82,50	245.121.440,00
Honorarium PNS	2.748.680.000,00	2.720.295.000,00	98,97	1.261.800.000,00
Honorarium Non PNS	79.789.007.786,00	78.823.994.419,00	98,79	77.425.050.726,00
Uang Lembur	20.240.000,00	20.065.000,00	99,14	-
Belanja Pegawai BLUD	12.900.720.000,00	12.148.392.000,00	94,17	9.361.697.750,00
Belanja Pegawai Dana BOS	23.059.133.000,00	47.059.861.182,00	204,08	20.838.727.473,00
Jumlah	**1.432.594.909.077,30**	**1.348.495.563.229,00**	**94,13**	**1.315.443.298.690,00**

Dalam realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.348.495.563.229,00, terdapat belanja pegawai yang realisasinya melebihi dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

No	Program/Kegiatan	Rekening	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**				
	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Belanja Pegawai Dana BOS	22.348.359.000,00	46.519.811.182,00	24.171.452.182,00
2	**BLUD RSUD Madani**				
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - Pelayanan BLUD	Belanja Pegawai BLUD	3.554.350.000,00	3.659.400.000,00	105.050.000,00

Kelebihan realisasi tersebut disebabkan :

- Pada dinas pendidikan dan kebudayaan karena keterlambatan penyusunan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari sekolah dan tidak semua satuan pendidikan yang menyusun perubahan RKAS sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengusulkan perubahan anggaran kegiatan BOS. Selain itu Terdapat perubahan aturan terkait alokasi belanja pegawai dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020, yaitu selama pandemi Covid-19 diperkenankan untuk membayar honorarium guru yang terdaftar di Dapodik dan Non NUPTK yang sebelumnya hanya untuk guru NUPTK. Selain itu sekolah bisa menggunakan lebih dari 50 % dana BOS untuk menggaji guru honorer yang bertugas di sekolahnya yang sebelumnya maksimal 50%.
- Pada BLUD RSUD Madani untuk membiayai penanganan Covid-19 karena RSUD Madani sebagai RS Rujukan Covid-19.

b) Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa disamping memperhatikan asas efisiensi juga memperhatihan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja baik program maupun kegiatan.

Kebijakan penganggaran Belanja Barang dan Jasa dialokasikan pada belanja diantaranya berupa: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli, Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah, Belanja Pemeliharaan Barang

Milik Daerah dan belanja lain yang termasuk dalam komponen Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan memenuhi sasaran program kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 – 2021.

Alokasi anggaran Belanja Barang Jasa sebesar Rp971.561.127.504,06 dan dari jumlah tersebut yang dapat direalisasikan sebesar Rp907.419.260.623,95 atau 93,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2019, realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp138.908.380.087,15 atau 13,28%.

Realisasi rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.23
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Bahan Pakai Habis	30.983.001.903,35	30.084.396.588,00	97,10	42.500.423.053,45
Belanja Bahan/Material	42.208.268.639,00	41.844.746.760,00	99,14	39.549.179.572,03
Belanja Jasa Kantor	116.740.739.212,80	102.360.158.989,40	87,68	144.261.332.615,79
Belanja Premi Asuransi	42.296.451.386,00	41.229.265.944,00	97,48	41.069.624.404,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.973.090.953,60	18.280.580.026,50	96,35	18.086.014.574,20
Belanja Cetak dan Penggandaan	20.384.056.265,00	19.569.255.799,00	96,00	29.877.605.910,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.809.118.125,00	5.449.184.618,00	93,80	12.958.009.297,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	690.107.500,00	654.877.500,00	94,89	1.419.148.000,00
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	0,00	160.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.749.565.033,00	1.684.231.422,00	96,27	5.042.845.774,00
Belanja Makanan dan Minuman	34.695.935.210,98	31.515.521.610,00	90,83	51.165.609.307,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.309.017.850,00	1.301.688.500,00	99,44	3.823.934.900,00
Belanja Pakaian Kerja	990.798.190,00	988.914.690,00	99,81	2.030.570.460,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.149.471.100,00	1.884.408.500,00	87,67	4.706.555.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	114.276.660.396,50	108.380.332.119,00	94,84	191.567.837.899,00
Belanja Pemeliharaan	83.958.824.946,56	82.232.028.271,59	97,94	94.058.736.971,24
Belanja Jasa Konsultansi	17.200.895.706,75	16.845.262.578,00	97,93	34.346.386.606,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	172.152.081.145,52	166.731.127.564,56	96,85	123.413.233.425,34
Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	689.250.000,00	688.750.000,00	99,93	147.700.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	451.000.000,00	337.000.000,00	74,72	1.913.350.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan T	1.064.836.149,00	963.233.151,00	90,46	4.705.207.886,00
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Piha	83.450.000,00	83.450.000,00	100,00	857.525.000,00
Belanja Barang Dan Jasa Dana BOS	121.682.637.466,00	95.343.226.833,00	78,35	98.561.098.780,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	140.676.558.925,00	138.646.332.259,90	98,56	99.866.077.094,05
Belanja Peralatan/Perlengkapan Lainnya	345.311.400,00	321.286.900,00	93,04	239.634.182,00
Jumlah	**971.561.127.504,06**	**907.419.260.623,95**	**93,40**	**1.046.327.640.711,10**

Dalam realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp907.419.260.623,95, terdapat belanja barang dan jasa yang realisasinya melebihi dari anggaran. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	**BLUD. RSUD. Madani** *Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD* - Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.365.792.637,00	36.093.987.686,00	6.728.195.049,00

Kelebihan realisasi tersebut disebabkan karena Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Madani digunakan untuk membiayai penanganan Covid-19 karena RSUD Madani sebagai RS Rujukan Covid-19.

c) Belanja Hibah

Penganggaran Belanja Hibah mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial.

Alokasi anggaran Belanja Hibah sebesar Rp918.079.152.823,40 dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp885.470.850.000,00 atau 96,45%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2019, realisasi Belanja Hibah tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp424.351.530.000,00 atau 92,03%.

Dari total realisasi Belanja Hibah terdapat Belanja Hibah Dana BOS kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp536.124.850.000,00 yang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak berhak menggunakan dana tersebut secara langsung akan tetapi harus diakui sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dengan demikian belanja dana BOS yang hanya disalurkan tersebut tidak diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Terdapat perubahan peraturan pada tahun 2020,

dimana, semua dana BOS di transfer langsung dari rekening Kas Umum Negara ke rekening sekolah masing-masing di semua tingkatan pendidikan, tidak melalui Rekening Umum Kas Daerah.

Tabel 5.24
Realisasi Rincian Hibah Tahun 2020

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	4.877.000.000,00	4.262.000.000,00	87,39	3.515.000.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	270.424.250.000,00	268.218.000.000,00	99,18	33.036.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	642.777.902.823,40	612.990.850.000,00	95,37	424.568.320.000,00
Jumlah	**918.079.152.823,40**	**885.470.850.000,00**	**96,45**	**461.119.320.000,00**

Tidak terealisirnya 100% atas belanja tersebut sebagian besar disebabkan adanya beberapa penerima hibah tidak dibayarkan karena tidak dapat melengkapi persyaratan pencairan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya realisasi belanja hibah diuraikan berdasarkan jenis hibah yaitu hibah kepada kelompok masyarakat, hibah kepada organisasi kemasyarakatan, Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah dan hibah barang dan jasa yang akan diserahkan ke pihak ketiga/masyarakat dengan rincian masing – masing jenis hibah:

1) Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat

   Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp4.877.000.000,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp4.262.000.000,00 atau 87,39% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.25
Realisasi Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2020

Penerima Hibah	Jumlah
Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Alkautsar Palu Sulawesi Tengah	175.000.000,00
KOMDA LANSIA Provinsi Sulawesi Tengah	200.000.000,00
Yayasan Pembina Umat Sarinah Sulawesi Tengah	100.000.000,00
Komunitas Seni Tadulako	50.000.000,00
Pengurus Besar Lingkar Studi Aksi Dan Demokrasi Indonesia Sulawesi Tengah	100.000.000,00
Persatuan Wredatama republik Indonesia (PWRI) Sulawesi Tengah	20.000.000,00
Yayasan Cahaya Asnur	155.000.000,00

Penerima Hibah	Jumlah
Yayasan Pendidikan Al-Fahmi Palu	600.000.000,00
Dewan Pengurus Persatuan Wanita Islam (Perwis) Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	50.000.000,00
Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kab. Toli-Toli	100.000.000,00
Yayasan Al Ghazali Jl. Tara (kelapa Gading) Kab. Sigi	155.000.000,00
Yayasan Singgani Jl. Dewi Sartika V Kelurahan Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu	155.000.000,00
Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana Sulawesi Tengah	100.000.000,00
Yayasan Al-Fatih Palu	25.000.000,00
Badan Kerjasama Wanita Islam (BAKESWI)	530.000.000,00
Yayasan Generasi Bulan Bintang	30.000.000,00
Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam (PAUD) Mentari Kec. mantikulore Kota Palu	50.000.000,00
Yayasan Ihsanul Amal	350.000.000,00
Yayasan Jaya Persada Lestari Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu	30.000.000,00
Komunitas Pemuda Pencinta Seni (PETANI)	40.000.000,00
Yayasan Walimanis Pusat Jl. Sultan Hasanudin No. 17 Tinombo Kab. Parigi Moutong	20.000.000,00
Dewan Harian Daerah 45 Provinsi Sulawesi Tengah	20.000.000,00
Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	100.000.000,00
PARFI Awards	120.000.000,00
Lembaga Seni Budaya Bantaya Provinsi Sulawesi Tengah	25.000.000,00
Yayasan Panti Asuhan Nurotul Munawarah Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan	27.000.000,00
Yayasan Nurul Aisyah	180.000.000,00
Yayasan Panti Asuhan Raudhatul Ummat	180.000.000,00
Yayasan Firdaus	90.000.000,00
Yayasan Al Gaizah	25.000.000,00
Pimpinan Wilayah Himpunan Seni Budaya Islam PW-HSBI Provinsi Sulawesi Tengah	20.000.000,00
Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Purnawirawan Dan Warakawuri TNI Dan Polri (PEPABRI)	20.000.000,00
Yayasan Panti Asuhan Al-Mabrukah Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu	15.000.000,00
Pimpinan Daerah Ittihad Persaudaraan Islam Masjid (PD IPIM) Kel. Bahontula Kab. Morowali Utara	50.000.000,00
Yayasan Al Hijrah Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu	40.000.000,00
Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	70.000.000,00
Persatuan Istri Purnawirawan Pengurus Daerah	20.000.000,00
Sikap (Studi Informasi Komunikasi Publik) Institute	200.000.000,00
Yayasan Nurul Yaqiin Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu	25.000.000,00
Jumlah	**4.262.000.000,00**

2) Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp270.424.250.000,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp268.218.000.000,00 atau 99,18%. Realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.26
Realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020

Penerima Hibah	Jumlah
KONI	4.000.000.000,00
Pramuka	400.000.000,00
PMI	900.000.000,00
KPU	156.938.000.000,00
APPSI	90.000.000,00
BKPRS	250.000.000,00
BAZNAS	250.000.000,00
KPID	3.378.000.000,00
AIDS	250.000.000,00
BPSK	778.750.000,00
BKPK	0,00
Bidang Perekonomian	580.000.000,00
Bidang Kependidikan	6.021.000.000,00
Bidang Kesehatan dan Olahraga	425.000.000,00
Bidang Keagamaan	10.957.250.000,00
Bawaslu	56.000.000.000,00
Pengamanan PILKADA	27.000.000.000,00
Jumlah	**268.218.000.000,00**

3) Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp642.777.902.823,40 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp612.990.850.000,00 atau 95,37%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.27
Realisasi Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020			Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Hibah BOS Reguler Kabupaten/Kota	450.565.167.823,40	447.930.850.000,00	99,42	424.568.320.000,00
Hibah BOS Afirmasi Kabupaten/Kota	134.728.000.000,00	128.962.000.000,00	95,72	-
Hibah BOS Kinerja Kabupaten/Kota	57.484.735.000,00	36.098.000.000,00	62,80	-
Jumlah	**642.777.902.823,40**	**612.990.850.000,00**	**95,37**	**424.568.320.000,00**

d) Belanja Bantuan Sosial

Sama halnya dengan belanja bantuan hibah bahwa belanja bantuan sosial mengacu pada peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.191.500.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.479.500.000,00 atau sebesar 80,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28
Realisasi Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	1.479.500.000,00	1.191.500.000,00	80,53	824.000.000,00
Jumlah	**1.479.500.000,00**	**1.191.500.000,00**	**80,53**	**824.000.000,00**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dari realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar 80,53% teralokasi untuk Bantuan Sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.
2. Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan adanya beberapa penerima bantuan tidak dibayarkan karena tidak dapat melengkapi persyaratan pencairan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

5.1.2.2. Belanja Modal

2020	2019
Rp665.439.891.390,95	**Rp836.619.827.526,07**

Belanja Modal adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah berkaitan dengan pembayaran atas program dan kegiatan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dalam periode TA 2020.

Penganggaran Belanja Modal diperioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar, dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur lainnya dilakukan

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparan dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah juga didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang daerah yang ada.

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam pelayanan pemerintahan dan memenuhi ketentuan *capitalization threshold* yang diperoleh dengan nilai harga beli ditambahkan dengan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap untuk digunakan.

Alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp708.302.065.359,98 dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp665.439.891.390,95 atau 93,95%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Belanja Modal tahun 2020 menurun sebesar Rp171.179.936.135,12 atau 20,46%. Realisasi Belanja Modal dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.29
Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Tanah	835.750.000,00	835.750.000,00	100,00	1.181.910.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.683.174.277,28	229.478.761.975,00	87,36	257.512.641.350,35
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	251.912.945.663,70	244.805.546.096,95	97,18	265.391.804.467,88
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.912.415.411,00	147.282.208.399,00	99,57	265.461.184.605,84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	44.957.780.008,00	43.037.624.920,00	95,73	47.072.287.002,00
Jumlah	**708.302.065.359,98**	**665.439.891.390,95**	**93,95**	**836.619.827.526,07**

Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya adalah terdapat pekerjaan gagal lelang dan belanja lainnya yang termasuk dalam komponen belanja modal yang pelaksanaan fisik kegiatannya pada tataran indikator output telah dilaksanakan 100% karena efesiensi harga atas pelaksanaan lelang .

Dalam realisasi Belanja Modal sebesar Rp665.439.891.390,95, terdapat Belanja Modal yang realisasinya melebihi dari anggaran. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	**Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan** *Program Banturan Operasional Sekolah (BOS)* - Bantuan Operasioal Sekolah (BOS)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan	13.497.947.900,00	19.030.971.167,00	5.533.023.267,00
	- Kegiatan Pelaksanaan Sisa Bantuan Operasioal Sekolah (BOS)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku	-	2.008.908.700	2.008.908.700

Kelebihan realisasi tersebut disebabkan karena keterlambatan penyusunan perubahan RKAS dari sekolah dan tidak semua satuan pendidikan yang menyusun perubahan RKAS sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengusulkan perubahan anggaran kegiatan BOS.

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2020 sebesar Rp835.750.000,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp346.160.100,00 atau 29,29% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.181.910.100,00. Rincian realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5.30
Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	835.750.000,00	835.750.000,00	100,00	1.181.910.100,00
Jumlah	**835.750.000,00**	**835.750.000,00**	**100,00**	**1.181.910.100,00**

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp229.478.761.975,00 atau 87,36% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp28.033.879.375,35 atau 10,89% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp257.512.641.350,35. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5.31
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pengadaan Alat-alat Bantu	721.483.285,00	693.121.142,00	96,07	877.762.000,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	10.149.532.582,00	10.020.997.500,00	98,73	25.140.263.838,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	4.000.000,00
Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	44.750.000,00	44.550.000,00	99,55	189.900.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	139.050.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	9.072.000,00	9.050.000,00	99,76	1.985.000,00
Pengadaan Alat Ukur	370.900.382,00	366.330.292,00	98,77	693.219.323,00
Pengadaan Alat Pengolahan	3.218.219.425,00	3.135.317.009,00	97,42	2.890.445.725,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	184.440.000,00	158.910.000,00	86,16	974.560.300,00
Pengadaan Alat Kantor	2.247.787.201,00	1.978.609.915,00	88,02	8.610.480.335,24
Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.615.038.664,40	18.488.260.307,00	94,26	23.320.569.411,00
Pengadaan Komputer	45.723.664.486,88	40.677.721.821,00	88,96	41.227.574.667,00
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.111.870.900,00	1.952.179.300,00	92,44	2.153.663.008,00
Pengadaan Alat Studio	2.893.942.450,00	2.554.661.718,00	88,28	10.903.125.562,00
Pengadaan Alat Komunikasi	571.853.550,00	558.086.500,00	97,59	587.898.400,00
Pengadaan Alat Kedokteran	48.118.455.941,00	47.508.506.088,00	98,73	59.310.298.470,00
Pengadaan Alat Kesehatan	26.151.334.540,00	22.337.767.509,00	85,42	11.223.652.586,11
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.748.095.050,00	1.145.867.100,00	65,55	5.660.046.376,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	97.079.231.728,00	76.313.707.004,00	78,61	61.137.235.149,00
Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	563.200.000,00	563.200.000,00	100,00	-
Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	275.500.000,00	141.500.000,00	51,36	-
Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing	-	-	-	994.195.000,00
Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	205.000.000,00	204.000.000,00	99,51	405.988.000,00
Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	67.500.000,00	67.284.750,00	99,68	49.775.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	586.302.092,00	533.134.020,00	90,93	1.016.953.200,00
Jumlah	**262.683.174.277,28**	**229.478.761.975,00**	**87,36**	**257.512.641.350,35**

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp244.805.546.096,95 atau 97,18% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp20.586.258.370,93 atau 7,76% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp265.391.804.467,88. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5.32
Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	251.438.816.266,70	244.331.716.514,95	97,17	259.815.665.418,62
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	474.129.397,00	473.829.582,00	99,94	5.435.643.049,26
Pengadaan Bangunan Bersejarah	-	-	-	92.900.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	-	-	-	13.196.000,00
Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	-	-	-	34.400.000,00
Jumlah	**251.912.945.663,70**	**244.805.546.096,95**	**97,18**	**265.391.804.467,88**

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp147.282.208.399,00 atau 99,57% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp118.178.976.206,84 atau 44,52% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp265.461.184.605,84. Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5.33
Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pengadaan Jalan	115.232.289.603,00	114.927.281.272,00	99,74	153.961.241.970,84
Pengadaan Jembatan	1.978.300.000,00	1.978.300.000,00	100,00	15.506.735.300,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	11.388.445.000,00	11.236.794.000,00	98,67	59.840.823.000,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	7.262.791.208,00	7.259.331.358,00	99,95	16.575.024.500,00
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	593.660.000,00	593.660.000,00	100,00	397.520.000,00
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	364.852.000,00	351.739.000,00	96,41	1.708.880.000,00
Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.872.481.000,00	1.870.256.000,00	99,88	5.168.124.242,00
Pengadaan Bangunan Air	-	-	-	5.044.083.283,00
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	239.100.000,00	238.744.000,00	99,85	2.648.143.300,00
Pengadaan Instalasi Air Kotor	7.288.576.600,00	7.202.635.169,00	98,82	-
Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	137.200.000,00	137.200.000,00	100,00	212.230.000,00
Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	56.500.000,00	56.500.000,00	100,00	92295500
Pengadaan Jaringan Air Minum	-		-	3.151.711.460,00
Pengadaan Jaringan Listrik	1.498.220.000,00	1.429.767.600,00	95,43	1154372050
Jumlah	**147.912.415.411,00**	**147.282.208.399,00**	**99,57**	**265.461.184.605,84**

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp43.037.624.920,00 atau 95,73% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.034.662.082,00 atau 8,57% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp47.072.287.002,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5.34
Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pengadaan Buku	21.042.732.700,00	19.123.858.030,00	90,88	20.611.891.793,00
Pengadaan Terbitan	-	-	-	1.306.546.661,00
Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	-	-	-	555.347.500,00
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	255.000.000,00	254.650.000,00	99,86	365.605.800,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	40.000.000,00	39.500.000,00	98,75	348.429.800,00
Pengadaan Hewan	-	-	-	187.000.000,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	23.620.047.308,00	23.619.616.890,00	100,00	23.697.465.448,00
Jumlah	**44.957.780.008,00**	**43.037.624.920,00**	**95,73**	**47.072.287.002,00**

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

2020	2019
Rp2.399.381.313,00	**Rp0,00**

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kriteria untuk Belanja Tak Terduga adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termaksud pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tak Terduga tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp17.493.331.296,81 dengan realisasi sebesar Rp2.399.381.313,00. Rincian obyek Belanja Tak Terduga ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.35
Rincian Obyek Belanja Tak Terduga Kejadian Luar Biasa Lainnya 2020

Uraian	Rp
Bantuan Dana Penanganan Darurat Banjir Bandang di Desa Lengkeka Kec. Lore Barat Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah	2.171.404.263,00
Pengadaan sembako untuk diserahkan kepada Pekerja terdampak pandemi Covid_19 Tahun 2020	198.000.000,00
Kesalahan penyetoran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah atas Penyelesaian pembayaran klaim Jamkesprov Tahun Anggaran 2019 dari Kabupaten Toli-Toli.	29.977.050,00
Jumlah	**2.399.381.313,00**

5.1.3 Transfer

Transfer adalah Ppengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Rincian transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2020 sebagai berikut :

Tabel 5.36
Realisasi Transfer Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	443.270.948.483,00	427.382.228.304,00	96,42	419.070.467.846,00
Transfer Bantuan Keuagan	43.275.206.500,00	43.259.243.030,00	99,96	19.366.664.678,00
Jumlah	**486.546.154.983,00**	**470.641.471.334,00**	**96,73**	**438.437.132.524,00**

Realisasi transfer tahun 2020 sebesar Rp470.641.471.334,00 atau 96,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp486.546.154.983,00. Jika dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2019 sebesar Rp438.437.132.524,00, realisasi transfer tahun 2020 meningkat sebesar Rp32.204.338.810,00 atau 7,35%.

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

2020	2019
Rp427.382.228.304,00	**Rp419.070.467.846,00**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah suatu belanja yang dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota yang diberikan berdasarkan kemampuan dalam merealisasikan target – target pendapatan atas pajak dan retribusi daerah yang besarannya setiap kabupaten/kota bervariasi sesuai potensi dan target pendapatan setiap tahun. Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2020 didasarkan pada:

1. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:980/52/Bapenda-G.ST/2020 tentang Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah atas Penerimaan Pajak Daerah tahun 2019 tanggal 07 Februari 2020.
2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 980/166/BAPENDA-G.ST/2020 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Triwulan I Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Mei 2020.
3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 980/340/BAPENDA-G.ST/2020 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor 980/330/BAPENDA-G.ST/2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Penyaluran Triwulan II Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Agustus 2020.
4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 980/433/BAPENDA-G.ST/2020 tentang Penetapan besaran alokasi penyaluran Triwulan III Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 November 2020.
5. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 980/587/BAPENDA-G.ST/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 980/563/BAPENDA-G.ST/2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Penyaluran Triwulan IV Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Desember 2020.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2020 sebesar Rp427.382.228.304,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp443.270.948.483,00 atau 96,42%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2020 meningkat sebesar Rp8.311.760.458,00 atau 1,98% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp419.070.467.846,00. Berikut rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan:

Tabel 5.37
Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020			Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Bagi Hasil kepada Kota Palu	84.295.540.244,00	74.790.199.372,00	88,72	79.207.565.911,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Donggala	29.568.885.689,00	29.568.885.689,00	100,00	27.875.793.122,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Poso	42.304.093.515,00	41.763.054.166,00	98,72	39.153.036.914,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Tolitoli	31.174.005.287,00	31.174.005.287,00	100,00	29.888.312.588,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Banggai	47.910.161.186,00	46.927.920.606,00	97,95	45.733.906.439,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Tojo Una-Una	24.126.319.367,00	24.126.319.367,00	100,00	22.988.205.744,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Buol	23.455.713.161,00	22.853.063.146,00	97,43	22.281.000.468,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Parigi Moutong	48.091.819.961,00	46.042.302.324,00	95,74	45.580.478.608,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Morowali	26.920.975.615,00	25.781.553.859,00	95,77	25.508.851.270,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Banggai Kepulauan	19.668.816.532,00	19.635.590.790,00	99,83	18.682.397.614,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Sigi	26.983.880.390,00	26.983.880.390,00	100,00	25.263.443.974,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Banggai Laut	16.077.639.904,00	15.750.711.016,00	97,97	15.301.201.930,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Morowali Utara	22.693.097.632,00	21.984.742.292,00	96,88	21.606.273.264,00
Jumlah	**443.270.948.483,00**	**427.382.228.304,00**	**96,42**	**419.070.467.846,00**

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

2020 Rp43.259.243.030,00 **2019 Rp19.366.664.678,00**

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja wajib terpenuhi sesuai perintah undang-undang. Pemberian bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah pada daerah bawahan.

Pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ada yang bersifat umum bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan ada juga bantuan yang bersifat khusus guna membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagai penerima bantuan.

Bantuan lain yang dialokasi dalam APBD tahun 2020 adalah bantuan keuangan kepada Partai Politik, dan Bantuan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dianggarkan dalam APBD.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan tahun 2020 sebesar Rp43.259.243.030,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp43.275.206.500,00 atau

99,96%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Transfer Bantuan Keuangan tahun 2020 meningkat sebesar Rp23.892.578.352,00 atau 123,37% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp19.366.664.678,00. Berikut rincian realisasi Transfer Bantuan Keuangan :

Tabel 5.38
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020			Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	41.128.840.000,00	41.112.876.530,00	99,96	18.122.094.278,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.146.366.500,00	2.146.366.500,00	100,00	1.244.570.400,00
Jumlah	**43.275.206.500,00**	**43.259.243.030,00**	**99,96**	**19.366.664.678,00**

1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Alokasi anggaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp41.128.840.000,00 dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp41.112.876.530,00 atau 99,96%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp22.990.782.252,00 atau 126,87% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp18.122.094.278,00. Berikut rincian realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya :

Tabel 5.39
Realisasi Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kota Palu	3.505.580.000,00	3.505.580.000,00	100,00	120.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Donggala	4.219.100.000,00	4.219.100.000,00	100,00	240.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Poso	3.487.820.000,00	3.487.820.000,00	100,00	285.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Tolitoli	2.677.400.000,00	2.677.400.000,00	100,00	150.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Banggai	4.732.640.000,00	4.732.640.000,00	100,00	345.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Tojo Una-Una	2.026.940.000,00	2.026.940.000,00	100,00	180.000.000,00

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Buol	2.696.040.000,00	2.696.040.000,00	100,00	165.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Parigi Moutong	10.007.420.000,00	9.991.456.530,00	99,84	8.686.400.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Morowali	1.227.760.000,00	1.227.760.000,00	100,00	135.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Banggai Kepulauan	2.030.220.000,00	2.030.220.000,00	100,00	180.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sigi	3.098.040.000,00	3.098.040.000,00	100,00	3.054.972.253,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Banggai Laut	515.460.000,00	515.460.000,00	100,00	2.930.722.025,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Morowali Utara	904.420.000,00	904.420.000,00	100,00	650.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi Lain	-	-	0,00	1.000.000.000,00
Jumlah	**41.128.840.000,00**	**41.112.876.530,00**	**99,96**	**18.122.094.278,00**

2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan kepada partai politik. Alokasi anggaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp2.146.366.500,00 dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp2.146.366.500,00 atau 100,00%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp901.796.100,00 atau 72,46% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.244.570.400,00. Berikut rincian realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya:

Tabel 5.40
Realisasi Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	304.129.500,00	304.129.500,00	100,00	223.650.900,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	248.800.500,00	248.800.500,00	100,00	126.879.300,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	178.783.500,00	178.783.500,00	100,00	142.339.500,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	298.485.000,00	298.485.000,00	100,00	168.327.900,00

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	334.182.000,00	334.182.000,00	100,00	108.678.600,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	132.249.000,00	132.249.000,00	100,00	95.219.100,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	146.415.000,00	146.415.000,00	100,00	85.622.400,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	158.343.000,00	158.343.000,00	100,00	88.911.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	154.048.500,00	154.048.500,00	100,00	95.839.200,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	81.126.000,00	81.126.000,00	100,00	41.848.200,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Indonesia	109.804.500,00	109.804.500,00	100,00	67.254.300,00
Jumlah	**2.146.366.500,00**	**2.146.366.500,00**	**100,00**	**1.244.570.400,00**

5.1.4 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 sebesar (Rp87.728.860.760,83) dan tahun 2019 sebesar Rp29.381.901.418,61. Defisit pada tahun 2020 terdiri atas pendapatan sebesar Rp4.193.329.057.130,07 dikurangi dengan belanja dan transfer sebesar Rp4.281.057.917.890,90.

5.1.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terinci sebagai berikut:

Tabel 5.41
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	429.939.655.799,60	429.929.141.925,60	100,00	439.594.405.001,99
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	0,00	39.038.000.000,00
Pembiayaan Netto	429.939.655.799,60	429.929.141.925,60	100,00	400.556.405.001,99

Tabel 5.41 menujukkan realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2020 sebesar Rp429.929.141.925,60 dari anggaran sebesar Rp429.939.655.799,60.

Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp400.556.405.001,99 mengalami kenaikan sebesar Rp29.372.736.923,61 atau 7,33%. Rincian pembiayaan tahun anggaran 2020 dijelaskan sebagai berikut :

	2020	2019
5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan	**Rp 429.929.141.925,60**	**Rp 439.594.405.001,99**

Penerimaan Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Angaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya.

Penerimaan pembiayaan per 31 Desember tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp429.939.655.799,60 dan terealisasi sebesar Rp429.929.141.925,60 atau 99,99%. Dari total realisasi terdapat selisih SiLPA sebesar Rp10.513.874,00, disebabkan :

a. Koreksi atas kesalahan pembukuan penyajian saldo kas BOS tahun 2019 sebesar Rp9.164.495,00.
b. Terdapat PFK yang teranggarkan pada APBD tahun 2020 sebesar Rp1.349.379,00 dan nilai tersebut telah disetor ke Kas Negara tanggal 29 Desember 2020.

Terkait penganggaran SiLPA tahun 2020 terdapat perbedaan dengan SiLPA tahun 2019, seyogianya nilai antara realisasi SiLPA tahun 2019 harus sama dengan penganggaran penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan angaran tahun sebelumnya yakni tahun 2019. Perbedaan tersebut sebesar Rp1.349.379,00 yang merupakan nilai hutang fihak ketiga tahun 2019.

	2020	2019
5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan	**Rp 0,00**	**Rp 39.038.000.000,00**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang penggunaannya diantaranya untuk penyertaan modal daerah. Pengeluaran pembiayaan di tahun anggaran 2020 tidak dianggarkan.

	2020	2019
5.1.5.3 Pembiayaan Netto	**Rp 429.929.141.925,60**	**Rp 400.556.405.001,99**

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan Daerah	:	429.929.141.925,60
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	:	-
Pembiayaan Netto	**:**	**429.929.141.925,60**

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2020 sebesar Rp429.929.141.925,60 dari anggaran sebesar Rp429.939.655.799,60. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp400.556.405.001,99 mengalami kenaikan sebesar Rp29.372.736.923,61 atau 7,33%.

		2020	2019
5.1.6	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan**	**342.200.281.164,77**	**Rp429.938.306.420,60**

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SIKPA), yang menujukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah.

Pada tahun anggaran 2020 APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami SiLPA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.42
Perhitungan SILPA Tahun 2020

Uraian	2020			Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan	4.106.116.585.244,95	4.193.329.057.130,07	102,12	4.128.153.120.869,78
Belanja	4.049.510.086.061,55	3.810.416.446.556,90	94,10	3.660.334.086.927,17
Transfer	486.546.154.983,00	470.641.471.334,00	96,73	438.437.132.524,00
Surplus/(Defisit)	***(429.939.655.799,60)***	***(87.728.860.760,83)***	***0,00***	***29.381.901.418,61***
Pembiayaan Netto	429.939.655.799,60	429.929.141.925,60	100,00	400.556.405.001,99
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0,00**	**342.200.281.164,77**	**0,00**	**429.938.306.420,60**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp342.200.281.164,77 mengalami penurunan sebesar Rp87.738.025.255,83 atau 20,41% dari tahun anggaran 2019 sebesar Rp429.938.306.420,60. rincian SILPA sebagai berikut.

Tabel 5.43
Rincian Perhitungan SILPA Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	316.571.833.399,24	417.477.463.604,65
	(Utang PFK RSUD Undata)	-	(1.349.379,00)
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.357.000,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	238.480,00	-
4.	Kas di BLUD	7.666.118.451,53	9.182.066.112,65
6.	Kas di Bendahara BOS	17.962.090.834,00	3.164.298.483,00
7.	Kas Lainnya		114.470.599,30
	Jumlah	**342.200.281.164,77**	**429.938.306.420,60**

1. Kas di Kas Daerah merupakan uang yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp316.571.833.399,24.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp238.480,00 yang berada pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPD berupa pendapatan jasa giro yang belum disetor per 31 Desember 2020 ke Kas Daerah. Dari nilai tersebut seluruhnya telah disetor ke kas daerah pada bulan Januari tahun 2021.
3. Kas di Badan Layanan Umum Daerah adalah uang yang berada pada rekening bendahara BLUD RSUD Undata sebesar Rp1.632.029.356,23 dan RSUD Madani sebesar Rp6.070.757.961,93 yang merupakan pelampauan pendapatan tahun 2020.
4. Kas BOS sebesar Rp17.962.090.834,00 terdiri atas saldo kas Kegiatan Dana BOS 2020 sebesar Rp2.265.048.636,00, saldo kas Kegiatan Sisa Dana BOS tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp15.532.153.022,00, serta jasa giro sebesar Rp164.889.176,00.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini secara ringkas laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2020:

Tabel 5.44
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	429.938.306.420,60	439.534.795.927,97
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	429.929.141.925,60	439.594.405.001,99
3	*Sub Total (1-2)*	9.164.495,00	(59.609.074,02)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	342.200.281.164,77	429.938.306.420,60
5	*Sub Total (3+4)*	342.209.445.659,77	429.878.697.346,58
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(9.164.495,00)	59.609.074,02
7	Lain-lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		**342.200.281.164,77**	**429.938.306.420,60**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun anggaran 2020 sebesar Rp429.938.306.420,60 menurun sebesar Rp9.596.489.507,37 atau 2,18% dari tahun 2019 sebesar Rp439.534.795.927,97.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih adalah Penerimaan Pembiayaan atas penggunaan SILPA tahun 2019. Penggunaan SAL di tahun 2020 sebesar Rp429.929.141.925,60 terdapat selisih kurang dari saldo anggaran lebih awal sebesar Rp9.164.495,00. Jika dibandingkan dengan Penggunaan SAL di tahun 2019 sebesar Rp439.594.405.001,99 maka Penggunaan SAL di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp9.665.263.076,39 atau 2,20%.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2020 sebesar Rp342.200.481.164,77 mengalami penurunan sebesar Rp87.737.825.255,83 atau 20,41% dibandingkan tahun anggaran 2019 sebeesar Rp429.938.306.420,60 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.45
Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Pendapatan	4.193.329.057.130,07	4.128.153.120.869,78
Belanja dan Transfer	4.281.057.917.890,90	4.098.771.219.451,17
Surplus / (Defisit)	**(87.728.860.760,83)**	**29.381.901.418,61**
Pembiayaan Netto	429.929.141.925,60	400.556.405.001,99
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**342.200.281.164,77**	**429.938.306.420,60**

Surplus/(Defisit) sebesar (Rp87.728.860.760,83) merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama periode pelaporan, sedangkan Pembiayaan Netto sebesar Rp429.929.141.925,60 merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, merupakan koreksi atas kelebihan catat saldo akhir dana BOS periode tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.164.495,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.46
Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

No	Uraian	(Rp)
1	Sisa Kas Dana BOS	6.057.304,00
2	Jasa Giro Dana Bos	3.107.191,00
Jumlah		**9.164.495,00**

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih

Rincian saldo anggaran lebih per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp342.200.281.164,77 dan Rp429.938.306.420,60 sebagai berikut :

Tabel 5.47
Rincian Saldo Anggaran Lebih Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	316.571.833.399,24	417.476.114.225,65
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.357.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	238.480,00	-
4	Kas di BLUD	7.666.118.451,53	9.182.066.112,65
5	Kas di Bendahara BOS	17.962.090.834,00	3.164.298.483,00
6	Kas Lainnya	-	114.470.599,30
Jumlah		**342.200.281.164,77**	**429.938.306.420,60**

5.3 Neraca

Neraca adalah laporan untuk memberikan gambaran posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2020. Aset meliputi aset lancar dan non lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan

persediaan. Pos Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

5.3.1 Aset

2020	2019
Rp 6.508.588.607.883,54	**Rp6.115.056.352.683,46**

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lain-lain. Aset per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp6.508.588.607.883,54 dan Rp6.115.056.352.683,46, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48
Posisi Jumlah Aset Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Aset Lancar	452.692.767.881,08	560.297.794.057,53
Investasi Jangka Panjang	394.589.859.721,16	389.083.595.721,92
Aset Tetap	5.363.340.242.218,41	5.055.411.758.634,67
Aset Lainnya	297.965.738.062,89	110.263.204.269,34
Jumlah Aset	**6.508.588.607.883,54**	**6.115.056.352.683,46**

Tabel 5.48 menunjukan pos-pos aset per 31 Desember 2020. Nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp6.508.588.607.883,54 mengalami kenaikan sebesar Rp567.356.856.165,93 atau 9,278% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.115.056.352.683,46.

Berikut ini dapat dilihat kontribusi jenis aset terhadap total aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020.

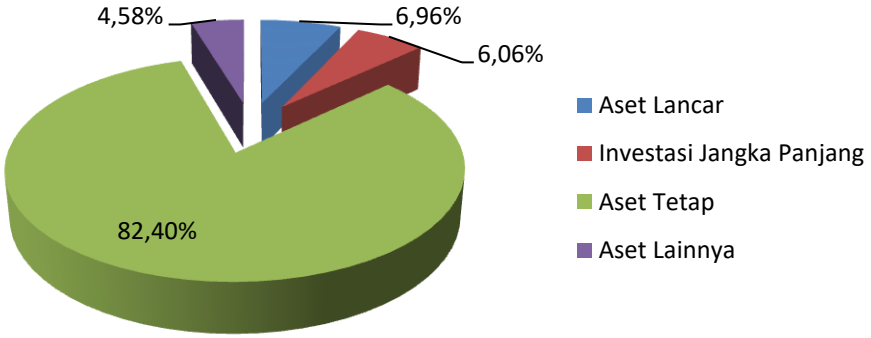

Gambar 5.6
Kontribusi Aset tahun 2020

Gambar 5.6 di atas, menunjukan bahwa tahun 2020 kontribusi terbesar atas total aset adalah Aset Tetap sebesar 82,40% dari total aset. Sedangkan kontribusi terendah atas aset adalah aset lainnya sebesar 4,58%. Investasi jangka panjang

memberikan kontribusi sebesar 6,06% terhadap total aset dan Aset lancar memberikan kontribusi sebesar 6,96% terhadap total aset.

5.3.1.1 Aset Lancar

2020	2019
Rp 452.692.767.881,08	**Rp560.297.794.057,53**

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas dan bank, piutang, penyisihan piutang, beban dibayar di muka dan persediaan. Rincian aset lancar sebagai berikut:

Tabel 5.49
Posisi Aset Lancar Tahun 2020

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Kas di Kas Daerah	316.571.833.399,24	417.477.463.604,65
Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.357.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	238.480,00	-
Kas di BLUD	7.666.118.451,53	9.182.066.112,65
Kas di Bendahara BOS	17.962.090.834,00	3.164.298.483,00
Kas Lainnya	-	114.470.599,30
Piutang Pendapatan	64.221.969.676,83	85.314.901.949,38
Piutang Lainnya	4.541.407.866,00	8.220.371.920,00
Penyisihan Piutang	(10.931.931.822,01)	(10.618.076.502,09)
Beban Dibayar Dimuka	276.235.789,33	240.035.240,00
Persediaan	52.384.805.206,15	47.200.905.650,64
Jumlah Aset Lancar	**452.692.767.881,08**	**560.297.794.057,53**

5.3.1.1.1 Kas

Kas pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Kas di Kas Daerah/Bank, Kas di Bendahara Penerimaan , Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Lainnya dan Kas di Bendahara BOS yang dicantumkan berdasarkan pada saldo Laporan Posisi Kas Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2020.

Tabel 5.50
Posisi Kas Tahun 2020

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Kas di Kas Daerah	316.571.833.399,24	417.477.463.604,65
Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.357.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	238.480,00	-
Kas di BLUD	7.666.118.451,53	9.182.066.112,65
Kas di Bendahara BOS	17.962.090.834,00	3.164.298.483,00
Kas Lainnya	-	114.470.599,30
Jumlah	**342.200.281.164,77**	**429.939.655.799,60**

a)	Kas di Kas Daerah	2020	2019
		Rp316.571.833.399,24	Rp417.477.463.604,65

Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk uang tunai dan rekening giro. Posisi saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan saldo buku sebesar Rp316.571.833.399,24 dan Rp417.447.463.604,65.

Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.51
Posisi Saldo Kas di Kas Daerah

Saldo Kas	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Kas Tunai	-	-
Kas di Bank :		
- Bank Sulteng , Rek. No. 01.03.25614-4	190.306.290.182,66	352.801.683.190,88
- Bank Sulteng, Rek. No. 01.03.00093.5	11.160.992,00	0,00
- Bank Mandiri Palu, Rek. No. 151-00-0777766-4	572.279.521,75	565.154.895,18
- Bank BRI, Rek. No. 0060.01.001658-30.5	6.597.798,00	6.784.644,00
- Bank MEGA , Rek. No. 02.131.00.11.00084-6	4.550.329,00	5.926.047,00
- Bank Mandiri Sigi, Rek. No.'151-00-0602023-1	0,00	463.965,00
- Bank BTN , Rek. No. 025.01.30.000250-0	9.287.415,10	9.287.415,10
- Bank Mandiri Palu , Rek. No. 151-00-0050060-0	125.304.998.515,00	64.051.586.496,00
- Bank Syariah Mandiri, Rek. No. 77.999.0000-3	353.799.796,73	33.771.391,49
- Bank BNI Syariah, Rek. No 71935300-8	2.868.849,00	2.805.560,00
Jumlah	**316.571.833.399,24**	**417.477.463.604,65**

Dari total saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp316.571.833.399,24, terdapat kas yang telah memiliki peruntukan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp7.151.120.605,00
b. Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp 39.470.744,00
c. Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp 413.675.500,00
d. DAK Pariwisata sebesar Rp 341.984.829,00
e. Sisa Dana BOS Reguler 2019 sebesar Rp4.298.760.000,00

Saldo kas di kas daerah merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut buku kas umum per tanggal neraca dengan saldo menurut rekening koran pada bank tersebut diatas. *Hasil Rekonsiliasi Bank disajikan pada lampiran 1.*

b)	Kas di Bendahara Penerimaan	2020	2019
		Rp0,00	Rp1.357.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan yang merupakan pendapatan daerah yang telah dipungut oleh Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp1.357.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 seluruh penerimaan daerah telah disetor ke Kas Daerah.

c)	Kas di Bendahara Pengeluaran	2020	2019
		Rp238.480,00	Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp238.480,00 dan Rp0,00, merupakan jasa giro atas rekening bank SKPD yang per 31 Desember 2020 belum disetor ke Kas Daerah. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.52
Kas di Bendahara Pengeluaran

No	SKPD	No Rekening	Per 31 Desember 2020 (RP)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	UPT Ketenagakerjaan Wilayah I	0010103000154	102.915,00	0,00
2	UPT Balai Latihan Kerja	0010103000810	50.407,00	0,00
3	UPT Dikbud Cabdis Wil. I Kota Palu dan Kab. Sigi	0010103000600	34.103,00	0,00
4	UPT Dikbud Cabdis Wil. II Kab. Donggala dan Kab. Parimo	0010103000386	7.162,00	0,00
5	UPT Dikbud Cabdis Wil. III Kab. Poso dan Kab. Touna	0010103000045	26.638,00	0,00
6	UPT Dikbud Cabdis Wil. IV Kab. Morowali dan Morut	0010103000714	15.113,00	0,00
7	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	0010103001042	2.142,00	0,00
	JUMLAH		**238.480,00**	**0,00**

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor seluruhnya ke kas daerah pada bulan Januari 2021. *Rincian posisi kas di bendahara pengeluaran disajikan pada lampiran 2.*

		2020	2019
d)	**Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**	**Rp7.666.118.451,53**	**Rp9.182.066.112,65**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai dua Badan Layanan Umum Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Kas di BLUD merupakan saldo kas pada RSUD Undata dan RSUD Madani. Kas di BLUD Per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp7.666.118.451,53 dan Rp9.182.066.112,65. Sisa Kas di BLUD merupakan pelampauan pendapatan tahun 2020 yang belum digunakan oleh kedua rumah sakit.

Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.53
Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Kas di BLUD RSUD. Undata	1.595.360.489,60	4.296.011.475,37
Kas di BLUD RSUD. Madani	6.070.757.961,93	4.886.054.637,28
Jumlah	**7.666.118.451,53**	**9.182.066.112,65**

1. Kas di BLUD RSUD Undata

   Kas di BLUD pada RSUD Undata per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.595.360.489,60 dan Rp4.296.011.475,37 merupakan saldo kas di Bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54
Kas di BLUD Undata

NO	Uraian	No Rekening	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Posisi Kas Bank				
1	BNI	82058909	11.585.112,00	242.001.558,00
2	BRI Bumi Nyiur	5180-01-022438-53-3	130,72	130,72
3	Mandiri	151-001-817-161-8	178.954.523,18	2.058.438.281,84
4	Bank Sulteng	001.010.325.816-6	38.807,00	-
5	Bank Sulteng	001.010.325.812-8	1.188.359.566,11	551.043.166,11
6	Bank Sulteng	001.010.326.096-3	253.091.217,22	1.535.826.783,64
7	Selisih Saldo Kas/Buku		-	-
Jumlah Kas Bank			**1.632.029.356,23**	**4.387.309.920,31**
Outstanding check/BG			**(36.668.866,63)**	(91.398.515,69)
Kelebihan Pencairan Cek Oleh Bank			**-**	100.070,75
Posisi Kas BLUD Undata			**1.595.360.489,60**	**4.296.011.475,37**

2. Kas di BLUD RSUD Madani

Kas di BLUD pada RSUD Madani per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp6.070.757.961,93 dan Rp4.886.054.637,28. Rincian Kas di BLUD pada RSUD Madani sebagai berikut:

Tabel 5.55
Kas di BLUD Madani

No	Uraian	No Rekening	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1.	**Kas Tunai**		**85.771.469,44**	**31.483.302,34**
2.	**Kas Bank :**			
	Bank Sulteng	001-01-03-25850-6	2.716.327.319,00	1.060.401.536,00
	Mandiri	151-00-1005363-2	2.663.772.103,54	56.303.852,70
	Mandiri	151-00-1215714-2	0,00	3.081.781.839,00
	Bank Sulteng	001-01-03-25849-0	215.682.607,00	47.959.145,00
	Mandiri	151-00-1005378-0	834.841.986,95	608.124.962,24
	Jumlah Kas Bank		**6.430.624.016,49**	**4.854.571.334,94**
3.	**Outstanding Check/BG**		**(445.637.524,00)**	**0,00**
4.	**Posisi Kas BLUD Madani**		**6.070.757.961,93**	**4.886.054.637,28**

Rincian posisi kas di BLUD disajikan pada lampiran 3.

		2020	2019
e)	**Kas di Bendahara BOS**	**Rp17.962.090.834,00**	**Rp3.164.298.483,00**

Saldo Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas pada Bendahara BOS satuan pendidikan SMA/SMK/SLB Se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp17.962.090.834,00 dan Rp3.164.298.483,00 dengan rincian :

Tabel 5.56
Kas di Bendahara BOS

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Sisa kas pada kegiatan dana BOS tahun berjalan	2.265.048.636,00	1.753.039.958,00
Sisa kas pada kegiatan sisa dana BOS tahun sebelumnya	15.532.153.022,00	1.411.258.525,00
Jasa Giro	164.889.176,00	-
Jumlah	**17.962.090.834,00**	**3.164.298.483,00**

Mutasi Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Awal Per 31 Desember 2019		**3.164.298.483,00**
Mutasi Tambah		
- Ditransfer dari Pusat	169.032.190.000,00	
- Ditransfer dari Kas Daerah	32.408.520.000,00	
- Temuan Inspektorat	104.380.307,00	
- Jasa Giro	164.889.176,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**201.709.979.483,00**
Mutasi Kurang		
- Koreksi Kurang Kas di Bendahara BOS	(6.057.304,00)	
- Realisasi Belanja BOS 2020	(166.767.141.364,00)	
- Realisasi Belanja Sisa BOS 2019	(19.724.668.464,00)	
- Setor ke Kas Daerah	(414.320.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(186.912.187.132,00)
Saldo Awal Per 31 Desember 2020		**17.962.090.834,00**

1. Saldo awal per 31 Desember 2019 merupakan saldo hasil audited tahun 2019 sebesar Rp3.164.298.483.
2. Mutasi Tambah sebesar Rp201.709.979.483,00 terdiri dari:
   - Jumlah dana BOS yang langsung ditransfer dari Pemerintah Pusat ke rekening satuan pendidikan sebesar Rp169.032.190.000,00 berupa:
     - BOS Reguler Rp162.192.190.000,00
     - BOS Kinerja Rp 4.020.000.000,00
     - BOS Afirmasi Rp 2.820.000.000,00

       Rp169.032.190.000,00
   - Metode penyaluran dana BOS dari Kas Daerah dilakukan per tahap yang di transfer ke rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian diteruskan ke rekening masing-masing sekolah. Jumlah dana BOS yang ditransfer dari Kas Daerah sebesar Rp32.408.502.000,00 terdiri dari:
     - Bos Reguler Rp 1.090.520.000,00
     - Bos Kinerja Rp14.556.000.000,00
     - Bos Afirmasi Rp16.762.000.000,00

       Rp32.408.520.000,00
   - Temuan Inspektorat merupakan setoran pengembalian dana BOS oleh pihak sekolah akibat adanya temuan pengelolaan dana BOS oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp104.380.307,00.
   - Jasa Giro dana BOS 2020 sebesar Rp164.889.176,00 merupakan akumulasi dari sisa jasa giro tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke Kas Daerah. Namun pada tanggal 28

Februari 2021 telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp162.654.423,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tahun	Jasa Giro (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)
2016	1.696.539,00	384.522,00	1.312.017,00
2018	329.034,00	222.782,00	106.252,00
2019	162.676,00	150.030,00	12.646,00
2020	162.700.927,00	161.897.089,00	803.838,00
TOTAL	**164.889.176,00**	**162.654.423,00**	**2.234.753,00**

Tabel 5.57
Rekapitulasi Jasa Giro Dana BOS tahun 2020

No.	Kab/Kota	Jasa Giro Per 31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi			Jasa Giro Per 31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Koreksi (Rp)	
1	Palu	33.468.887,00	54.187.751,00	33.409.551,00		54.247.087,00
2	Parigi Moutong	10.666.563,00	21.313.905,00	10.666.563,00		21.313.905,00
3	Sigi	7.000.575,00	9.428.879,00	7.000.575,00		9.428.879,00
4	Donggala	16.906.529,22	19.536.918,00	16.906.529,22		19.536.918,00
5	Poso	2.060.581,00	-	1.726.935,00		333.646,00
6	Tojo Una-Una	8.182.692,78	10.827.990,00	7.414.206,78	200.000,00	11.396.476,00
7	Morowali	3.246.559,00	718.011,00	3.110.509,00		854.061,00
8	Morowali Utara	3.178.343,74	6.787.354,00	3.178.343,74		6.787.354,00
9	Banggai	2.388.763,00	192.820,00	2.112.926,00	12.762,00	455.895,00
10	Banggai Kepulauan	5.781.829,00	5.166.585,00	4.954.173,00		5.994.241,00
11	Banggai Laut	4.419.679,00	3.287.428,00	1.525.250,00	2.894.429,00	3.287.428,00
12	Tolitoli	11.879.542,00	25.131.158,00	11.879.542,00		25.131.158,00
13	Buol	4.910.526,56	6.122.128,00	4.910.526,56		6.122.128,00
	TOTAL	**114.091.070,30**	**162.700.927,00**	**108.795.630,30**	**3.107.191,00**	**164.889.176,00**

Lebih rinci jasa giro dana BOS dapat dilihat pada Lampiran 4.

3. Mutasi Kurang sebesar Rp186.912.187.132,00 terdiri dari :
   - Koreksi kurang Kas di Bendahara BOS sebesar Rp6.057.304,00 merupakan koreksi kas atas kesalahan penyajian kas tahun sebelumnya pada SMAN 1 Banawa Kab. Donggala.
   - Realisasi Belanja BOS 2020 sebesar Rp166.767.141.364,00 merupakan jumlah realisasi Belanja BOS atas penyaluran BOS tahun 2020 oleh pemerintah pusat.
   - Realisasi Belanja Sisa BOS 2019 sebesar Rp19.724.668.464,00 merupakan jumlah realisasi belanja BOS atas penggunaan sisa dana BOS tahun 2019 di tahun 2020.
   - Setor ke Kas Daerah sebesar Rp414.320.000,00 merupakan pengembalian pihak sekolah akibat adanya kesalahan transfer dana BOS tahun 2019.

Penerimaan dan Belanja Dana BOS atas kegiatan Dana BOS dan Kegiatan Sisa Dana BOS 2019 pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB se-Provinsi Sulawesi Tengah disajikan berdasarkan hasil rekon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Lebih rinci Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada lampiran 5, 5a, 5b, 5c, 6, 6a, 6b dan 6c.

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Piutang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibagi dalam dua kategori piutang, yaitu; Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya.

Tabel 5.58
Piutang Berdasarkan Kategori

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Piutang Pendapatan	64.221.969.676,83	85.314.901.949,38
2	Piutang Lainnya	4.541.407.866,00	8.220.371.920,00
	Jumlah	**68.763.377.542,83**	**93.535.273.869,38**

		2020	2019
a)	**Piutang Pendapatan**	**Rp 64.221.969.676,83**	**Rp 85.314.901.949,38**

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp64.221.969.676,83 dan Rp85.314.901.949,38 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.59
Rincian Piutang Pendapatan

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	23.394.913.127,10	22.497.020.507,00
2	Piutang Retribusi	234.978.950,00	482.970.800,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	40.592.077.599,73	62.334.910.642,38
	Jumlah	**64.221.969.676,83**	**85.314.901.949,38**

Penambahan dan pengurangan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 Rp64.221.969.676,83 sebagai berikut :

Tabel 5.60
Perubahan Saldo Piutang Pendapatan

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2020 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Piutang Pajak Daerah	22.497.020.507,00	23.038.067.570,10	22.140.174.950,00	23.394.913.127,10
2	Piutang Retribusi	482.970.800,00	234.978.950,00	482.970.800,00	234.978.950,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	62.334.910.642,38	110.959.329.684,71	132.702.162.727,36	40.592.077.599,73
	Jumlah	**85.314.901.949,38**	**134.232.376.204,81**	**155.325.308.477,36**	**64.221.969.676,83**

Daftar rincian mutasi piutang disajikan pada lampiran 7.

Berdasarkan Tabel 5.60 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat saldo Piutang Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp85.314.901.949,38 dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp21.092.932.272,55. Penurunan tersebut disebabkan turunnya jumlah piutang yang merupakan hak klaim pemerintah kepada wajib pajak dan wajib pungut retribusi yang telah jatuh tempo per 31 desember 2020.

Disisi lain pada tahun 2020 nilai pengurangan piutang sebesar Rp155.325.308.477,36 yang merupakan setoran pelunasan atas piutang tahun sebelumnya ke kas daerah dan koreksi pencatatan piutang tahun sebelumnya. Sehingga per 31 Desember 2020 masih terdapat sisa piutang yang belum tertagih sebesar Rp64.221.969.676,83. Penjelasan rincian piutang pendapatan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp23.394.913.127,10 dan Rp22.497.020.507,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61
Rincian Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	195.938.107,00	217.512.207,00
2	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.682.311.681,00	21.367.887.722,00
3	Piuang Pajak Air Permukaan	1.516.663.339,10	911.620.578,00
	Jumlah	**23.394.913.127,10**	**22.497.020.507,00**

a) Piutang Pajak Kendaraan Bemotor (PKB)

Piutang PKB merupakan piutang atas tunggakan Pajak Kendaraan Bemotor yang telah jatuh tempo, hingga per 31 Desember 2020 belum dilakukan pembayaran oleh wajib pajak. Piutang PKB sebesar Rp195.938.107,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Pajak Kendaraan Baru Rp 88.067.600,00
- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat
  - UPTB Wilayah I Palu Rp 93.471.007,00
  - UPTB Wilayah IV Morowali Rp 14.399.500,00

b) Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Piutang PBB-KB per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.682.311.681,00 dengan rincian sebagai berikut :

- PT Pertamina Persero	Rp	19.559.034.320,00
- PT AKR Corporindo	Rp	90.495.044,00
- PT Elnusa Petrofin	Rp	83.670.058,00
- PT Pertamina Patra Niaga	Rp	734.389.141,00
- PT Multi Tranding Pratama	Rp	15.922.972,00
- PT Indo Lautan Energi	Rp	275.737.649,00
- PT Global Arta Borneo	Rp	118.749.375,00
- PT Global Borneo Energi	Rp	755.945.232,00
- PT Mitra Utama Energi	Rp	48.367.890,00

c) Piutang Pajak Air Permukaan

Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.516.663.339,10 dengan rincian sebagai berikut :

- PDAM Donggala	Rp	2.227.820,00
- PDAM Uwe Lino Kota Palu	Rp	12.837.975,00
- PDAM Uwe Lino Donggala	Rp	904.725,00
- PLTM Tomini	Rp	59.695.000,00
- PDAM Kab Poso	Rp	823.975,00
- Poso Energy (BUKAKA)	Rp	747.182.982,00
- PT PLN (Persero)	Rp	4.832.760,00
- PT Arkora Sulsel	Rp	97.474.662,10
- PT Sakita Hydro Power	Rp	7.885.510,00
- PT Tamaco Graha Krida	Rp	1.267.325,00
- PT IMIP/PT Sulawesi Mining Investment	Rp	4.559.400,00
- PT Agro Nusa Abadi (Morowali Utara)	Rp	1.141.850,00
- PT Hentraco Indo Perkasa	Rp	32.135.310,00
- PT Timur Jaya Indo Makmur	Rp	553.200,00
- PT Buminata PLTM Hanga-Hanga Ii	Rp	10.867.600,00
- PT Bumi Nata PLTM Kalumpang	Rp	5.781.800,00
- PT PLN (Persero) Cab. Luwuk	Rp	2.686.800,00
- PDAM Kab Banggai	Rp	163.301.950,00
- PT Adis Putra Pratama/PLTM Hek 2015	Rp	43.976.200,00
- PT Kurnia Luwuk Sejati	Rp	280.500,00
- PLTM Lambangan	Rp	108.480.100,00

-	PDAM Banggai Laut	Rp	19.669.125,00
-	PDAM Bangkep (Pospel Salakan)	Rp	87.454.125,00
-	PDAM Ogomalane	Rp	5.158.450,00
-	PT.PLN Persero	Rp	5.526.400,00
-	PT Cipta Cakra Murdaya (CCM)	Rp	714.600,00
-	PDAM Touna	Rp	501.350,00
-	PLTM Sansarino	Rp	4.407.300,00
-	PLTM Bambalo (Manado)	Rp	80.768.070,00
-	PDAM Uwe Lino Kab Donggala	Rp	2.750.725,00
-	PDAM Uwe Lino Donggala (Sumber Air Wil. Kab Sigi)	Rp	815.750,00

2. Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp234.978.950,00 dan Rp482.970.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62
Rincian Piutang Retribusi

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.600.000,00	4.400.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	47.110.950,00	254.717.800,00
Piuang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	183.268.000,00	223.853.000,00
Jumlah	**234.978.950,00**	**482.970.800,00**

a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

-	RSUD Undata	Rp	450.000,00
-	RSUD Anutapura	Rp	3.600.000,00
-	RS Samaritan	Rp	400.000,00
-	RSU Torabelo	Rp	150.000,00

b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp47.110.950,00 dengan rincian sebagai berikut :

-	PT Karya Anuntolufu	Rp	10.096.000,00
-	PT Pilar Sejati	Rp	1.150.000,00
-	PT Nusantara Raya Konstruksi	Rp	2.875.000,00
-	PT Surya Baru Cemerlang	Rp	7.100.000,00
-	CV Sari Nugraha	Rp	7.615.000,00
-	CV Mega Karsa	Rp	5.631.750,00
-	CV Tegar Jaya	Rp	1.300.000,00

- CV Eden	Rp	400.000,00
- Penangkar Inti Persada	Rp	875.700,00
- I Wayan Damai	Rp	937.500,00
- CV Mega Karsa	Rp	1.160.000,00
- CV Devana Najwa	Rp	2.520.000,00
- CV Mitra Sejati Tolis	Rp	200.000,00
- Sukri	Rp	1.170.000,00
- Rustan Efendi	Rp	1.215.000,00
- Hasmar	Rp	1.035.000,00
- Hijra Ulla	Rp	1.080.000,00
- CV Makmur	Rp	750.000,00

c) Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan per 31 Desember 2020 sebesar Rp183.268.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- PPI Donggala	Rp	80.340.000,00
- PPI Ogotua	Rp	68.573.000,00
- PPI Paranggi	Rp	2.285.000,00
- PPI Pagimana	Rp	10.560.000,00
- PPI Kolonodale	Rp	21.510.000,00

3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp40.592.077.599,73 dan Rp62.334.910.642,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	613.856.000,00	909.570.000,00
2	Piuang BLUD	39.978.221.599,73	61.425.340.642,38
	Jumlah	**40.592.077.599,73**	**62.334.910.642,38**

a) Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah merupakan piutang atas sewa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp613.856.000,00 yang terbagi pada beberapa SKPD sebagai pengelola aset tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Rp 29.730.000,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 191.940.000,00
- Dinas Sosial	Rp 44.680.000,00
- Dinas Kehutanan	Rp 51.780.000,00
- Dinas Kesehatan (UPT BPPK)	Rp 6.760.000,00
- Dinas Perhubungan	Rp 41.040.000,00
- Dinas Koperasi	Rp 150.000,00
- Sekretariat Daerah - Biro Umum	Rp 174.000.000,00
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 73.776.000,00

b) Piutang BLUD

Piutang BLUD Per 31 Desember 2020 sejumlah Rp39.978.221.599,73 merupakan saldo piutang dari dua rumah sakit pemerintah yaitu RSUD Madani dan RSUD Undata dengan rincian sebagai berikut:

1) Piutang BLUD pada RSUD Madani per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp23.417.054.763,73 dan Rp 14.253.691.541,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64
Piutang BLUD RSUD Madani

Jenis Piutang	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
- Jamkesprov	13.383.700,00	418.159.400,00
- BPJS KESEHATAN	1.869.535.217,00	13.117.872.315,00
- BPJS Ketenagakerjaan	9.088.996,00	5.594.858,00
- Jasa Raharja	2.509.559,86	12.305.004,86
- Pasien Tunai/ Pasien Lari	757.036.043,87	591.397.741,52
- Askes Komersil/INHEALTH	-	3.942.037,00
- PT. Bank Sulteng	0,00	0,00
- Jampersal Donggala	80.329.727,00	80.329.727,00
- Jampersal Kota Palu	18.400,00	2.923.914,00
- Jamkesda Sigi	46.477.900,00	0,00
- Jamkesda Poso	51.521.989,00	0,00
- Jamkesda Parigi Moutong	52.892.487,00	0,00
- Klaim Covid-19	20.513.094.200,00	0,00
- NAPZA	21.166.544,00	21.166.544,00
Jumlah	**23.417.054.763,73**	**14.253.691.541,38**

2) Piutang BLUD pada RSUD Undata per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp16.561.166.836,00 dan Rp47.171.649.101,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65
Piutang BLUD RSUD Undata

Jenis Piutang	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
- Jamkesprov	459.377.913,00	1.323.759.877,00
- BPJS Kesehatan	8.624.679.144,00	40.639.208.291,00
- Jasa Raharja	437.340.861,00	2.204.730.942,00
- INHEALTH	42.018.786,00	40.538.781,00
- BPJS Ketenagakerjaan	23.639.152,00	254.141.161,00
- Jampersal	465.039.442,00	375.410.306,00
- KPU	4.507.852,00	4.507.852,00
- Morowali Utara	490.895,00	490.895,00
- DINKES Morowali Utara (MORUT Sehat)	4.105.900,00	4.105.900,00
- PT Agro Nusa Abadi	2.226.345,00	2.226.345,00
- PT Cipta Agro Nusantara	977,00	977,00
- PT Lestari Tani Teladan	3.349.797,00	0,00
- PT. Letawa	11.154.167,00	21.892.957,00
- PT. Pasang Kayu	739.948,00	13.643.780,00
- PT. Rimbunan Alam Sentosa	3.130.693,00	3.130.693,00
- PT. Sawit Jaya Abadi	418.369,00	418.369,00
- PT. PERTAMINA	31.638.250,00	13.959.386,00
- PT. Telkom	779.359,00	2.450.762,00
- RS BHAYANGKARA Polda Sulteng	17.734.504,00	46.966.287,00
- RS SAMARITAN	454.000,00	454.000,00
- RS Torabelo	10.000,00	10.000,00
- RS Woodward	43.946.105,00	4.321.105,00
- RSU Anutapura	91.725.000,00	91.725.000,00
- Korban Bencana PASIGALA	0,00	312.862.850,00
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	0,00	453.780,00
- Setda Kab. Donggala	47.659.718,00	47.659.718,00
- TB-MDR Dinkes Propinsi	3.062.000,00	0,00
- Jamkesda	211.424.006,00	0,00
- Kemenkes (Covid-19)	4.206.858.900,00	0,00
- PT. Laboratorium Klinik Prodia	35.938.100,00	0,00
- PT. Taspen	25.137.566,00	0,00
- KPU Kab. Tolitoli	0,00	0,00
- Pasien Lari / Tidak Mampu	1.441.849.010,00	1.441.849.010,00
- Askes Sosial	700.000,00	700.000,00
- Jamsostek	18.599.687,00	18.599.687,00
- Bumi Putera	75.000,00	75.000,00
- Jamkesmas	182.351.214,00	182.351.214,00
- Nakertrans Provinsi	41.301.582,00	41.301.582,00
- Nakertrans Donggala	876.663,00	876.663,00
- PLN	41.196.509,00	41.196.509,00
- PLN Tragi	495.000,00	495.000,00
- Koperasi PLN	1.511.884,00	1.511.884,00
- Jamkesda Askes	229.003,00	229.003,00
- Jamkesda Obat	33.393.535,00	33.393.535,00
Jumlah	**16.561.166.836,00**	**47.171.649.101,00**

b)	Piutang Lainnya	2020	2019
		Rp 4.541.407.866,00	Rp 8.220.371.920,00

Piutang pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp4.541.407.866,00 dan Rp8.220.371.920,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.66
Rincian Piutang Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.198.970,00	3.597.440.025,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.093.628.896,00	1.093.628.896,00
Piutang Lain-lain	3.442.580.000,00	3.529.302.999,00
Jumlah	**4.541.407.866,00**	**8.220.371.920,00**

1. Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

   Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan piutang tagihan penjualan angsuran dinas yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.198.970,00. Penurunan Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran secara signifikan ditahun 2020 disebabkan atas adanya reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp3.509.998.075,00 dan penerimaan pembayaran sebesar Rp87.441.950,00.

2. Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

   Piutang Bagian Lancar TGR daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.093.628.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67
Piutang Bagian Lancar TGR 2020

Uraian	Nilai (Rp)
LPMP Provinsi Sulawesi Tengah	74.833.350,00
UPTD Pendapatan Wil. VI Morowali	319.348.546,00
Pos Pelayanan Kotaraya	699.447.000,00
Jumlah	**1.093.628.896,00**

Berdasarkan tabel 5.64 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Piutang atas nama Adnan M. Baralemba atas kasus pelaksanaan pada LPMP Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp74.833.350,00.
- Piutang UPTB Morowali (Badan Pendapatan) sebesar Rp319.348.546,00 merupakan SKTJM pada pada piutang pajak kendaraan roda empat.

- Piutang UPTB Parigi Moutong (Badan Pendapatan) sebesar Rp699.447.000,00 merupakan SKTJM piutang pajak kendaraan roda empat.

4. Piutang Lain-Lain

Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.442.580.000,00 yang terdiri dari :

Tunjangan Insentif PP.37	Rp	3.440.780.000,00
Piutang Kelebihan Pembayaran	Rp	1.800.000,00
Jumlah	**Rp**	**3.442.580.000,00**

- Tunjangan Insentif PP 37 sebesar Rp3.440.780.000,00 merupakan sisa panjar uang muka untuk Tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006. Tunjangan tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Saldo tersebut merupakan sisa tunjangan yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sampai dengan akhir Desember 2020.
- Kelebihan pembayaran merupakan kelebihan atas pembayaran kontrak pengadaan peralatan dan mesin pada kantor BPKAD sebesar Rp1.800.000,00. Kelebihan atas pembayaran telah disetor kembali ke Kas Daerah pada tanggal 25 Januari 2021 dengan nomor STS 388/2021.

Rincian piutang tunjangan insentif PP.37 dapat dilihat pada lampiran 8.

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang	**2020**	**2019**
	Rp10.931.931.822,01	**Rp10.618.076.502,09**

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5%.
b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10%.
c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50%.

d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100%.

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp10.931.931.822,01 dan Rp10.618.076.502,09 dengn rincian sebagai berikut :

Tabel 5.68
Penyisihan Piutang

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Penyisihan Piutang Pendapatan		**6.392.314.956,01**	**2.397.704.582,09**
1	Penyisihan Piutang Pajak	290.856.537,23	447.797.161,50
2	Penyisihan Piutang Retribusi	18.180.543,74	2.414.854,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.083.277.875,04	1.947.492.566,59
Penyisihan Piutang Lainnya		**4.539.616.866,00**	**8.220.371.920,00**
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.198.970,00	3.597.440.025,00
2	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.093.628.896,00	1.093.628.896,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain	3.440.789.000,00	3.529.302.999,00
Jumlah		**10.931.931.822,01**	**10.618.076.502,09**

Rincian perhitungan penyisihan piutang disajikan pada lampiran 9,10,11,12.

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka	**2020**	**2019**
	Rp276.235.789,33	**Rp240.035.240,00**

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

Terkait dengan Beban Dibayar Dimuka dalam laporan neraca pemerintah daerah menggambarkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dikeluarkan mendahului penerima asas manfaat aset dengan nilai yang dikeluarkan.

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp276.235.789,33 dan Rp240.035.240,00 dengn rincian sebagai berikut :

Tabel 5.69
Rincian Beban Dibayar Dimuka

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka	103.839.956,00	101.752.255,00
2	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Dibayar Dimuka	-	44.371.318,33
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir Dibayar Dimuka	147.750.000,00	93.911.666,67
4	Beban Barang dan Jasa BLUD Dibayar Dimuka	24.645.833,33	-
Jumlah		**276.235.789,33**	**240.035.240,00**

Rincian beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp276.235.789,33 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka

   Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka sebesar Rp103.839.956,00 merupakan premi asuransi barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan perjanjian 098/PERJ/AAS/2020 tanggal mulai pernjanjian 12 Desember 2020 sampai dengan 12 Desember 2021.

b. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Dibayar Dimuka

   Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Dibayar Dimuka di tahun 2020 sebesar Rp0,00. Hal tersebut disebabkan karena Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Dibayar Dimuka berupa pembayaran PKB atas kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memenuhi definisi sebagai beban dibayar dimuka, sehingga pada tahun 2020 pembayaran PKB atas kendaraan dinas tersebut seluruhnya dibebankan pada tahun berjalan.

c. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Dibayar Dimuka

   Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Dibayar Dimuka sebesar Rp147.750.000,00 terdiri pada :

   1) Badan Pendapatan Daerah

      Beban dibayar dimuka pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp85.416.666,67 terdiri dari :

      - Sewa rumah dinas pegawai pada UPTD Samsat di Wilayah VI Banggai Kepulauan sebesar Rp12.500.000,00 sesuai perjanjian sewa nomor 011/0902/MESS/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020;
      - Sewa gedung kantor pada UPTD Samsat di Wilayah Salakan, Banggai Kepulauan sebesar Rp15.000.000,00 sesuai perjanjian sewa nomor 011/0903/POSYAN/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020;
      - Sewa gedung kantor pada UPTD Samsat di Wilayah Toili, Banggai sebesar Rp20.416.666,67 sesuai perjanjian sewa nomor 011/0904/POSYAN/VIII/2020 Tanggal 03 Agustus 2020; dan
      - Sewa gedung kantor pada UPTD Samsat di Wilayah Sigi, Kab. Sigi sebesar Rp37.500.000. sesuai perjanjian sewa nomor 011/0905/POSYAN/VIII/2020 Tanggal 14 Agustus 2020

2) Badan Penghubung

Beban dibayar dimuka pada Badan Penghubung sebesar Rp18.000.000 merupakan sewa rumah jabatan Kepala Badan Pehubung.

3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Beban dibayar dimuka pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp15.166.666,67 terdiri dari :

1. Sewa rumah jabatan / rumah dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah III sebesar Rp3.500.000,00 sesuai perjanjian sewa nomor 027/0201-SEK/Cabdis Wil III/DESDM Tanggal 2 Maret 2020;
2. Sewa rumah jabatan / rumah dinas Cabang Dinas ESDM Wilayah II Poso dan Tojo Una-Una sebesar Rp6.666.666,67 sesuai perjanjian sewa nomor 877/04/Cabdis Wil. II/SP/2020 Tanggal 17 Februari 2020;
3. Sewa gedung Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah V sebesar Rp5.000.000,00 sesuai perjanjian sewa nomor 027/004/Cabdis Wil V/DESDM/2020 Tanggal 03 Februari 2020.

4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Beban sewa gedung / kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp29.166.666,66 terdiri dari:

1. Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una sebesar Rp8.333.333,33;
2. Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II Kabupaten Parigi Moutong dan Donggala sebesar Rp8.333.333,33; dan
3. Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I Kota Palu dan Kabupaten Sigi sebesar Rp12.500.000.

d. Beban Barang dan Jasa BLUD Dibayar Dimuka

Beban Barang dan Jasa BLUD Dibayar Dimuka merupakan Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas dokter pada RSUD Undata sebesar Rp24.645.833,33 merupakan sewa rumah jabatan/rumah dinas dokter sesuai perjanjian sewa nomor 440 / 1411 / RSUD UNDATA dan nomor 440 / 9604 / RSUD UNDATA

Rincian beban dibayar dimuka disajikan pada lampiran 13.

5.3.1.1.5 Persediaan

2020	2019
Rp52.384.805.206,15	Rp47.200.905.650,64

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp52.384.805.206,15 dan Rp47.200.905.650,64. Persediaan per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp5.183.899.555,51 atau 10,98% dari tahun 2019. Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 telah berdasarkan Berita Acara Stok Opname Fisik Persediaan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.70
Posisi Persediaan Per 31 Desember 2020 Dan 2019

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Persediaan Bahan Pakai Habis	19.234.847.241,15	47.200.215.650,64
Persediaan Bahan Tidak Pakai Habis	-	690.000,00
Persediaan Barang Lainnya	33.149.957.965,00	-
Jumlah	**52.384.805.206,15**	**47.200.905.650,64**

Total persediaan per 31 Desember 2020 tersebut bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp28.002.539.763,85 yang merupakan sisa stock bantuan dari pemerintah pusat berupa barang yag akan diserahkan kepada masyarakat. Persediaan yang bersumber dari APBN berada pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggunglangan Bencana sebesar Rp5.676.720.000,00 dan Dinas Kesehatan Rp22.325.819.763,85 yang merupakan Dana Bantuan Covid-19 berupa Obat-obatan dan BMHP.
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp24.382.265.442,30 merupakan sisa stock dari belanja barang pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.71
Daftar Per Jenis Barang Persediaan tahun 2020

No	Uraian	Jumah (Rp)
1	ATK	4.016.883.396,10
2	Alat Listrik	456.534.790,00
3	Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	3.126.000,00
4	Alat Kebersihan	494.909.939,00
5	BBM	8.219.000,00
6	Bibit	16.600.000,00
7	Obat2an Dan Alkes	6.836.846.739,68
8	Bahan Kimia	36.450.630,50
9	Bahan Praktek	4.227.840.108,22
10	Alat Peraga	57.358.870,00
11	Perlengkapan Olahraga	275.000,00
12	Perabot Kantor	72.183.720,00
13	Bahan Komputer	70.976.250,00
14	Barang Cetak	832.872.358,00
15	Bahan Makanan	1.207.393.242,00
16	Bahan Kemasan	261.406.175,00
17	Pakan Terapung	131.776.250,00
18	Bahan Pangan	251.558.308,00
19	Bahan Pakaian	242.899.685,80
20	Barang yang di serahkan ke masyarakat	33.158.694.743,85
	TOTAL	**52.384.805.206,15**

Tabel diatas menunjukkan bahwa persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat merupakan persediaan dengan nilai yang tertinggi sebesar Rp33.158.694.743,85. Persediaan barang yang di serahkan ke masyarakan terdiri dari:

a. Persediaan berupa bantuan bencana sebesar Rp5.995.579.980,00.
b. Persediaan barang bantuan Covid-19 sebesar Rp Rp22.325.819.763,85.
c. Persediaan berupa bantuan Hunian Tetap bagi warga masyarakat yang tertimpa bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami tahun 2018 sebesar Rp4.837.295.000,00 dalam bentuk Pembangunan Rumah Korban Akibat Bencana Alam Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Telah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Sigi berdasarkan berita acara penyerahan tertanggal 8 Januari 2021.

Selain nilai persediaan yang tersajikan pada laporan di atas, terdapat persediaan akhir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tidak memiliki nilai perolehan. Persediaan tersebut merupakan barang yang bersumber dari APBN, yang pada saat diserahkan barang bantuan tersebut tidak disertai dengan Nilai Perolehan.

Selama periode 1 januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat beberapa barang yang dalam dalam kondisi rusak dan usang/kadaluarsa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.72
Rekapitulasi Persediaan Rusak dan Usang/Kadaluarsa
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Obat (Rp)	BMHP (Rp)	Barang Cetak (Rp)	Total (Rp)
Dinas Kesehatan	1.191.597.547,98	57.500.000,00	-	1.249.097.547,98
UPT. RSUD Undata	20.507.303,33	13.977.231,00	-	34.484.534,33
UPT. RSUD Madani	29.341.142,83	4.015.000,00	-	33.356.142,83
Badan Pendapatan	-	-	268.822.350,00	268.822.350,00
TOTAL	**1.241.445.994,14**	**75.492.231,00**	**268.822.350,00**	**1.585.760.575,14**

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 14, 15,16 dan 17

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

2020	2019
Rp394.589.859.721,16	**Rp389.083.595.721,92**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen, dimana Investasi Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, Investasi Non Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 12 bulan.

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp394.589.859.721,16 dan 389.083.595.721,92, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73
Jenis Investasi Jangka Panjang

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Penyertaan Modal kepada BUMD	**393.329.859.721,16**	**387.823.595.721,92**
- PT. Pembangunan Sulawesi Tengah	18.818.539.270,36	26.534.262.718,99
- PT. BPD Sulawesi Tengah	372.761.320.450,80	359.539.333.002,93
- PT. Bangun Palu	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta	**1.260.000.000,00**	**1.260.000.000,00**
- PT. Bangun Askrida	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00
Jumlah	**394.589.859.721,16**	**389.083.595.721,92**

Tahun anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak melakukan penambahan invenstasi/penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta. Namun demikian nilai akhir investasi jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp394.589.859.721,16 nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.506.263.999,24 atau 1,42%.

Peningkatan nilai Investasi Jangka Panjang di tahun 2020 disebabkan oleh metode perhitungan investasi. Penentuan metode perhitungan investasi didasarkan pada nilai kepemilikan modal dan memiliki pengaruh yang signifikan. Berikut rincian nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2020:

Tabel 5.74
Investasi Permanen

Jenis Investasi	Saldo awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
PT Pembangunan Sulteng	26.534.262.718,99	-	7.715.723.448,63	18.818.539.270,36
PT Bank Sulteng	359.539.333.002,93	66.552.692.440,32	53.330.704.992,45	372.761.320.450,80
PT Bangun Palu	1.750.000.000,00	-	-	1.750.000.000,00
PT Asuransi Bangun Askrida	1.260.000.000,00	-	-	1.260.000.000,00
Jumlah	**389.083.595.721,92**	**66.552.692.440,32**	**61.046.428.441,08**	**394.589.859.721,16**

Berdasarkan tabel 5.71, total investasi permanen per 1 Januari 2020 sebesar Rp389.083.595.721,92. Selama tahun 2020 terjadi penambahan sebesar Rp66.552.692.440,32 dan pengurangan sebesar Rp61.046.428.441,08 sehingga nilai akhir Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp394.589.859.721,16 dengan penjelasan sebagai berikut:

1) PT Pembangunan Sulteng

Perhitungan penilaian investasi pada PT Pembangunan Sulteng menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki/menguasai jumlah saham diatas 50% dan memiliki kedudukan yang dominan dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2013 terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD Sulteng) menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah (PT Pembangunan Sulteng) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 Tanggal 13 Juni 2013. Dan pada tahun 2014 dilakukan perubahan kembali atas Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah Nomor

14 tahun 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Perubahan bentuk hukum perusahaan daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut tentang PT Pembangunan Sulteng bahwa sesuai berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa perseroan terbatas PT Pembangunan Sulteng tanggal Nomor 38 tanggal 28 Desember 2016 menyatakan bahwa jumlah total saham adalah 249.422 lembar dengan nilai nominal Rp24.942.200.000,00 dan Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 99,92% dan sisanya sebanyak 0,08% atau 204 lembar saham dengan nilai nominal Rp20.400.000,00 dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin. Pada tahun 2019 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyertaan modal sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga total modal disetor oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Rp27.442.200.000,00 atau sebesar 99,93% dari total modal disetor PT. Pembangunan Sulteng sebesar Rp27.462.600.000,00

Motede perhitungan nilai investasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada PT Pembangunan Sulteng per 31 Desember 2020 menggunakan metode ekuitas. Sehingga di dapat nilai investasi sebesar Rp18.818.539.270,37 berkurang sebesar Rp7.715.723.448,62 dari nilai investasi awal pada 1 Januari 2020 sebesar Rp26.534.262.718,99. dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Nilai Pernyataan (Rp)
Modal Saham	24.962.600.000,00
Setoran Modal	2.500.000.000,00
Laba/(Rugi) ditahan	(908.612.224,00)
Laba/(Rugi) tahun berjalan	(7.721.459.168,00)
Jumlah	18.832.528.608,00

Perhitungan nilai investasi sebagai berikut :

Ekuitas perusahaan per 31 Desember 2020	18.832.528.608,00
Persentase kepemilikan saham	99,93%
Pengakuan investasi	**18.818.539.270,36**

2) PT Bank Sulteng

Perhitungan penilaian investasi pada PT Bank Sulteng menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki/menguasai

jumlah saham 35,30% dan memiliki kedudukan yang dominan dalam pengambilan keputusan.

Nilai investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada PT Bank Sulteng pada 31 Desember 2020 sebesar Rp372.761.320.450,08 dari nilai investasi awal pada 1 Januari 2020 sebesar Rp359.539.333.002,93.

Terdapat koreksi kurang pencatatan atas penyajian perhitungan nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp15.987.163.014,21, dikarenakan masih menggunakan laporan keuangan unaudited, sehingga saldo investasi tahun 2019 adalah Rp343.552.169.989,21 (Rp359.539.333.002,93 – Rp15.987.163.014,21). Perhitungan nilai investasi dengan uraian sebagai berikut:

Total Modal Provinsi Sulawesi Tengah

- Modal disetor	Rp	150.744.800.000,00
- Agio	Rp	608.412,00
- Dana Setoran Modal	Rp	45.194.945.195,00
	Rp	**195.940.353.607,00**
Laba Tahun Berjalan	Rp	184.410.189.063,00
Dana Cadangan	Rp	316.499.065.452,00
Persentase kepemilikan saham		35,30%
	Rp	**176.820.966.843,80**
Pengakuan investasi	**Rp**	**372.761.320.450,80**

Pengakuan investasi tahun 2020 sebesar Rp372.761.320.450,80 dapat di uraikan sebagai berikut :

- Investasi 2019	Rp	343.552.169.989,21
- Laba Tahun 2020	Rp	65.096.796.739,24
- Pembayaran Deviden 2019	Rp	(21.725.347.318,00)
- Cadangan Kerugian Atas Penurunan Nilai Kredit	Rp	(15.383.899.065,70)
- Dampak Kenaikan Persentase Kepemilikan	Rp	1.455.895.701,08
- Selisih Perhitungan Deviden	Rp	(234.295.595,03)
	Rp	**372.761.320.450,80**

Dasar Perhitungan Nilai investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada PT Bank Sulteng per 31 Desember 2020 sebesar Rp372.761.320.450,80 telah menggunakan laporan keuangan audited.

3) PT Bangun Palu

Tidak terdapat penyertaan modal untuk PT Bangun Palu di tahun 2020. Metode yang digunakan untuk pengakuan nilai investasi pada PT. Bangun Palu adalah metode biaya. Per 31 Desember 2020 nilai investasi pada PT Bangun Palu sebesar Rp1.750.000.000,00.

4) PT Asuransi Bangun Askrida

tidak terdapat penyertaan modal untuk PT Asuransi Bangun Askrida di tahun 2020. Metode yang digunakan untuk pengakuan nilai investasi pada PT Asuransi Bangun Askrida adalah metode biaya. Per 31 Desember 2020 nilai investasi pada PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp1.260.000.000,00.

Penjelasan Investasi Jangka Panjang disajikan pada lampiran 18.

5.3.1.3 Aset Tetap

2020	2019
Rp 5.363.340.242.218,42	**Rp5.055.411.758.634,67**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan.

Tabel 5.75
Daftar Aset Tetap Tahun 2020 dan 2019

Aset Tetap	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Tanah	956.308.142.832,81	941.427.507.832,81
Peralatan dan Mesin	1.497.930.809.655,61	1.270.586.308.474,61
Gedung dan Bangunan	2.290.021.784.916,83	1.927.215.708.837,26
Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.883.559.327.970,16	3.616.675.726.931,06
Aset Tetap Lainnya	73.880.877.288,55	69.849.193.232,55
Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.452.549.125,64	56.718.855.835,00
Akumulasi Penyusutan	(3.374.813.249.571,19)	(2.827.061.542.508,62)
JUMLAH	**5.363.340.242.218,42**	**5.055.411.758.634,67**

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan sebagaimana ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019 sudah dilakukan perhitungan akumulasi penyusutan.

Pada tahun 2020 penyajian laporan keuangan khusus aset tetap sudah didukung dengan Laporan Barang Inventaris tahun 2020. Saldo aset tetap yang

disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020 telah melalui proses rekonsiliasi antara data aset tetap di SKPD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai dengan PSAP 10 paragraf 5, menyatakan bahwa kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Oleh karena itu, pada awal tahun 2020 dilakukan koreksi/perbaikan pencatatan aset tetap pada aplikasi simda BMD sehingga berdampak pada perubahan nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap pertanggal 1 januari 2020, dan nilai aset lainnya dan akumulasi penyusutan aset lainnya pertanggal 1 januari 2020. Koreksi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur penginputan yang dilakukan oleh pengurus barang OPD/Operator Simda BMD OPD pada aplikasi simda BMD yang mengakibatkan adanya nilai aset dan nilai penyusutan yang tidak masuk dalam neraca, sehingga setelah dilakukan koreksi/perbaikan data berupa ubah kondisi dan ubah riwayat, terjadi perubahan nilai aset tetap dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 1 januari 2020, dan nilai aset lainnya dan akumulasi penyusutan aset lainnya pertanggal 1 januari 2020. Atas perubahan tersebut dilakukan jurnal koreksi kesalahan tahun-tahun sebelumnya yakni pada koreksi ekuitas tahun 2020. Adapun nilai yang terkoreksi sebagai berikut:

a. Nilai Perolehan Aset Tetap pertanggal 1 januari 2020;

   Nilai Aset tetap tahun 2019 sebesar Rp7.882.473.301.143,29, koreksi tambah nilai perolehan tahun 2019 sebesar Rp27.917.779.092,07, sehingga saldo awal aset tetap pertanggal 1 januari 2020 adalah sebesar Rp7.910.391.080.235,36. Rekapitulasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.76
Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Tahun 2020

Uraian	LK Audited 2019 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Saldo Awal 1 Januari 2020 (Rp)
Tanah	941.427.507.832,81	(548.776.000,0)	940.878.731.832,81
Peralatan dan Mesin	1.270.586.308.474,61	152.993.200,0	1.270.739.301.674,61
Gedung dan Bangunan	1.927.215.708.837,26	28.574.012.974,1	1.955.789.722.229,32
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.616.675.726.931,06	22.955.000,0	3.616.698.681.931,06
Aset Tetap Lainnya	69.849.193.232,55	(283.406.082,0)	69.565.786.732,55
Konstruksi dalam Pengerjaan	56.718.855.835,00	-	56.718.855.835,00
Jumlah Aset tetap	**7.882.473.301.143,29**	**27.917.779.092,07**	**7.910.391.080.235,36**

b. Nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap pertanggal 1 januari 2020;

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap taun 2019 sebesar (Rp2.827.061.542.508,62), koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap tahun 2019 sebesar (Rp196.909.474.787,99), sehingga saldo awal Akumulasi Penyusutan aset tetap pertanggal 1 januari 2020 adalah sebesar (Rp3.023.971.017.296,61). Rekapitulasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.77
Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Akm. Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020

Uraian	LK Audited 2019 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Saldo Awal 1 Januari 2020 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(739.060.383.134,62)	16.297.369.713,01	(722.763.013.421,61)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(345.627.575.170,00)	12.298.569.321,00	(333.329.005.849,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	(1.742.373.584.204,00)	(225.054.635.381,00)	(1.967.428.219.585,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	(450.778.441,00)	(450.778.441,00)
Jumlah	**(2.827.061.542.508,62)**	**(196.909.474.787,99)**	**(3.023.971.017.296,61)**

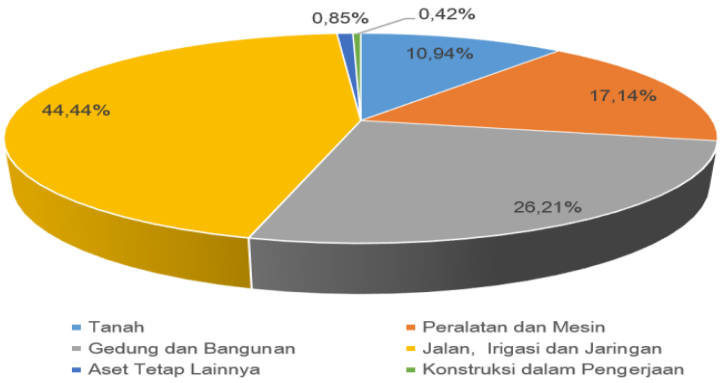

Gambar 5.7
Komposisi Aset Tetap Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas, tahun 2020 komposisi aset nilai aset tetap terbesar adalah Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar 44,44%. Sedangkan terendah atas aset tetap adalah aset Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar 0,42%. Tanah sebesar 10,94%, Peralatan dan Mesin sebesar 17,14%, Gedung dan Bangunan sebesar 26,21%, dan Aset tetap lainnya sebesar 0,85% terhadap total aset tetap. Terhadap bobot di atas tidak termasuk akumulasi penyusutan.

Total nilai aset tetap yang tercantum pada Neraca Daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.363.340.242.218,42. Nilai aset tetap 2019 naik sebesar Rp307.928.483.583,74 atau naik sebesar 6,09% jika dibandingkan dari saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.055.411.758.634,67. Kenaikan tersebut disebabkan sebagian besar Hibah dan realisasi belanja modal tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.78
Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tahun 2020

Jenis Aset	Saldo 31 Des 2019 (Rp)	Mutasi		Saldo 31 Des 2020 (Rp)
		Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
Tanah	941.427.507.832,81	50.147.525.000,00	35.266.890.000,00	956.308.142.832,81
Peralatan dan Mesin	1.270.586.308.474,61	253.108.488.654,00	25.763.987.473,00	1.497.930.809.655,61
Gedung dan Bangunan	1.927.215.708.837,26	409.982.766.590,84	47.176.690.511,27	2.290.021.784.916,83
Jalan, Jaringan dan Instalasi	3.616.675.726.931,06	299.401.421.991,10	32.517.820.952,00	3.883.559.327.970,16
Aset Tetap Lainnya	69.849.193.232,55	68.592.840.948,00	64.561.156.892,00	73.880.877.288,55
Konstruksi Dalam Pengerjaar	56.718.855.835,00	20.089.431.719,64	40.355.738.429,00	36.452.549.125,64
Jumlah Aset Tetap	**7.882.473.301.143,29**	**1.101.322.474.903,58**	**245.642.284.257,27**	**8.738.153.491.789,60**
Akumulasi Penyusutan	(2.827.061.542.508,62)	(547.751.707.062,57)	-	(3.374.813.249.571,19)
Nilai Buku Aset Tetap	**5.055.411.758.634,67**	**553.570.767.841,01**	**245.642.284.257,27**	**5.363.340.242.218,41**

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 19

Lebih lanjut perubahan nilai aset tersebut secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.79
Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2020

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo Aset Tetap Audited 2019	**5.055.411.758.634,67**
Koreksi Tambah Saldo Awal 2020:	
Reklasifikasi	24.055.385.264,00
Koreksi Extra Kompatabel	4.861.620.553,88
Koreksi Nilai	352.150.543,00
Koreksi Pencatatan Simda	5.510.327.306,58
Total Bertambah	**34.779.483.667,46**

Uraian	Saldo (Rp)
Koreksi Kurang Saldo Awal 2020:	
Reklasifikasi	398.236.500,00
Ekstra Komptabel 2019	16.799.900,00
Koreksi Nilai	5.842.112.175,40
Koreksi Pencatatan Simda	604.587.396,00
Total Berkurang	**6.861.704.575,40**
Saldo Awal 2020	**5.083.329.537.726,73**
Mutasi Tambah 2020:	
Realisasi SP2D Belanja Modal	665.439.891.390,95
Dari Extracomp Menjadi Aset Tetap	-
Aset Baru Deitemukan	18.995.341.000,00
Hibah	23.385.277.910,00
Hibah Komite Sekolah	13.948.000,00
Kapitalisasi (Sumber Barjas Rek. 5.2.2. Sumber APBD+BOS)	17.063.329.041,11
Pinjam Pakai	-
Reklas Antar KIB	41.325.557.147,10
Reklas Aset Tidak Berwujud	-
Reklas Aset Lain-lain	205.850.915.081,00
Reklas Konstruksi Dalam Pengerjaan	57.157.842.485,64
Utang Belanja Modal	1.397.645.900,00
Mutasi Antar SKPD	35.913.243.698,32
Akumulasi Penyusutan	(547.751.707.062,57)
Total Bertambah	**518.791.284.591,55**
Mutasi Kurang 2020:	
Pinjam Pakai	8.424.148.054,07
Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2020	5.044.874.829,74
Mutasi Antar SKPD	35.913.243.280,32
Lebih Bayar SP2D 2020 (Koreksi LRA)	1.849.500,00
Reklas Antar KIB	41.325.557.147,10
Reklas Aset Tidak Berwujud	1.887.781.899,00
Reklas Aset Lain-lain	68.731.910.334,00
Pembayaran Hutang	1.505.402.110,00
Ekstra Komptabel 2020 (Dari Aset Tetap Menjadi Extracomp)	16.252.278.342,00
Reklas Konstruksi Dalam Pengerjaan	57.157.842.485,64
Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap	2.535.691.700,00
Total Berkurang	**238.780.579.681,87**
Saldo Aset Tetap 2020	**5.363.340.242.636,41**

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.

2. Mutasi Tambah:

a. Belanja modal aset tetap yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2020 berdasarkan SP2D sebesar Rp665.439.891.390,95.

b. Aset Baru deitemukan, merupakan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2020 senilai Rp18.995.341.000,00

c. Hibah merupakan hibah dari Kementerian dan Pemerintah Daerah Lainnya yang tersebar pada 5 (lima) SKPD dengan total nilai sebesar Rp23.385.277.910,00, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.80
Rekapitulasi Hibah Aset Tetap Tahun 2020

No	Nama SKPD	Jenis Aset dan Jumlah			Jumlah (Rp)
		Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.920.000.000,00	2.883.898.185,00	12.265.180.000,00	17.069.078.185,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	85.000.000,00	32.607.500,00	-	117.607.500,00
3	Dinas Pangan	-	78.400.000,00	-	78.400.000,00
4	Dinas Kehutanan	-	3.191.283.491,00	2.456.036.034,00	5.647.319.525,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	472.872.700,00	-	472.872.700,00
TOTAL		**2.005.000.000,00**	**6.659.061.876,00**	**14.721.216.034,00**	**23.385.277.910,00**

d. Hibah Aset tetap dari komite sekolah pada Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp13.948.000,00.

e. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp17.063.329.041,11 merupakan Kapitalisasi terhadap aset gedung, jalan dan jaringan serta aset tetap lainnya, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2020.

f. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp41.325.557.147,10 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.

g. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp205.850.915.081,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset lain-lain dan aset tetap.

h. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp57.157.842.485,64 merupakan perpindahan pencatatan antara aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan aset tetap.

i. Utang belanja modal tahun 2020 sebesar Rp1.397.645.900,00, merupakan aset tetap yang sudah selesai pekerjaan fisiknya, namun belum selesai pembayarannya oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.

j. Mutasi antar SKPD sebesar Rp35.913.243.698,32 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

3. Mutasi Kurang:

a. Pinjam Pakai sebesar Rp8.424.148.054,07 merupakan Aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai oleh pemerintah pusat dan daerah lain.

b. Penghentian Penggunaan/Penghapusan sebesar Rp5.044.874.829,74 merupakan penghapusan Aset tetap dalam kondisi Baik karena Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain dan Penjualan/Lelang Kendaraan tahun 2020.

c. Mutasi antar SKPD sebesar Rp35.913.243.280,32 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

d. Lebih bayar SP2D tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.849.500,00 merupakan selisih lebih yang dibayarkan kepada pihak ketiga (nilai Kontrak lebih kecil dari SP2D).

e. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp41.325.557.147,10 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.

f. Reklasifikasi aset tidak berwujud (ATB) sebesar Rp1.887.781.899,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset tidak berwujud, aset lain-lain, dan aset tetap.

g. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp68.731.910.334,00 merupakan perpindahan pencatatan antara aset lain-lain, ATB dan aset tetap.

h. Pembayaran hutang tahun sebelumnya sebesar Rp1.505.402.110,00 merupakan pembayaran hutang atas aset yang sudah dicatat dan diakui tahun sebelumnya.

i. *Ekstra Compatible* sebesar Rp16.252.278.342,00 merupakan realisasi belanja modal tahun 2020 namun sistem aplikasi simda BMD pemerintah Provinsi

Sulawesi Tengah (melalui running kebijakan Akuntansi) direklas menjadi ektracomp.

j. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp57.157.842.485,64 merupakan perpindahan pencatatan antara aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan aset tetap.

k. Belanja Modal yang tidak menjadi Aset tetap sebesar Rp2.535.691.700,00, merupakan realisasi belanja modal namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berikut ini rekapitulasi unit aset tetap tahun 2020 berdasarkan jenis aset tetap.

Tabel 5.81
Rekapitulasi Unit Aset Tetap

Nama Bidang Barang	Total Aset 2020	
	Unit	Satuan
Golongan Tanah	**840**	
- Tanah	840	Persil
Peralatan dan Mesin	**214.984,00**	
- Alat -Alat Besar	196,00	Unit
- Alat -Alat Angkutan	3.643,00	Unit
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.100,00	Unit
- Alat Pertanian	1.278,00	Unit
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	172.703,00	Unit
- Alat Studio dan Komunikasi	6.665,00	Unit
- Alat Kedokteran	5.468,00	Unit
- Alat Laboratorium	18.768,00	Unit
- Alat Alat Persenjataan / Keamanan	1.163,00	Unit
Golongan Gedung dan Bangunan	**4.172**	
- Bangunan Gedung	4.062	Unit
- Monumen	110	Unit
Golongan Jalan Irigasi dan Jaringan	**1.903,00**	
- Jalan dan Jembatan	1.021,00	Unit
- Bangunan Air Irigasi	336,00	Paket
- Instalasi	321,00	Paket
- Jaringan	225,00	Paket
Golongan Aset Tetap Lainnya	**122.097,00**	
- Buku dan Perpustakaan	120.162,00	Eks
- Barang Bercorak Kebudayaan	1.855,00	Buah
- Hewan dan Ternak serta Tanaman	25,00	Ekor/Pohon
- Aset Renovasi	55,00	
Konstruksi Dalam Pekerjaan	**65**	**Paket**
JUMLAH	**344.061**	**Unit/Buah/ Paket**

Uraian dan penjelasan masing-masing aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

a)	Tanah	2020	2019
		Rp956.308.142.832,81	**Rp941.427.507.832,81**

Saldo Tanah Per 31 Desember 2020 sebesar Rp956.308.142.832,81 Aset tanah bertambah sebesar Rp14.880.635.000,00 atau naik sebesar 1,58% dari saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp941.427.507.832,81. Kenaikan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.82
Daftar Mutasi Tanah

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo Tanah Tahun 2019	**941.427.507.832,81**
Koreksi Tambah Saldo Awal 2020:	
Total Bertambah	**0,00**
Koreksi Kurang Saldo Awal 2020:	
Koreksi Pencatatan Simda	548.776.000,00
Total Berkurang	**548.776.000,00**
Saldo Awal 2020	**940.878.731.832,81**
Mutasi Tambah 2020:	
Realisasi SP2D Belanja Modal	835.750.000,00
Aset Baru Ditemukan	16.540.500.000,00
Hibah	2.005.000.000,00
Reklas Aset Lain-lain	22.753.735.000,00
Mutasi Antar SKPD	8.012.540.000,00
Total Bertambah	**50.147.525.000,00**
Mutasi Kurang 2020:	
Pinjam Pakai	4.612.618.000,00
Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2020	440.000.000,00
Mutasi Antar SKPD	8.012.540.000,00
Reklas Antar KIB	155.571.000,00
Reklas Ke Aset lain-lain	21.497.385.000,00
Total Berkurang	**34.718.114.000,00**
Saldo Tanah Tahun 2020	**956.308.142.832,81**

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 21

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.

2. Mutasi Tambah:
   a. Belanja modal tanah yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2020 berdasarkan SP2D sebesar Rp835.750.000,00
   b. Aset Baru ditemukan, merupakan tanah milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2020 senilai Rp16.540.500.000,00.
   c. Hibah merupakan merupakan hibah tanah pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total nilai sebesar Rp2.005.000.000,00.
   d. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp22.753.735.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset lain-lain ke aset tetap tanah.
   e. Mutasi antar SKPD sebesar Rp8.012.540.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap tanah dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
3. Mutasi Kurang:
   a. Pinjam Pakai sebesar Rp4.612.618.000,00 merupakan Aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Tanah yang dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai oleh pemerintah pusat dan daerah lain.
   b. Penghentian Penggunaan/Penghapusan sebesar Rp440.000.000,00 merupakan penghapusan Aset tetap berupa tanah karena dihibahkan kepada Pemerintah Kota Palu.
   c. Mutasi antar SKPD sebesar Rp8.012.540.000,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap tanah dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
   d. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp155.571.000,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap antara satu KIB ke dalam pos KIB lainnya.
   e. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp21.497.385.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari tanah ke aset lain-lain.

Sampai dengan tahun 2020 aset Tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 840 Unit/Persil dengan uraian sebagai berikut:

1. Tanah telah bersertifikat sebesar 333 unit/Persil dengan nilai sebesar Rp419.691.695.745,00 terdapat pada 32 SKPD.
2. Tanah yang belum bersertifikat, berjumlah 507 unit/persil dengan nilai sebesar Rp558.113.832.087,81. Pensertifikatan tanah milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah direncanakan dan dianggarkan pembiayaannya pada tahun 2020, namun karena adanya refocushing dana covid-19, sehingga hal tersebut batal dilaksanakan. Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali merencanakan dan menganggarkan tahap I biaya pensertifikatan tanah yang tersebar pada 23 (dua puluh tiga) OPD dengan total anggaran Rp1.475.000.000,00 untuk sertifikat 295 persil tanah. Jumlah tanah yang belum berserifikat tahun 2020.
3. Tanah senilai Rp22.753.735.000,00 pada tahun 2019 tercatat di Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi (KIB E), dan tahun 2020 dilakukan reklasifikasi ke Aset tetap Tanah (KIB A).
4. Tanah senilai Rp35.593.595.077,00 dicatat pada Aset lain-lain merupakan tanah dalam proses penyelesaian (upaya penyelesaian permasalahan tahun-tahun sebelumnya), termasuk tanah bangunan rumah dinas yang dijual tahun 2010 dan 2011.

Disamping itu juga terdapat aset tanah dengan kondisi sebagai berikut:

1. Tanah yang dikuasai fihak lain, berjumlah 1 unit/persil berupa tanah bangunan rumah negara golongan II yang terletak di jalan Nokilalaki nomor 7 Palu, yang tercatat terdapat Dinas Sosial dengan nilai sebesar Rp187.950.000,00.
2. Aset tanah bernilai Null sebanyak 17 (Tujuh belas) unit/persil. Penilaian aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018, namun hal tersebut batal dilaksanakan karena Bencana alam. Dan tahun 2020 juga tidak dapat dilaksanakan kaena keterbatasan anggaran refocushing dana Covid-19. Oleh karena itu, untuk tahun-tahun mendatang akan berupaya untuk memperbaikinya dalam bentuk memberikan nilai perolehan aset tetap tersebut berdasarkan nilai perolehan, dan apabila nilai perolehan tidak memungkinkan untuk ditemukan karena tidak adanya dokumen untuk aset-aset dimaksud, maka akan diberikan nilai perolehan

berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan (sesuai PSAP 07 Paragraf 22). *Rincian Aset tanah bernilai Null dapat dilihat pada lampiran 20*.

3. Terdapat beberapa Aset tetap Tanah yang belum memuat informasi lengkap seperti luas tanah, bukti kepemilikan dan lokasi, sehingga untuk tahun-tahun mendatang akan berupaya untuk melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD, dengan cara melakukan inventarisasi fisik (kesesuaian fisik aset, dokumen perolehan/dokumen lainnya) untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan pencatatan dalam simda BMD.
4. Aset tetap Tanah yang dipinjam pakai oleh pihak lain sebanyak 13 unit dengan total nilai Rp4.612.618.000,00. Aset tetap tanah tersebut telah direklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain, sehingga total nilai tersebut sudah tidak masuk dalam Aset tetap Tanah. Rincian aset tetap tanah yang telah direklas ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatan pihak lain dalam tabel berikut:

Tabel 5.83
Aset Tanah Yang Dipinjampakaikan Kepada Pihak Lain Tahun 2020

No.	Nama Jenis Barang	Alamat Barang	Luas M2	Nilai Barang (Rp)	Dokumen		Jangka Waktu	Pihak Ketiga
					Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	Jl. MT. Haryono Kota PALU	1.078	188.800.000,00	01/02/2020	011/04/BPKAD	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2025	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln.Trans Desa Masing Kec.Batui Kab.Banggai	374	9.350.000,00	01/02/2020	011/0115/BPKAD	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2022	BUMDES Masing
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. MT. Haryono No. 213 Luwuk Banggai	1.000	140.000.000,00	03/23/2020	032/2646/BPKAD	23 Maret 2020 s/d 23 Maret 2022	Pemerintah Kabupaten Banggai
5	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	JL. Desa kinapasan Kel. Lakatan , Kab. Toli-Toli	50.000	750.000.000,00	03/06/2017	523.028/521/DISLUTKAN	03 April 2017 s/d 03 April 2021	Pemerintah Kabupaten Tolitoli
6	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	Jl. Trans Sulawesi , Kel. Pandiri Kab. Poso	16.130	200.000.000,00	03/23/2020	032/2645/BPKAD	23 Maret 2020 s/d 23 Maret 2025	Pemerintah Kabupaten Poso
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Jln.Pulau Roti Kabupaten Poso	700	21.000.000,00	01/02/2020	032/0119/BPKAD	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2025	Pemerintah Kabupaten Poso
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Jl. Ahmad Yani No. 23 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu	825	224.200.000,00	10/06/2016	031/14/BPKAD	06 Oktober 2016 sampai dengan 06 Oktober 2021	PANGKALAN TNI AL
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Jl. Soeprapto No. 68 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu	1.135	449.400.000,00	12/20/2017	B/12/XII/2017	20 Desember 2017 - 20 Desember 2022	KOREM 132 TADULAKO
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. KARTINI NO 20	1.320	1.079.760.000,00	01/31/2020	032/1162/BPKAD	02 Februari 2020 s/d 02 Februari 2025	Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah

No.	Nama Jenis Barang	Alamat Barang	Luas M2	Nilai Barang (Rp)	Dokumen		Jangka Waktu	Pihak Ketiga
					Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Masjid Raya No. 4 Kel. Lolu Kec. Palu Selatan Kota Palu	3.006	871.740.000,00	05/10/2016	011/3670/ BPKAD	10 Mei 2016 sampai dengan 10 Mei 2021	PEMERINTAH KOTA PALU
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Pramuka No. 23	1.508	678.368.000,00	07/01/2020	032/5434/ BPKAD	Sampai dengan gedung Kejaksaan Tinggi Sulteng dapat dimanfaatkan	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
JUMLAH				**4.612.618.000,00**				

5. Untuk Aset tetap tanah yang dikerjasamakan dengan CV. Fudjiyama senilai Rp1.056.640.000,00, dalam pencatatan simda BMD belum direklasifikasi ke Aset Lainnya, disebabkan karena Aset tanah tersebut dilakukan pemanfaatan sebagian, dan simda BMD belum dapat memfasilitasi pencatatan untuk pemanfaatan sebagian. Sehingga hal tersebut di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini.

b) Peralatan Dan Mesin

2020	2019
Rp1.497.930.809.655,61	**Rp1.270.586.308.474,61**

Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.497.930.809.655,61 Aset Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp227.344.501.181,00 atau naik sebesar 17,89 % dari saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.270.586.308.474,61. Peningkatan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.84
Mutasi Peralatan Dan Mesin

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2019	**1.270.586.308.474,61**
Koreksi Tambah Saldo Awal 2020:	
Reklasifikasi	24.550.000,00
Koreksi Pencatatan Simda	209.560.700,00
Total Bertambah	**234.110.700,00**
Koreksi Kurang Saldo Awal 2020:	
Reklasifikasi	59.292.500,00
Koreksi Pencatatan Simda	21.825.000,00
Total Berkurang	**81.117.500,00**
Saldo Awal 2020	**1.270.739.301.674,61**
Mutasi Tambah 2020:	
Realisasi SP2D Belanja Modal	229.478.761.975,00
Aset Baru Deitemukan	126.977.000,00
Hibah	6.659.061.876,00
Hibah Komite Sekolah	1.400.000,00

Uraian	Saldo (Rp)
Kapitalisasi (Sumber Barjas Rek. 5.2.2. Sumber APBD+BOS)	327.790.400,00
Reklas Antar KIB	11.148.512.500,00
Reklas Aset Lain-lain	1.058.936.000,00
Reklas Konstruksi Dalam Pengerjaan	721.524.100,00
Utang Belanja Modal	60.514.200,00
Mutasi Antar Skpd	3.290.899.903,00
Total Bertambah	**252.874.377.954,00**
Mutasi Kurang 2020:	
Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2020	2.663.737.500,00
Mutasi Antar SKPD	3.290.899.903,00
Lebih Bayar SP2D 2020 (Koreksi LRA)	1.849.500,00
Reklas Antar KIB	2.365.904.150,00
Reklas Aset Tidak Berwujud	1.887.781.899,00
Reklas Aset Lain-lain	5.714.332.687,00
Pembayaran Hutang	1.505.402.110,00
Ekstra Komptabel 2020 (Dari Aset Tetap Menjadi Extracomp)	6.018.345.524,00
Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap	2.234.616.700,00
Total Berkurang	**25.682.869.973,00**
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020	**1.497.930.809.655,61**

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 22.

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
2. Mutasi Tambah:
   a. Belanja modal aset tetap peralatan dan mesin yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2020 berdasarkan SP2D sebesar Rp229.478.761.975,00.
   b. Aset Baru ditemukan, merupakan aset peralatan dan mesin milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2020 senilai Rp126.977.000,00.
   c. Hibah berupa peralatan dan mesin sebesar Rp6.659.061.876,00 yang tersebar pada 5 SKPD yakni:
      - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.883.898.185,00;
      - Dinas Pangan sebesar Rp78.400.000,00;
      - Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp32.607.500,00;
      - Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Rp472.872.700,00; dan
      - Dinas Kehutanan sebesar Rp3.191.283.491,00;

d. Hibah Aset tetap peralatan dan mesin dari komite sekolah pada Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.400.000,00.
e. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp327.790.400,00 merupakan Kapitalisasi terhadap peralatan dan, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2020.
f. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp11.148.512.500,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin dari pos KIB lainnya.
g. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp1.058.936.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset lain-lain ke aset tetap peralatan dan mesin.
h. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp721.524.100,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) ke aset tetap peralatan dan mesin.
i. Utang belanja modal tahun 2020 sebesar Rp60.514.200,00, merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang sudah selesai pekerjaan fisiknya/sudah dimanfaatkan oleh OPD, namun belum selesai pembayarannya oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.
j. Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.290.899.903,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap peralatan dan mesin dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

3. Mutasi Kurang:
   a. Penghentian Penggunaan/Penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp2.663.737.500,00 merupakan penghapusan Aset tetap peralatan dan mesin dalam kondisi Baik, yakni Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain dan Penjualan/Lelang Kendaraan tahun 2020.
   b. Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.290.899.903,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap peralatan dan mesin dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
   c. Lebih bayar SP2D tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.849.500,00 merupakan selisih lebih yang dibayarkan kepada pihak ketiga (nilai Kontrak lebih kecil dari SP2D).
   d. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.365.904.150,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin ke pos KIB lainnya.

e. Reklasifikasi aset tidak berwujud (ATB) sebesar Rp1.887.781.899,00 merupakan perpindahan pencatatan dari peralatan dan mesin ke ke aset tidak berwujud.

f. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp5.714.332.687,00 merupakan perpindahan pencatatan dari peralatan dan mesin ke aset lain-lain.

g. Pembayaran hutang tahun sebelumnya sebesar Rp1.505.402.110,00 merupakan pembayaran hutang atas aset peralatan dan mesin yang sudah dicatat dan diakui tahun sebelumnya, namun baru selesai pembayarannya ditahun 2020.

h. *Ekstra Compatible* sebesar Rp6.018.345.524,00 merupakan realisasi belanja modal tahun 2020 berupa peralatan dan mesin, namun sistem aplikasi simda BMD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (melalui running kebijakan Akuntansi) direklas menjadi ektracomp.

i. Belanja Modal yang tidak menjadi Aset tetap sebesar Rp2.234.616.700,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin, namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Sedangkan untuk rekapitulasi unit aset Peralatan dan Mesin akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.85
Rekapitulasi Unit Aset Tetap Peralatan Dan Mesin
Tahun 2020

Nama Bidang Barang	Total Aset 2020	
	Unit	Satuan
Peralatan dan Mesin		
- Alat -Alat Besar	196,00	Unit
- Alat -Alat Angkutan	3.643,00	Unit
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.100,00	Unit
- Alat Pertanian	1.278,00	Unit
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	172.703,00	Unit
- Alat Studio dan Komunikasi	6.665,00	Unit
- Alat Kedokteran	5.468,00	Unit
- Alat Laboratorium	18.768,00	Unit
- Alat Alat Persenjataan / Keamanan	1.163,00	Unit
Jumlah	**214.984,00**	**unit**

Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset Peralatan dan Mesin sebanyak 214.984 unit, dengan nilai sebesar Rp1.497.930.809.655,61 yang tersebar pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2020.

Pada tahun 2020, masih terdapat beberapa peralatan mesin dalam kondisi baik yang belum memuat informasi lengkap seperti informasi nomor mesin, nomor rangka, nomor plat kendaraan dan type/merk, sehingga untuk tahun-tahun mendatang akan dilakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD, dengan cara melakukan inventarisasi fisik (kesesuaian fisik aset, dokumen perolehan) untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan pencatatan dalam simda BMD.

Disamping itu juga terdapat aset peralatan dan mesin yang bernilai null sebanyak 13.238 unit. Penilaian aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018, namun hal tersebut batal dilaksanakan karena Bencana alam. Dan tahun 2020 juga tidak dapat dilaksanakan kaena keterbatasan anggaran refocushing dana Covid-19. Oleh karena itu, untuk tahun-tahun mendatang akan memperbaikinya dalam bentuk memberikan nilai perolehan aset tetap tersebut berdasarkan nilai perolehan, dan apabila nilai perolehan tidak memungkinkan untuk ditemukan karena tidak adanya dokumen untuk aset-aset dimaksud, maka akan diberikan nilai perolehan berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan (sesuai PSAP 07 Paragraf 22). *Rincian aset peralatan dan mesin bernilai Null dapat dilihat pada lampiran 20*.

		2020	2019
c)	**Gedung Dan Bangunan**	**Rp2.290.021.784.916,83**	**Rp1.927.215.708.837,26**

Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.290.021.784.916,83 Aset Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp362.806.076.079,57 atau naik sebesar 18,83% dari saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.927.215.708.837,26. Kenaikan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.86
Mutasi Gedung Dan Bangunan

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo Gedung Dan Bangunan Tahun 2019	**1.927.215.708.837,26**
Koreksi Tambah Saldo Awal 2020:	
Reklasifikasi	23.971.542.764,00
Koreksi Ekstra Compatible	4.861.620.553,88
Koreksi Nilai	352.150.543,00
Koreksi Pencatatan Simda	5.277.811.606,58
Total Bertambah	**34.463.125.467,46**
Koreksi Kurang Saldo Awal 2020:	
Ekstra Compatible 2019	16.799.900,00
Koreksi Nilai	5.842.112.175,40
Koreksi Pencatatan Simda	30.231.814,00
Total Berkurang	**5.889.112.493,40**
Saldo Awal 2020	**1.955.789.721.811,32**
Muasi Tambah 2020:	
Realisasi SP2D Belanja Modal	244.805.546.096,95
Aset Baru deitemukan	1.243.373.000,00
Hibah	14.721.216.034,00
Hibah Komite Sekolah	12.548.000,00
Kapitalisasi (Sumber Barjas Rek. 5.2.2. Sumber APBD + BOS)	12.324.667.978,11
Reklas Antar KIB	27.385.602.168,00
Reklas dari Aset Lain-lain	34.906.805.280,00
Reklasi dari KDP	39.634.214.329,00
Mutas Antar SKPD	485.668.237,32
Total Bertambah	**375.519.641.123,38**
MUTASI KURANG 2020:	
Pinjam Pakai	3.811.530.054,07
Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2020	1.941.137.329,74
Mutasi Antar SKPD	485.668.237,32
Reklasi Antar KIB	9.019.844.611,10
Reklas Ke Aset Lain-lain	8.872.170.647,00
Ekstra Compatible 2020 (Dari Aset Tetap Menjadi Ekstrakom)	176.298.500,00
Reklas Ke KDP	16.802.104.056,64
Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap	178.825.000,00
Total Berkurang	**41.287.578.435,87**
Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2020	**2.290.021.784.916,84**

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 23.

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
2. Mutasi Tambah:
   a. Belanja modal aset tetap gedung dan bangunan yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2020 berdasarkan SP2D sebesar Rp244.805.546.096,95.
   b. Aset baru ditemukan, merupakan aset gedung dan bangunan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2020 senilai Rp1.243.373.000,00.
   c. hibah sebesar Rp14.721.216.034,00 merupakan hibah gedung dan bangunan dari Kementrian serta Pemerintah Kabupaten yang tersebar pada 3 SKPD yakni :
      - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.265.180.000,00,
      - Dinas Kehutanan Rp2.456.036.034,00
   d. Hibah Aset tetap gedung dan bangunan dari komite sekolah pada Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp12.548.000,00
   e. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp12.324.667.978,11 merupakan Kapitalisasi terhadap aset gedung, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2020.
   f. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp27.385.602.586,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan dari pos KIB lainnya.
   g. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp34.906.805.280,00 merupakan perpindahan pencatatan aset lain-lain ke aset tetap gedung dan bangunan.
   h. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp39.634.214.329,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) ke aset tetap gedung dan bangunan.
   i. Mutasi antar SKPD sebesar Rp485.668.237,32 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap gedung dan bangunan dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

3. Mutasi Kurang:
   a. Pinjam Pakai sebesar Rp3.811.530.054,07 merupakan Aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai oleh pemerintah pusat dan daerah lain.
   b. Penghentian Penggunaan/Penghapusan sebesar Rp1.941.137.329,74 merupakan penghapusan Aset tetap gedung dan bangunan dalam kondisi Baik karena Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain dan pemusnahan aset rusak berat tahun 2020.
   c. Mutasi antar SKPD sebesar Rp485.668.237,32 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap gedung dan bangunan dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
   d. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp9.019.844.611,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan ke dalam pos KIB lainnya.
   e. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp8.872.170.647,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap gedung dan bangunan kondisi rusak berat ke aset lain-lain.
   f. *Ekstra Compatible* sebesar Rp176.298.500,00 merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2020 namun sistem aplikasi simda BMD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (melalui running kebijakan Akuntansi) direklas menjadi ektracomp.
   g. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp16.802.104.056,64 merupakan perpindahan pencatatan antara aset tetap gedung dan bangunan ke Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dikarenakan sampai dengan 31 desember 2020 pekerjaan fisik belum selesai.
   h. Belanja Modal yang tidak menjadi Aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp178.825.000,00, merupakan realisasi belanja modal namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berdasarkan laporan mutasi Barang Inventaris tahun 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset gedung dan bangunan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.87
Rekapitulasi unit Aset Gedung Dan Bangunan

Nama Bidang Barang	Total Aset 2020	
	Unit	Satuan
Golongan Gedung dan Bangunan		
- Bangunan Gedung	4.062	Unit
- Monumen	110	Unit
Jumlah	**4.172**	**Unit**

Disamping itu juga terdapat aset gedung dan bangunan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Aset gedung dan bangunan yang bernilai null sebanyak 492 unit. Penilaian aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018, namun hal tersebut batal dilaksanakan karena Bencana alam. Dan tahun 2020 juga tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran refocushing dana Covid-19. Oleh karena itu, untuk tahun-tahun mendatang i akan memperbaikinya dalam bentuk memberikan nilai perolehan aset tetap tersebut berdasarkan nilai perolehan, dan apabila nilai perolehan tidak memungkinkan untuk ditemukan karena tidak adanya dokumen untuk aset-aset dimaksud, maka akan diberikan nilai perolehan berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan (sesuai PSAP 07 Paragraf 22). *Rincian Aset gedung dan bangunan bernilai null dapat dilihat pada lampiran 20.*
2. Aset gedung dan bangunan yang dipinjam pakai oleh pihak lain sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp3.811.530.054,00. Aset tetap gedung dan bangunan tersebut telah direklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatkan pihak lain, sehingga total nilai tersebut sudah tidak masuk dalam Aset tetap gedung dan bangunan. Rincian aset tetap gedung dan bangunan yang telah direklas ke Aset Lainnya-Aset yang dimanfaatan pihak lain dalam tabel berikut:

Tabel 5.88
Rincian BMD Gedung Dan Bangunan Yang Dipinjampakaikan
Tahun 2020

No.	Nama Jenis Barang	Alamat Barang	Luas M2	Nilai Barang (Rp)	Dokumen Perjanjian/BAST		Jangka Waktu Kerjasama	Pihak Ketiga
					Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	Jl. MT hARYONO	100	529.900.827	01/02/2020	011/04/BPKAD	02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2025	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl.Pramuka No.23 Palu	1	2.269.550.328	07/01/2020	032/5434/BPKAD	Sampai dengan gedung Kejaksaan Tinggi Sulteng dapat dimanfaatkan	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
3	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	Jl. Ahmad Yani No. 23 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu	202	410.590.000	10/06/2016	031/14/BPKAD	06 Oktober 2016 sampai dengan 06 Oktober 2021	PANGKALAN TNI AL
4	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	Rumah Dinas DANREM Jl. Soeprapto No. 68 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu	190	601.488.900	12/20/2017	B/12/XII/2017	20 Desember 2017 - 20 Desember 2022	KOREM 132 TADULAKO
JUMLAH				3.811.530.054				

3. Untuk Aset tetap gedung dan bangunan yang dikerjasamakan dengan CV. Fudjiyama senilai Rp2.528.928.880,83, dalam pencatatan simda BMD belum direklasifikasi ke Aset Lainnya, disebabkan karena Aset gedung dan bangunan dimaksud belum tercatat dalam aplikasi simda BMD, hal tersbut dikarenakan belum terdapat dokumen sumber ataupun data lainnya yang dapat digunakan untuk mencatat Aset dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun-tahun mendatang akan melakukan inventarisasi BMD dan penilian BMD dimaksud.

		2020	2019
d)	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**Rp3.883.559.327.970,16**	**Rp3.616.675.726.931,06**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.883.559.327.970,16 Nilai tersebut meningkat sebesar Rp266.883.601.039,10. atau naik sebesar 7,38%, jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 yakni sebesar Rp3.616.675.726.931,06. Peningkatan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.89
Mutasi Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo Jalan, Irigasi Dan Jaringan 2019	**3.616.675.726.931,06**
Koreksi Tambah Saldo Awal 2020:	
Koreksi Pencatatan Simda	22.955.000,00
Total Bertambah	**22.955.000,00**
Koreksi Kurang Saldo Awal 2020:	
Total Berkurang	**0,00**
Saldo Awal 2020	**3.616.698.681.931,06**
Mutasi Tambah 2020:	
Realisasi SP2D Belanja Modal	147.282.208.399,00
Aset Baru Ditemukan	1.084.491.000,00
Kapitalisasi (Sumber Barjas Rek. 5.2.2. Sumber APBD+BOS)	534.050.000,00
Reklas Antar KIB	2.009.147.091,10
Reklas Aset Lain-lain	147.131.438.801,00
Utang Belanja Modal	1.337.131.700,00
Total Bertambah	**299.378.466.991,10**
Mutasi Kurang 2020:	
Reklas Antar KIB	28.950.452,00
Reklas Aset Lain-lain	32.250.787.000,00
Ekstra Compatible 2020 (Dari Aset Tetap Menjadi Extracomp)	238.083.500,00
Total Berkurang	**32.517.820.952,00**
Saldo Jalan, Irigasi Dan Jaringan 2020	**3.883.559.327.970,16**

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 24

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp22.955.000,00, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
2. Mutasi Tambah:
   a. Belanja modal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2020 berdasarkan SP2D sebesar Rp147.282.208.399,00.
   b. Aset Baru ditemukan, merupakan aset jalan, irigasi dan jaringan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2020 senilai Rp1.084.491.000,00
   c. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp534.050.000,00 merupakan Kapitalisasi terhadap jalan, irigasi dan jaringan, yang sumber

belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2020. *Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 24a*

d. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.009.147.091,10 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap dari pos KIB lainnya ke jalan, irigasi dan jaringan.

e. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp147.131.438.801,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset lain-lain ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan.

f. Utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020 sebesar Rp1.337.131.700,00, merupakan aset tetap yang sudah selesai pekerjaan fisiknya, namun belum selesai pembayarannya oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.

3. Mutasi Kurang:

a. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp28.950.452,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap dari jalan, irigasi dan jaringan ke pos KIB lainnya.

b. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp32.250.787.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari jalan, irigasi dan jaringan ke pos aset lain-lain.

c. *Ekstra Compatible* sebesar Rp238.083.500,00 merupakan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020 namun sistem aplikasi simda BMD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (melalui running kebijakan Akuntansi) direklas menjadi ektracomp.

Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2020 pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki unit Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.90
Rincian Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nama Bidang Barang	Total Aset 2020	
	Unit	Satuan
Golongan Jalan Irigasi dan Jaringan		
- Jalan dan Jembatan	1.021,00	Unit
- Bangunan Air Irigasi	336,00	Paket
- Instalasi	321,00	Paket
- Jaringan	225,00	Paket
Jumlah	**1.903,00**	**Unit/Paket**

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki unit Jalan, Irigasi dan Jaringan khususnya jaringan berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2020 sebesar 1.903 paket/unit dengan nilai sebesar Rp3.883.559.327.970,16.

Adapun aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai null sebanyak 5 unit. Penilaian aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018, namun hal tersebut batal dilaksanakan karena Bencana alam. Dan tahun 2020 juga tidak dapat dilaksanakan kaena keterbatasan anggaran refocushing dana Covid-19. Oleh karena itu, untuk tahun-tahun mendatang akan memperbaikinya dalam bentuk memberikan nilai perolehan aset tetap tersebut berdasarkan nilai perolehan, dan apabila nilai perolehan tidak memungkinkan untuk ditemukan karena tidak adanya dokumen untuk aset-aset dimaksud, maka akan diberikan nilai perolehan berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan (sesuai PSAP 07 Paragraf 22). *Rincian aset jalan, irigasi dan jaringan bernilai null dapat dilihat pada lampiran 20.*

		2020	2019
d)	**Aset Tetap Lainnya**	**Rp73.880.877.288,55**	**Rp69.849.193.232,55**

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp73.880.877.288,55 Aset tetap lainnya bertambah sebesar Rp4.031.684.056,00 atau naik 5,77% dari saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp69.849.193.232,55. Kenaikan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.91
Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo Aset Tetap Lainnya 2019	**69.849.193.232,55**
Koreksi Tambah Saldo Awal 2020:	
Reklasifikasi	59.292.918,00
Total Bertambah	**59.292.918,00**
Koreksi Kurang Saldo Awal 2020:	
Reklasifikasi	338.944.000,00
Koreksi Pencatatan Simda	3.755.000,00
Total Berkurang	**342.699.000,00**
Saldo Awal 2020	**69.565.787.150,55**
Mutasi Tambah 2020:	
Realisasi SP2D Belanja Modal	43.037.624.920,00
Kapitalisasi (Sumber Barjas Rek. 5.2.2. Sumber APBD+BOS)	589.493.000,00
Reklas Antar KIB	782.294.970,00
Mutasi Antar SKPD	24.124.135.558,00
Total Bertambah	**68.533.548.448,00**
Mutasi Kurang 2020:	
Mutasi Antar SKPD	24.124.135.558,00
Reklas Antar KIB	29.755.286.934,00
Reklas Aset Lain-lain	397.235.000,00
Ekstra Komptabel 2020 (Dari Aset Tetap Menjadi Extracomp)	9.819.550.818,00
Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap	122.250.000,00
Total Berkurang	**64.218.458.310,00**
Saldo Aset Tetap Lainnya 2020	**73.880.877.288,55**

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 25.

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
2. Mutasi Tambah:
   a. Belanja modal aset tetap lainnya yang merupakan belanja/pengadaan aset tetap lainnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2020 berdasarkan SP2D sebesar Rp43.037.624.920,00.
   b. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp589.493.000,00 merupakan kapitalisasi terhadap aset tetap lannya, yang sumber belanjanya diluar belanja modal tahun anggaran 2020.

c. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp782.294.970,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap dari pos KIB lainnya ke Aset tetap lainnya.

d. Mutasi antar SKPD sebesar Rp24.124.135.558,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap lainnya dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

3. Mutasi Kurang:

a. Mutasi antar SKPD sebesar Rp24.124.135.558,00 merupakan perpindahan pencatatan atas aset tetap lainnya dari satu SKPD ke SKPD lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.

b. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp29.755.286.934,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap lainnya ke dalam pos KIB lainnya.

c. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp397.235.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap lainnya ke pos aset lain-lain.

d. *Ekstra Compatible* sebesar Rp9.819.550.818,00 merupakan realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2020 namun sistem aplikasi simda BMD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (melalui running kebijakan Akuntansi) direklas menjadi ektracomp.

e. Belanja Modal yang tidak menjadi Aset tetap sebesar Rp122.250.000,00, merupakan realisasi belanja modal aset tetap lainnya namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki unit aset tetap lainnya dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.92
Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya

Nama Bidang Barang	Total Aset 2020	
	Unit	Satuan
Golongan Aset Tetap Lainnya		
- Buku dan Perpustakaan	120.162,00	Eks
- Barang Bercorak Kebudayaan	1.855,00	Buah
- Hewan dan Ternak serta Tanaman	25,00	Ekor/Pohon
- Aset Renovasi	55,00	unit
Jumlah	**122.097,00**	**Eks/Buah/ Ekor/Pohon/Unit**

Disamping itu juga terdapat aset tetap lainnya dengan kondisi sebagai berikut:

1. Aset tetap lainnya bernilai null sebanyak 27.993 unit, yang sebagian besar merupakan buku mata pelajaran yang berada pada Sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penilaian aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018, namun hal tersebut batal dilaksanakan karena Bencana alam. Dan tahun 2020 juga tidak dapat dilaksanakan kaena keterbatasan anggaran refocushing dana Covid-19. Oleh karena itu, untuk tahun-tahun mendatang akan memperbaikinya dalam bentuk memberikan nilai perolehan aset tetap tersebut berdasarkan nilai perolehan, dan apabila nilai perolehan tidak memungkinkan untuk ditemukan karena tidak adanya dokumen untuk aset-aset dimaksud, maka akan diberikan nilai perolehan berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan (sesuai PSAP 07 Paragraf 22). *Rincian Aset tetap lainnya bernilai null dapat dilihat pada lampiran 20.*

2. Aset Tetap Renovasi (ATR) sebesar Rp6.847.616.973,00

   Aset Tetap Renovasi adalah Suatu satuan kerja (K/L atau SKPD) dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi Aset Tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya-Aset Tetap Renovasi.

   Belanja rehabilitasi/pemeliharaan (Renovasi Aset Tetap) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas Aset milik Pemerintah pusat/pemerintah daerah lain yang digunakan/dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Aset Tetap Renovasi tersebut terdapat pada 10 OPD, dan sampai dengan 31 Desember 2020 Aset Tetap Renovasi belum diserahkan kepada Pemiliknya untuk dikapitaisasi ke Aset induknya. Rekapitulasi Aset Renovasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.93
Rekapitulasi Aset Tetap Renovasi (ATR)

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Sumber Daya Air Daerah	833.331.152,00
2	RSU Madani	199.850.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	200.000.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	169.145.000,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	136.012.000,00
6	Dinas Perkebunan Daerah	3.330.966.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	1.058.346.321,00
8	Dinas Pendapatan Daerah	687.341.500,00
9	Badan Lingkungan Hidup Daerah	226.725.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik	5.900.000,00
TOTAL		**6.847.616.973,00**

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 25b.

Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan reklasifikasi Aset tetap renovasi (ATR) berupa Tanah senilai Rp22.753.735.000,00. Reklasifikasi dilakukan dari Aset tetap renovasi (KIB E) ke Aset tetap Tanah (KIB A). sehingga total nilai Aset Tetap Renovasi tersebut diatas adalah total nilai setelah dikurangi/reklasifikasi ATR ke aset tanah.

		2020	2019
e)	**Kontruksi Dalam Pengerjaan**	**Rp36.452.549.125,64**	**Rp56.718.855.835,00**

Sesuai dengan PSAP 08 Paragraf 6, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp36.452.549.125,64 berkurang sebesar Rp20.266.306.709,36 atau turun sebesar 35,73% dari saldo tahun 2019 sebesar Rp56.718.855.835,00. Penurunan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.94
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo Konstruksi Dlaam Pengerjaan (KDP) 2019	**56.718.855.835,00**
Koreksi Tambah Saldo Awal 2020:	
Total Bertambah	**0,00**
Koreksi Kurang Saldo Awal 2020:	
Total Berkurang	**0,00**
Saldo Awal 2020	**56.718.855.835,00**
Mutasi Tambah 2020:	
Kapitalisasi (Sumber Barjas Rek. 5.2.2. Sumber APBD+BOS)	3.287.327.663,00
Reklas KDP	16.802.104.056,64
Total Bertambah	**20.089.431.719,64**
Mutasi Kurang 2020:	
Reklas KDP	40.355.738.429,00
Total Berkurang	**40.355.738.429,00**
Saldo Konstruksi Dlaam Pengerjaan (KDP) 2020	**36.452.549.125,64**

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 26

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah:
   a. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp3.287.327.663,00 merupakan kapitalisasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan, berupa belanja konsultan perencanaan yang sumber belanjanya dari belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020.
   b. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp16.802.104.056,64 merupakan perpindahan pencatatan antara dari aset tetap gedung dan bangunan ke Konstruksi dalam pengerjaan (KDP), karena sampai dengan 31 desember 2020 Pembangunan aset dimaksud belum selesai (dibuktikan dengan belum adanya BAST hasil pekerjaan).
2. Mutasi Kurang:
   Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp40.355.738.429,00 merupakan perpindahan pencatatan dari Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) ke aset tetap, karena Aset dimaksud telah selesai 100% dan telah dimanfaatkan oleh OPD.

Berdasarkan laporan Barang Inventaris tahun 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah jumlah unit aset konstruksi dalam pengerjaan adalah sebanyak 65 unit yang tercatat pada 17 OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.95
Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020

No.	Uraian	KDP Per 31 Desember 2020 (Rp)	Jumlah Unit	Ket
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	14.129.703.600,00	10	
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	33.989.000,00	1	
3	Dinas Pemuda Dan Olahraga	9.693.320.194,00	4	
4	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	2.092.643.775,00	7	
5	Dinas Cipta Karya Dan Sda	6.226.539.750,00	16	
6	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	295.000.000,00	1	
7	Dinas Pariwisata	38.940.000,00	1	
8	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	67.148.702,00	2	
9	Dinas Kehutanan	69.987.500,00	1	
10	Dinas Kelautan Dan Perikanan	203.388.000,00	5	
11	Badan Pendapatan Daerah	2.981.469.504,64	5	
12	Dinas Perhubungan	21.142.000,00	1	
13	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	135.719.100,00	4	
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.950.000,00	1	
15	Biro Umum Sekretariat Daerah (Biro Ekonomi)	180.450.000,00	2	
16	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	30.871.000,00	2	
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	234.287.000,00	2	
TOTAL KDP 2020		**36.452.549.125,64**	**65**	

Rincian dan penjelasan dapat dilihat pada lampiran 26a

f) Akumulasi Penyusutan

2020	2019
(Rp3.374.813.249.571,19)	**(Rp2.827.061.542.508,62)**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan akumulasi penyusutan adalah biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.

Lebih lanjut bahwa Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Saldo Akumulasi Penyusutan aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2020 sebesar (Rp3.374.813.249.571,19) bertambah sebesar (Rp547.751.707.062,57) atau naik 19,38% dari saldo tahun 2019 sebesar (Rp2.827.061.542.508,62). Perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.96
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2020

Uraian	Akm. Penyusutan Audited 2019 (Rp)	Mutasi 2020 (Rp)	Akm. Penyusutan Audited 2020 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(739.060.383.134,62)	(149.350.827.528,57)	(888.411.210.663,19)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(345.627.575.170,00)	(27.541.561.035,00)	(373.169.136.205,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	(1.742.373.584.204,00)	(370.275.963.803,00)	(2.112.649.548.007,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(583.354.696,00)	(583.354.696,00)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**(2.827.061.542.508,62)**	**(547.751.707.062,57)**	**(3.374.813.249.571,19)**

Untuk lebih jelasnya data akumulasi penyusutan dapat dilihat dalam lampiran 27.

5.3.1.4 Aset Lainnya

2020	2019
Rp 297.965.738.062,89	**Rp 110.263.204.269,34**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp297.965.738.062,89 dan Rp110.263.204.269,34, aset lainnya terdiri dari:

Tabel 5.97
Jenis Aset Lainnya tahun 2020

Jenis Aset Lainnya	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	12.839.668.335,00	12.190.648.335,00
Kemitraan dengan pihak ketiga	3.585.568.880,90	3.585.568.880,83
Aset Tidak Berwujud	5.089.666.619,00	4.008.027.676,54
Aset Lain-lain	276.450.834.227,99	90.478.959.376,97
Jumlah	**297.965.738.062,89**	**110.263.204.269,34**

a) Tagihan Jangka Panjang

2020	2019
Rp12.839.668.335,00	**Rp12.190.648.335,00**

Tagihan jangka panjang terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah dan tagihan kemitraan dengan pihak ketiga. Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp12.839.668.335,00 dan 12.190.648.335,00

Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada bendahara sebesar Rp9.066.152.246,00, kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada pegawai negeri bukan bendahara sebesar Rp719.368.449,00, panjar uang muka sebesar Rp2.405.127.640,00 dan tagihan jangka panjang kemitraan sebesar Rp649.020.000,00. Rincian tagihan TPTGR pada Bendahara selama tahun 2020 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.98
Kasus Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
Pada Bendahara

No	Nama	Tahun Temuan	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	R. Aliafie, BA	1988/1989	12.218.596,00	12.218.596,00
2	Ester Podengge	2007	9.053.933.650,00	9.053.933.650,00
	TOTAL		**9.066.152.246,00**	**9.066.152.246,00**

Tabel 5.99
Kasus Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
Pada Pegawai Negeri bukan Bendahara

No	Nama	Tahun Temuan	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Drs. Djibran Buheli	1988/1989	14.025.785,00	14.025.785,00
2	Nicodemus Wohan	1988/1989	12.060.299,00	12.060.299,00
3	Tobutu Tungka	1988/1989	15.277.665,00	15.277.665,00
4	Roland Lawolio, Bc. Ku	1989/1999	39.000.000,00	39.000.000,00
5	Parham Rahman, Abdul Gafur Liku & Ajlan	2013	639.004.700,00	639.004.700,00
	TOTAL		**719.368.449,00**	**719.368.449,00**

Kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada bendahara sebesar Rp9.066.152.246,00 dan kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah pada pegawai negeri bukan bendahara sebesar Rp719.368.449,00 ditahun 2020 tidak mengalami penambahan dan pengurangan.

Terkait kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah telah diproses oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan beberapa kasus telah dilakukan tindak lanjut berupa proses pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Tabel 5.100
Panjar Uang Muka

No	SKPD	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Biro Perlum	1.621.148.503,00	1.621.148.503,00
2	Biro Keuangan	481.824.537,00	481.824.537,00
3	Badan Diklat	14.814.600,00	14.814.600,00
4	Wakil Gubernur	287.340.000,00	287.340.000,00
	TOTAL	**2.405.127.640,00**	**2.405.127.640,00**

Tidak terdapat mutasi pada saldo akhir TGR atas panjar uang muka pada tahun 2020.

Tabel 5.101
Tagihan Jangka Panjang Kemitraan

NO	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Kontribusi Tetap	522.000.000,00	0,00
2	Denda	127.020.000,00	0,00
	TOTAL	**649.020.000,00**	**0,00**

Tagihan jangka panjang kemitraan sebesar Rp649.020.000 merupakan tagihan atas kerjasama pemanfaatan lokasi eks STQ oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan CV. Fudjiyama berdasarkan surat perjanjian nomor 032/16/BPKAD/015 dan nomor 101/CV-FJ/SPJK/2015 tanggal 2 November 2015. Kemudian dilakukan adendum dengar nomor 032/023/PEMPROV/2019 dan nomor 91/CV-FJ/SPJK/V2019 pada tanggal 28 September 2018. Hasil kesepakatan bahwa untuk pembayaran kontribusi yang semula akan dibayarkan pada bulan November tahun 2017, November tahun 2018, dan November tahun 2019 sekaligus dibayarkan pada bulan November tahun 2031.

		2020	2019
b)	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**	**Rp 3.585.568.880,90**	**Rp3.585.568.880,83**

Aset kemitraan adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Aset kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Sirkuit Panggoa Palu senilai Rp3.585.568.880,83 merupakan Tanah, Bangunan dan perkerasan di kompleks STQ Jabal Nur, jalan

Soekarno Hatta Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore (sebelumnya Kecamatan Palu Utara) Kota Palu, saat ini menjadi obyek pemanfaatan aset yaitu obyek kerja sama pemanfaatan aset dengan CV. Fudjiyama sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Nomor 032/16/BPKAD/2015 tanggal 2 November 2015, dan amandemen Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan aset Nomor 032/023/PEMPROV/2019 dan 91/CV-FJ/SPJK/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019.

Aset yang menjadi obyek kerja sama berupa Tanah seluas 33.020 m², Bangunan seluas 635 m² serta Perkerasan seluas 2.709 m². Aset-aset tersebut selain Tanah, yakni Bangunan dan Perkerasan Jalan. Ketiga aset yang dikerjasamakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tanah bangunan kantor pemerintah yang dikerjasamakan seluas 100.000 m² dengan nilai pada Neraca Awal sebesar Rp3.200.000.000,00 atau nilai per m² tanah adalah sebesar Rp32.000/m2 merupakan sebagian tanah bangunan kantor pemerintah yang telah dicatat dalam simda BMD yakni pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dengan kode barang 01.01.11.04.001 nomor register 0002 tahun perolehan 1995, seluas 365.000 m² yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Berdasarkan Surat Pernyataan pelepasan hal atas tanah dari PT. Duta Dharma Bhakti Palu SHGB 01/HGB/BPN/DGL/1994 bahwa luas tanah tersebut adalah 365.000 m², sehingga pada tahun 2020 akan melakukan koreksi pencatatan pada simda BMD yang semula Luas tanah tercatat 100.000m² menjadi 365.000 m².
- Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen, adalah aset yang tidak mempunyai dokumen perolehan awal, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengukuran nilai aset berdasarkan nilai wajar di tahun perolehan. Pemerintah Sulawesi Tengah mempunyai data perolehan tanah dan bangunan yang tercatat pada Simda BMD dengan lokasi yang sama dan tahun perolehan yang sama yakni terletak di Kompleks STQ yang dicatat pada saat pencatatan Neraca Awal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2006 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pada tahun 2019 Aset dimaksud dimutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dengan kode barang 03.11.01.11.004 nomor register 0001 tahun perolehan 1995 yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Talise,

Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dengan luasan bangunan 300 m2 dengan nilai pada Neraca Awal sebesar Rp1.194.769.550,00 atau nilai per m2 bangunan adalah sebesar Rp3.982.565,17/m2.

Berdasarkan pada nilai Aset tersebut di atas, maka Aset yang dikerjasamakan dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah seluas 33.020 m2 senilai Rp1.056.640.000,00 (33.020 m2 x Rp32.000).
- Bangunan seluas 635 m2 senilai Rp2.528.928.880,83 (635 m2 x Rp3.982.565,17).
- Aset Perkerasan Jalan seluas 2.709 m2.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran 28

		2020	2019
c)	**Aset Tidak Berwujud**	**Rp5.089.666.619,00**	**Rp4.008.027.676,54**

Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 17, Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa *Software* komputer, Lisensi dan *franchise*, Hak Paten dan Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya, dan ATB dalam Pengerjaan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2020 memiliki Aset Tak Berwujud (ATB) berupa *Software* komputer, saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 disajikan sebesar Rp5.089.666.619,00, saldo tersebut bertambah sebesar Rp1.081.638.942,46 atau naik sebesar 26,99% dari saldo tahun 2019 sebesar Rp4.008.027.676,54. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.102
Aset Tidak Berwujud

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud	6.590.836.875,00	4.563.168.976,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.501.170.256,00)	(555.141.299,46)
Jumlah	**5.089.666.619,00**	**4.008.027.676,54**

1. Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

Nilai perolehan aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp6.590.836.875,00 dan Rp4.563.168.976,00. Pada nilai perolehan aset tidak berwujud tahun 2019 dilakukan koreksi untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur penginputan yang dilakukan oleh pengurus barang OPD/Operator Simda BMD OPD pada aplikasi simda BMD.

Sesuai dengan PSAP 10 paragraf 5, menyatakan bahwa kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Sehingga setelah dilakukan koreksi/perbaikan data berupa ubah kondisi dan ubah riwayat, terjadi perubahan nilai aset tidak berwujud per 1 januari 2020. Atas perubahan tersebut dilakukan jurnal koreksi kesalahan tahun-tahun sebelumnya yakni pada koreksi ekuitas tahun 2020. Adapun mutasi nilai perolehan yang terkoreksi sebagai berikut:

Tabel 5.103
Mutasi Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo Aset Tidak Berwujud 2019	**4.563.168.976,00**
Koreksi Kurang Saldo Awal 2020:	
Koreksi Pencatatan Simda	1.581.817.400,00
Total Berkurang	**1.581.817.400,00**
Saldo Awal 2020	**2.981.351.576,00**
Mutasi Tambah 2020:	
Kapitalisasi (Sumber Barang dan Jasa Rek.5.2.2, Sumber APBD + BOS)	139.886.000,00
Reklasifikasi Aset Tetap Tidak Berwujud	5.958.232.431,00
Total Bertambah	**6.098.118.431,00**
Mutasi Kurang 2020:	
Reklasifikasi Aset Lain-lain	2.488.633.132,00
Total Berkurang	**2.488.633.132,00**
Saldo Aset Tidak Berwujud 2020	**6.590.836.875,00**

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 29 dan 29b.

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Koreksi kurang saldo awal sebesar Rp1.581.817.400,00 merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD.
- Mutasi Tambah:
  a. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp139.886.000,00 merupakan kapitalisasi terhadap Aset Tidak Berwujud (ATB), yang berasal dari belanja barang dan jasa yakni belanja jasa konsultan IT tahun anggaran 2020.
  b. Reklasifikasi ATB sebesar Rp5.958.232.431,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap peralatan dan mesin ke ATB tahun 2020.
- Mutasi Kurang:
  Reklasifikasi ATB sebesar Rp2.488.633.132,00 merupakan perpindahan pencatatan dari ATB ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.458.057.132,00 dan ATB ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.030.576.000,00 tahun 2020.

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.501.170.256,00 dan Rp555.141.299,46. pada nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud tahun 2019 dilakukan koreksi untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur penginputan yang dilakukan oleh pengurus barang OPD/Operator Simda BMD OPD pada aplikasi simda BMD.

Sesuai dengan PSAP 10 paragraf 5, menyatakan bahwa kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Sehingga setelah dilakukan koreksi/perbaikan data berupa ubah kondisi dan ubah riwayat, terjadi perubahan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 1 januari

2020. Atas perubahan tersebut dilakukan jurnal koreksi kesalahan tahun-tahun sebelumnya yakni pada koreksi ekuitas tahun 2020. Adapun rincian mutasi amortisasi aset tidak berwujud sebagai berikut:

Tabel 5.104
Mutasi Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo Awal 2020	**555.141.299,46**
Mutasi Tambah 2020:	**0,00**
Beban Amortisasi 2020	**992.466.628,00**
Total Bertambah	**992.466.628,00**
Mutasi Kurang 2020:	
Koreksi Amortisasi	46.437.671,46
Total Berkurang	**46.437.671,46**
Saldo Aset Tetap Lainnya 2020	**1.501.170.256,00**

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 29a.

		2020	2019
d)	**Aset Lain-lain**	**Rp276.450.834.227,99**	**Rp90.478.959.376,07**

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Dana Bergulir. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp276.450.834.227,99 dan Rp90.478.959.376,07. Aset lain-lain per 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp185.971.874.851,92 atau 205,54% dari saldo tahun 2019 sebesar Rp90.478.959.376,07. Berikut rincian perubahan nilai aset lain-lain:

Tabel 5.105
Mutasi Aset Lain-Lain

Jenis Aset Lainnya	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Aset Tetap Rusak Berat	577.280.819.907,72	785.869.781.756,73
Akm. Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	*(346.570.033.671,73)*	*(696.566.739.179,66)*
Aset lain-lain lainnya	45.740.047.992,00	1.175.916.799,00
Jumlah	**276.450.834.227,99**	**90.478.959.376,07**

Lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 30 dan 30a

Pada nilai aset lain-lain tahun 2019 dilakukan koreksi untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur penginputan yang dilakukan oleh pengurus barang OPD/Operator Simda BMD OPD pada aplikasi simda BMD yang mengakibatkan adanya nilai aset tetap rusak berat dan akumulasi penyusutan aset tetap rusak berat yang tidak masuk dalam neraca.

Sesuai dengan PSAP 10 paragraf 5, menyatakan bahwa kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Sehingga setelah dilakukan koreksi/perbaikan data berupa ubah kondisi dan ubah riwayat, terjadi perubahan nilai aset tetap rusak berat per 1 Januari 2020 dan akumulasi penyusutan aset tetap rusak berat per 1 Januari 2020. Atas perubahan tersebut dilakukan jurnal koreksi kesalahan tahun-tahun sebelumnya yakni pada koreksi ekuitas tahun 2020. Adapun nilai yang terkoreksi sebagai berikut:

Tabel 5.106
Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Aset Lain-Lain Tahun 2020

Uraian	LK Audited 2019	Koreksi saldo awal	Saldo Awal 1 Januari 2020
Aset Tetap Rusak Berat	785.869.781.756,73	(68.868.954.060,00)	717.000.827.696,73
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	*(696.566.739.179,66)*	*349.423.314.040,72*	*(347.143.425.138,94)*
Aset Lain-lain Lainnya	1.175.916.799,00	45.140.028.033,00	46.315.944.832,00
Jumlah Aset Lainnya	**90.478.959.376,07**	**325.694.388.013,72**	**416.173.347.389,79**

1. Aset Tetap Rusak Berat

Saldo kondisi aset tetap rusak berat tahun 2020 sebesar Rp577.280.819.907,72, turun sebesar Rp208.588.961.849,01 atau 26,54% dari saldo tahun 2019 sebesar Rp785.869.781.756,73.

Tabel 5.107
Mutasi Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Tidak Ditemukan

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo Aset RB/Hilang/Tidak Diketemukan 2019	**785.869.781.756,73**
Koreksi Tambah Saldo Awal 2020:	
Koreksi Extra Kompatabel	400.000,00
Koreksi Pencatatan Simda	178.810.564,00
Total Bertambah	**179.210.564,00**
Koreksi Kurang Saldo Awal 2020:	
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain Lainnnya	69.048.164.624,00
Total Berkurang	**69.048.164.624,00**
Saldo Awal 2020	**717.000.827.696,73**
Mutasi Tambah 2020:	
Reklas dari Aset Tetap	47.234.525.334,00
Mutasi Antar SKPD	465.160.900,00
Total Bertambah	**47.699.686.234,00**
Mutasi Kurang 2020:	
Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2020	10.816.606.425,01
Mutasi Antar SKPD	465.160.900,00
Reklas ke Aset Tetap	176.137.926.698,00
Total Berkurang	**187.419.694.023,01**
Saldo Aset RB/Hilang/Tidak Diketemukan 2020	**577.280.819.907,72**

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Saldo Awal, merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD berupa perbaikan pencatatan riwayat ubah kondisi, riwayat ubah nilai, riwayat ubah kapitalisasi dan lain-lain.
2. Mutasi Tambah:
   a. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp47.234.525.334,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap yang kondisinya rusak berat/hilang/tidak ditemukan tahun 2020.
   b. Mutasi antar SKPD sebesar Rp465.160.900 merupakan perpindahan aset kondisi rusak berat dari OPD yang satu ke OPD lain dibuktikan dengan berita acara mutasi aset tahun 2020.
3. Mutasi Kurang:
   a. Penghentian penggunaan/Penghapusan sebesar Rp10.816.606.425,01 adalah penghapusan aset kondisi rusak berat/hilang/tidak ketemukan melalui mekanisme penghapusan/pemusnahan dan penjualan/lelang kendaraan tahun 2020.

b. Mutasi antar SKPD sebesar Rp465.160.900 merupakan perpindahan aset kondisi rusak berat dari OPD yang satu ke OPD lain dibuktikan dengan berita acara mutasi aset tahun 2020.

c. Reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp176.137.926.698,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset kondisi RB/Hilang/tidak ditemukan direklas ke aset tetap karena aset dimaksud direhabilitasi maupun aset dimaksud sudah ditemukan dan dalam kondisi baik/rusak ringan.

Berdasarkan laporan mutasi Barang Inventaris tahun 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset dalam kondisi rusak berat/hilang/tidak ditemukan sebanyak 151.763 unit/eks/paket/buah /pohon/ekor, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.108
Jumlah Unit Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Tidak Ditemukan Tahun 2020

Nama Bidang Barang	Total Aset 2020	
	Unit	Satuan
Peralatan dan Mesin	**28.605**	
- Alat -Alat Besar	55	Unit
- Alat -Alat Angkutan	668	Unit
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	762	Unit
- Alat Pertanian	146	Unit
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.874	Unit
- Alat Studio dan Komunikasi	1.362	Unit
- Alat Kedokteran	1.170	Unit
- Alat Laboratorium	1.543	Unit
- Alat Alat Persenjataan / Keamanan	25	Unit
Golongan Gedung dan Bangunan	**669**	
- Bangunan Gedung	660	Unit
- Monumen	9	Unit
Golongan Jalan Irigasi dan Jaringan	**392**	
- Jalan dan Jembatan	172	Unit
- Bangunan Air Irigasi	16	Paket
- Instalasi	178	Paket
- Jaringan	26	Paket
Golongan Aset Tetap Lainnya	**122.097**	
- Buku dan Perpustakaan	1.567	Eks
- Barang Bercorak Kebudayaan	154	Buah
- Hewan dan Ternak serta Tanaman	53	Ekor/Pohon
- Aset Renovasi	1	
JUMLAH	**151.763**	**Unit/Eks/ Buah/Paket**

2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat

Saldo Akumulasi Penyusutan aset tetap rusak berat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2020 sebesar (Rp346.570.033.671,73) berkurang sebesar Rp349.996.705.507,93 atau 50,25% dari saldo tahun 2019 sebesar (Rp696.566.739.179,76). Perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.109
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 2020

Nama Barang	Saldo (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat 2019	**696.566.739.179,76**
Koreksi Kurang	**(349.423.314.040,72)**
Akumulasi Penyusuran Aset Tetap Rusak Berat 1 Januari 2020	**347.143.425.139,04**
Beban Penyusutan Tahun 2020	(573.391.467,21)
Jumlah Akumulasi Penyusuran Aset Tetap Rusak Berat 2020	**346.570.033.671,73**
Terdiri Dari :	
Ak. Peny. Peralatan dan Mesin (RB)	160.792.757.009,73
Ak. Peny. Gedung dan Bangunan (RB/dimanfaatkan pihak lain)	45.152.462.474,00
Ak. Peny. Jalan, Irigasi dan Jaringan (RB)	140.624.814.188,00

Untuk lebih jelasnya data akumulasi penyusutan dapat dilihat dalam lampiran 30b.

3. Aset Lain-lain Lainnya

Aset Lain-lain Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp45.740.047.992,00 dan Rp1.175.916.799,00. Aset Lain-lain Lainnya per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp44.564.131.193,00 atau 3.789,74% dari tahun 2019. Aset Lainnya terdri dari :

Tabel 5.110
Mutasi Aset Lain-lain Lainnya

No	Uraian	2020	2019
1	Aset Belum Jelas Statusnya	35.593.595.077,00	-
2	Aset dipinjam pakai	8.424.148.054,00	-
3	*Akum. Penyusutan Aset dipinjam pakai*	*(1.782.494.244,00)*	-
4	Aset Penjualan Kendaraan dan Rumah Dinas	*3.504.799.105,00*	
5	Dana bergulir Pokok	1.264.439.798,34	1.175.916.799,34
6	*Penyisihan dana Bergulir*	*(1.264.439.798,34)*	-
	Jumlah Aset Lain-lain Lainnya	**45.740.047.992,00**	**1.175.916.799,34**

a. Aset Belum Jelas Statusnya

Saldo aset belum jelas statusnya tahun 2020 sebesar Rp35.593.595.077, turun sebesar Rp9.797.420.783,00 atau 21,58% dari saldo tahun 2019 sebesar Rp45.391.015.860,00. Berikut rincian perubahan aset belum jelas statusnya:

Tabel 5.111
Mutasi Aset Belum Jelas Statusnya

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo 2019	0,00
Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	45.391.015.860,00
Saldo Awal 2020	**45.391.015.860,00**
Mutasi Tambah 2020:	
Reklasifikasi dari Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.360.227.000,00
Reklasifikasi dari Tanah	21.497.385.000,00
Total Bertambah	**22.857.612.000,00**
Mutasi Kurang 2020:	
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	4.070.450.532,00
Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jarigan	28.476.986.251,00
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	107.596.000,00
Total Berkurang	**32.655.032.783,00**
Saldo Akhir 2020	**35.593.595.077,00**

Penjelasan atas mutasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah:
   - Reklasifikasi dari aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya sebesar Rp1.360.227.000,00 merupakan aset tanah yang sebelumnya tercatat pada aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya.
   - Reklasifikasi dari Tanah sebessar Rp21.497.385.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset tetap ke aset lain-lain yakni tanah yang bermasalah (termasuk tanah yang dijual tahun 2010 dan 2011).
2. Mutasi Kurang:
   a. Reklasifikasi ke aset tidak berwujud sebesar Rp4.070.450.532,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset belum jelas statusnya. Nilai tersebut diinput secara gelondongan pada tahun 2019 pada aset belum jelas statusnya dan tahun 2020 direklasifikasi dan diinput rinci pada aset tidak berwujud.

b. Reklasifikasi ke aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp28.476.986.251,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset belum jelas statusnya. Reklasifikasi dari aset belum jelas statusnya ke aset jalan, irigasi dan jaringan karena aset tersebut telah jelas dan memenuhi syarat untuk diakui dan dicatat pada aset jalan, irigasi dan jaringan.

c. Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp107.596.000,00 merupakan perpindahan pencatatan dari aset belum jelas statusnya. Reklasifikasi dari aset belum jelas statusnya ke aset aset gedung dan bangunan karena aset tersebut telah jelas dan memenuhi syarat untuk diakui dan dicatat pada aset aset gedung dan bangunan.

2. Aset Pinjam Pakai

Aset pinjam pakai per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.424.148.054,07 yang terdiri dari :

No	Uraian	2020
1	Tanah	4.612.618.000,00
2	Gedung dan Bangunan	3.811.530.054,07
	Jumlah Aset Pinjam Pakai	**8.424.148.054,07**

Lebih rinci aset pinjam pakai dapat dilihat pada lampiran 28a dan 30e

3. Akumulasi Penyusutan Aset Dipinjam Pakai

Akumulasi Penyusutan Aset Dipinjam Pakai per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.782.494.244,00 merupakan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang dipinjam pakai.

4. Aset Penjualan Kendaraan dan Rumah Dinas

Aset penjualan kendaraan dan rumah dinas sebesa Rp3.504.799.105,00 merupakan Koreksi dan reklasifikasi piutang tagihan penjualan angsuran rumah dinas tahun 2010-2011 sebesar Rp1.541.855.560 dan kendaraan dinas 2010-2011 sebesar Rp1.962.943.545 yang tidak memenuhi definisi piutang karena proses penjualan yang belum sesuai ketentuan sehingga diklasifikasikan ke akun Aset Lain-Lain lainnya *Lebih rinci aset pinjam pakai dapat dilihat pada lampiran 30c, 30f, 30g, dan 30h.*

5. Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan nilai dana bergulir yang tidak dapat tertagih. Jumlah nilai dana bergulir yang tidak dapat tertagih per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.264.439.798,38, dan Rp1.175.916.799,00.

Ketambahan nilai dana bergulir per 31 Desember 2020 sebesar Rp88.330.999,34 karena adanya reklas dari piutang dan dilakukan penyisihan dana bergulir sesuai kebijakan akuntansi yang menyatakan bahwa dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value).* Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangkan dana bergulir dengan penyisihan dana bergulir.

dapat di uraikan sebagai berikut :

a.	Pokok	Rp 619.700.796,00
b.	Bunga	Rp 133.658.166,00
c.	Denda	Rp 511.080.836,34
		Rp 1.264.439.798,34
d.	Penyisihan Dana Bergulir	(Rp1.264.439.798,34)
	Jumlah Dana Bergulir setelah disisihkan	**Rp 0,00**

Lebih rinci aset pinjam pakai dapat dilihat pada lampiran 30c dan 30d

5.3.2 Kewajiban	**2020**	**2019**
	Rp 118.013.807.795,88	**Rp 102.430.254.139,19**

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan, pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional.

Kewajiban per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp118.013.807.795,88 dan Rp102.430.254.139,19. Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kewajiban jangka pendek dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.112
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	1.349.379,00
Pendapatan Diterima Dimuka	161.510.603,99	150.603.986,66
Utang Belanja	113.181.040.262,89	502.093.414,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.671.256.929,00	101.776.207.359,53
Jumlah	**118.013.807.795,88**	**102.430.254.139,19**

a)	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2020	2019
		Rp 0,00	Rp1.349.379,00

Per 31 Desember 2019 utang perhitungan fihak ketiga sebesar Rp1.349.379,00. Utang tersebut merupakan utang pajak PPh 21 pada RSUD Undata. Namun oleh RSUD Undata pajak PPh 21 tersebut disetor ke Kas Daerah (BUD) pada tanggal 16 Mei 2017 No. BKU 8917/17 yang sesungguhnya harus disetor ke Kas Negara (RKUN).

Oleh BUD melalui SP2D 16700/SP2D-LS/BPKAD/2020 sebesar Rp1.349.379,00 dilakukan pembayaran kembali kepada Bendahara Pengeluaran RSUD Undata yang selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran RSUD Undata melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan kode billing 024764417687082. Sehingga utang perhitungan fihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. *Rincian utang perhitungan fihak ketiga dapat dilihat dalam lampiran 31*.

b).	Pendapatan Diterima Dimuka	2020	2019
		Rp 161.510.603,99	Rp 150.603.986,66

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan daerah yang telah diterima pada rekening kas umum daerah, namun belum sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi, atau pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk beberapa periode akuntansi.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp161.510.603,99 dan Rp150.603.986,66, timbul dari penerimaan daerah sehubungan dengan adanya perjanjian atas pemakaian fasilitas pemerintah daerah oleh pihak ketiga yang melebihi satu periode akuntansi dan adanya pembayaran wajib pajak daerah dengan masa pajak lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 5.113
Daftar Pendapatan Diterima Dimuka 2020

Uraian	Lokasi	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Sewa Alat Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	8.366.666,66	32.883.333,33
Sewa tanah dan bangunan	Sekretariat Daerah	67.797.693,33	100.220.653,33
Sewa tanah dan bangunan	RSUD. Undata	20.279.149,33	-
Sewa Bangunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	55.866.666,67	17.500.000,00
Sewa Bangunan	Dinas Penanaman Modal	9.200.428,00	-
JUMLAH		**161.510.603,99**	**150.603.986,66**

Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan pada lampiran 32.

c)	**Utang Belanja**	**2020**	**2019**
		Rp113.181.040.262,89	**Rp502.093.414,00**

Utang belanja merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul sehubungan dengan adanya pemakaian atau konsumsi barang/jasa namun kas belum dikeluarkan dari rekening kas daerah. Utang belanja per 31 Desember 2020 dan 2019 tecatat sebesar Rp113.181.040.262,89 dan Rp502.093.414,00 merupakan kewajiban atas belanja jasa yang telah digunakan namun belum dilakukan pembayaran dari rekening kas daerah. Penyajian utang belanja tahun 2020 meningkat jika dibandingkan tahun 2019, hal tersebut disebabkan karena adanya reklasifikasi peyajian hutang belanja tahun 2019 yang sebelumnya dicatat pada hutang jangka pendek lainnya.

Tabel 5.114
Utang Belanja Tahun 2020

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Utang Belanja Pegawai	8.183.166.849,00	-
Utang Belanja Barang dan Jasa	43.707.520.019,89	502.093.414,00
Utang Belanja Modal	2.520.494.187,00	-
Utang Transfer	58.769.859.207,00	-
Jumlah	**113.181.040.262,89**	**502.093.414,00**

Rincian utang belanja disajikan pada lampiran 33.

1. Utang Belanja Pegawai

   Utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.183.166.849,00 dengan rincian utang belanja pegawai sebagai berikut :

   - Tunjangan Profesi Guru Rp 7.151.120.605,00
   - Tunjangan Khusus Guru Rp 39.470.744,00
   - Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp 413.675.500,00
   - Utang Pegawai BLUD Rp 578.900.000,00

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

   Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp43.707.520.019,89 dengan rincian utang belanja barang dan jasa sebagai berikut :

   - Utang Belanja Jasa Kantor Rp 388.308.750,00
   - Utang Belanja Jasa Konsultansi Rp 182.241.600,00
   - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp43.136.969.669,89

3. Utang Belanja Modal

Utang belanja modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.520.494.187,00 dengan rincian utang belanja barang dan jasa sebagai berikut :

- Utang Belanja Modal - Aset Tetap
  Peralatan dan Mesin Rp 98.871.487,00
- Utang Belanja Modal - Aset Tetap
  Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 2.421.622.700,00

4. Utang Transfer

Utang transfer per 31 Desember 2020 sebesar Rp58.769.859.207,00 merupakan utang transfer bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota yang terdiri dari :

- Bagi hasil pendapatan PKB Rp17.248.005.950,00
- Bagi hasil pendapaan BBNKB Rp12.616.938.760,00
- Bagi hasil pendapatan PPBKB Rp27.407.906.800,00
- Bagi hasil pendapatan PAP Rp 1.497.007.697,00

Lebih rinci utang transfer disajikan lampiran 35.

d)	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	**2020**	**2019**
		Rp 4.671.256.929,00	**Rp101.776.207.359,53**

Utang jangka pendek lainnya merupakan pos untuk menampung utang diluar utang perhitungan fihak ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka pendek, utang kepada pihak ketiga dan utang bunga yang belum direalisasikan pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan, termasuk utang belanja kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah direalisasikan dari Kas Umum Daerah, namun belum dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada yang berhak/pelaksana kegiatan.

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp4.671.256.929,00 dan Rp101.776.207.359,53. Penyajian utang jangka pendek lainnya tahun 2020 menurun jika dibandingkan tahun 2019, hal tersebut disebabkan karena adanya reklasifikasi kurang peyajian utang jangka pendek lainnya tahun 2019 ke hutang belanja. utang jangka pendek lainnya terdiri dari:

Tabel 5.115
Utang Jangka Pendek Lainnya 2020

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	4.640.744.829,00	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	30.512.100,00	101.776.207.359,53
Jumlah	**4.671.256.929,00**	**101.776.207.359,53**

1. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

   Utang kelebihan pembayaran transfer per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.640.744.829,00 merupakan utang atas kelebihan penerimaan pembayaran dana dari pusat dengan rincian sebagai berikut :

   - Tagihan pengembalian pendapatan Transfer DAK Pariwisata sebesar Rp341.984.829,00
   - Sisa Dana BOS Reguler 2019 yang masih ada di rekening Kas Daerah dan belum disalurkan/jelas statusnya sebesar Rp4.298.760.000,00

2. Utang Jangka Pendek Lainnya

   Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.512.100 merupakan utang pelaksanaan kegiatan pada :

   - Dinas Pendidikan Rp 4.062.100,00
   - Dinas Pertanian Rp 26.450.000,00

Rincian Hutang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat dalam lampiran 33.

5.3.3 Ekuitas	**2020**	**2019**
	Rp6.390.574.800.087,66	**Rp6.012.626.098.544,27**

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban. Perubahan format neraca akrual terutama pada kelompok ekuitas, dimana dalam laporan sebelumnya (*basics cash basics to accrual*) terdiri atas 3 jenis ekuitas yaitu: Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana di investasikan, dan Ekuitas Dana cadangan. Pada format neraca basis akrual hanya terdapat 1 pos ekuitas yaitu Ekuitas. Secara umum penyajian dalam format neraca akrual untuk pos ekuitas pada dasarnya merupakan penggabungan dari 3 pos ekuitas. Berikut ini saldo ekuitas dana per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.390.574.800.087,66 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.116
Mutasi Saldo Ekuitas

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Saldo Awal Ekuitas	6.012.626.098.544,27	5.239.731.314.140,64
Mutasi Ekuitas	377.948.701.543,39	772.894.784.403,63
Nilai Ekuitas Akhir	**6.390.574.800.087,66**	**6.012.626.098.544,27**

Berdasarkan mutasi ekuitas tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Saldo awal ekuitas sebesar Rp6.012.626.098.544,27 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2019.
b. Mutasi tahun 2020 sebesar Rp377.948.701.543,39 adalah penambahan dari Surplus/defisit-LO sebesar Rp313.744.562.929,63 ditambahkan dengan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp64.204.138.613,76.
c. Saldo akhir tahun 2020 adalah merupakan saldo ekuitas akrual pada neraca sebesar Rp6.390.574.800.087,66. Nilai tersebut berbanding sama dengan nilai pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan, yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas, dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.Tujuannya adalah memberikan informasi, tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban - LO, Surplus/defisit Kegiatan Operasional, Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional (bila ada), Pos Luar Biasa (bila ada) dan Surplus/Defisit-LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi Pendapatan-LO dan beban - LO, untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
c) Yang berguna dalam memprediksi Pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah, dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

d) Kepada para pengguna laporan tentang indikasi efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

e) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*), sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya.

5.4.1 Pendapatan – LO	**2020**	**2019**
	Rp 3.821.710.781.330,37	**Rp4.355.223.682.033,42**

Pendapatan - LO sebesar Rp 3.821.710.781.330,37 adalah hak Pemerintah Daerah, yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO, apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan, yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan operasional adalah sebesar Rp3.821.710.781.330,37 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO sebesar Rp1.153.918.332.147,52 Pendapatan Transfer–LO sebesar Rp2.600.610.433.395,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO sebesar Rp67.182.015.787,85. Berikut disajikan rekapitulasi Pendapatan - LO Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 5.117
Rekapitulasi Pendapatan - LO tahun 2020

Uraian	Saldo (Rp) 2020	Saldo (Rp) 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	1.153.918.332.147,52	1.163.727.554.484,33	(9.809.222.336,81)	(0,84)
Pendapatan Transfer - LO	2.600.610.433.395,00	3.023.584.911.097,00	(422.974.477.702,00)	(13,99)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah_LO	67.182.015.787,85	167.911.216.452,09	(100.729.200.664,24)	(59,99)
Jumlah	**3.821.710.781.330,37**	**4.355.223.682.033,42**	**(533.512.900.703,05)**	**(12,25)**

Jika capaian Pendapatan – LO tahun 2020 sebesar Rp3.821.710.781.330,37 dibandingkan dengan Pendapatan – LO tahun 2019 sebesar Rp4.355.223.682.033,42 maka terjadi penurunan sebesar Rp533.512.900.703,05 atau 12,25%. Dapat dijelaskan dalam grafik dibawah ini:

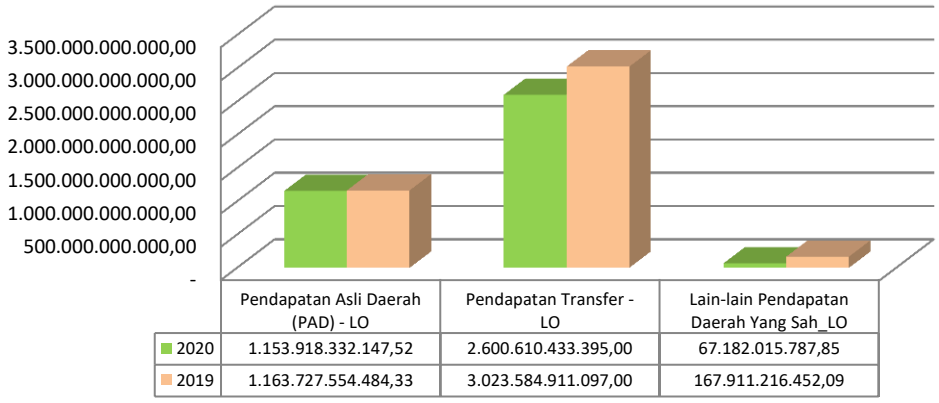

Gambar 5.8
Perbandingan Pendapatan-LO 2020 dan 2019

Pendapatan - LO Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di dominasi Pendapatan transfer pemerintah pusat. Pendapatan tersebut masuk dalam kelompok Pendapatan transfer. Berikut disajikan rincian komposisi realisasi Pendapatan – LO pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.118
Komposisi Realisasi Pendapatan-LO tahun 2020

Uraian	2020 (Rp)	(%)
Pendapatan - LO	**3.821.710.781.330,37**	**100,00**
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	1.153.918.332.147,52	30,19
Pendapatan Transfer - LO	2.600.610.433.395,00	68,05
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	67.182.015.787,85	1,76

Komposisi realisasi perjenis Pendapatan - LO terhadap total pendapatan - LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 juga dapat dilihat dalam bentuk grafik berikut:

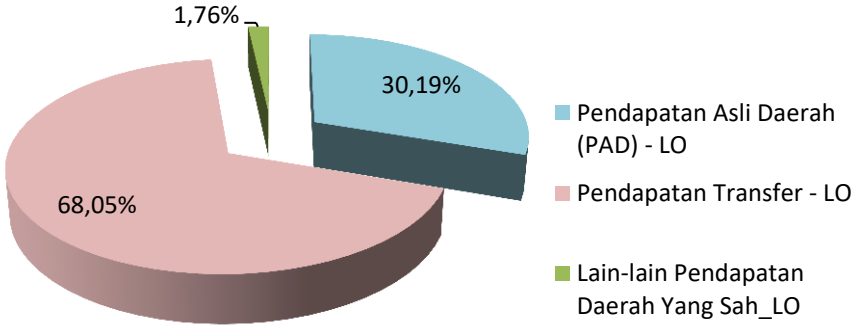

Gambar 5.9
Komposisi Pendapatan - LO tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas, tahun 2020 komposisi terbesar atas pendapatan - LO adalah Pendapatan Transfer - LO sebesar 68,05% dari total pendapatan. Sedangkan komposisi terendah atas pendapatan adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah - LO sebesar 1,76%. Pendapatan Asli Daerah – LO dengan komposisi sebesar 30,19% terhadap total pendapatan. Rincian Pendapatan – LO adalah sebagai berikut :

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	**2020**	**2019**
	Rp1.153.918.332.147,52	**Rp1.163.727.554.484,33**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah secara maksimal dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah – LO pada tahun 2020 sebesar Rp1.153.918.332.147,52. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.163.727.554.484,33 maka terjadi penurunan sebesar Rp9.809.222.336,81 atau 0,84%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119
Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	915.678.224.318,70	897.127.735.155,00	18.550.489.163,70	2,07
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	14.442.114.805,58	12.941.066.055,42	1.501.048.750,16	11,60
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	66.742.299.552,32	62.036.454.577,66	4.705.844.974,66	7,59
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	157.055.693.470,92	191.622.298.696,25	(34.566.605.225,33)	(18,04)
Jumlah	**1.153.918.332.147,52**	**1.163.727.554.484,33**	**(9.809.222.336,81)**	**(0,84)**

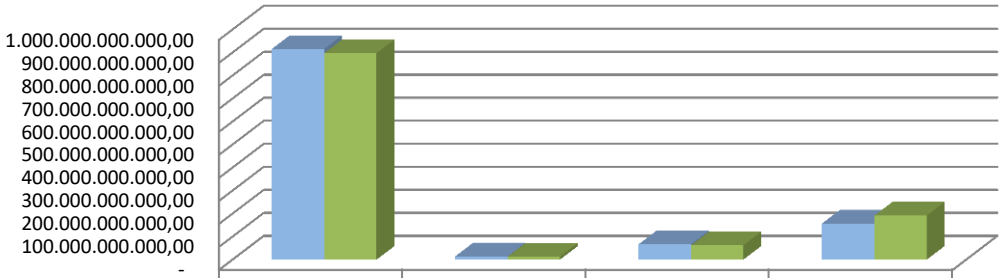

	Pendapatan Pajak Daerah - LO	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Lain-lain PAD Yang Sah - LO
2020	915.577.024.318,70	14.442.114.805,58	66.742.299.552,32	157.156.893.470,92
2019	897.127.735.155,00	12.941.066.055,42	62.036.454.577,66	191.622.298.696,25

Gambar 5.10
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah LO 2020 dan 2019

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Dearah LO untuk periode tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan. Lain-lain PAD yang Sah – LO mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yakni sebesar Rp34.566.605.225,33 atau 18,04%.

Namun demikian disisi lain pendapatan pajak daerah-LO mengalami peningkatan sebesar Rp18.550.489.163,70 atau 2,07%, pendapatan retribusi daerah – LO mengalami peningkatan sebesar Rp1.501.048.750,16 atau 11,60% dan pedapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO mengalami peningkatan sebesar Rp4.705.844.974,66 atau 7,59%.

a)	**Pendapatan Pajak Daerah - LO**	**2020**	**2019**
		Rp915.678.224.318,70	**Rp897.127.735.155,00**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional secara *cash basic* diakui pada saat kas diterima, hal ini disesuaikan dengan kebijakan lain yang mendasarinya, namun secara *accrual* realisasi Pendapatan LO diakui setelah timbul hak.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp915.678.224.318,70. Realisasi pendapatan tersebut meningkat sebesar Rp18.550.489.163,70 atau 2,07% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar

Rp897.127.735.155,00. Berikut disajikan dalam tabel komposisi realisasi Pendapatan Pajak Daerah:

Tabel 5.120
Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Kendaraan Bermotor - LO	245.750.055.645,00	244.911.644.390,00	838.411.255,00	0,34
BBNKB - LO	225.916.116.700,00	280.461.607.145,00	(54.545.490.445,00)	(19,45)
PBB-KB - LO	216.624.694.929,00	226.514.220.206,00	(9.889.525.277,00)	(4,37)
Pajak Air Permukaan - LO	12.062.969.691,70	10.624.092.915,00	1.438.876.776,70	13,54
Pajak Rokok - LO	215.324.387.353,00	134.616.170.499,00	80.708.216.854,00	59,95
JUMLAH	**915.678.224.318,70**	**897.127.735.155,00**	**18.550.489.163,70**	**2,07**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB-LO) menurun sebesar Rp54.545.490.445,00 atau 19,45% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO (PBB-KB) menurun sebesar Rp9.889.525.277,00 atau 4,37% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

Disisi lain Pendapatan Pajak Rokok-LO mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp80.708.216.854,00 atau 59,95% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pajak Air Permukaan juga mengalami peningkatan sebesar Rp1.438.876.776,70 atau 13,54% sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor hanya mengalami peningkatan sebesar Rp838.411.255,00 atau 0,34% jika dibandingkan dengan tahun 2019.

		2020	2019
b)	**Pendapatan Retribusi Daerah - LO**	**Rp 14.442.114.805,58**	**Rp 12.941.066.055,42**

Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan atas Undang–Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dipungut dan dikelola oleh 23 SKPD penghasil.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada tahun 2020 sebesar Rp14.442.114.805,58 mengalami peningkatan sebesar Rp1.501.048.750,16 atau

11,60% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp12.941.066.055,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121
Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	456.512.200,00	1.642.200.000,00	(1.185.687.800,00)	(72,20)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	4.400.000,00	26.250.000,00	(21.850.000,00)	(83,24)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	3.167.179.570,58	4.308.502.173,42	(1.141.322.602,84)	(26,49)
Retribusi Terminal - LO	39.971.000,00	32.611.000,00	7.360.000,00	22,57
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	2.771.015.450,00	3.030.289.850,00	(259.274.400,00)	(8,56)
Retribusi Penyebrangan Air - LO	109.503.979,00	145.346.232,00	(35.842.253,00)	(24,66)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	1.345.823.400,00	3.207.822.200,00	(1.861.998.800,00)	(58,05)
Retribusi Izin Trayek - LO	15.215.000,00	11.292.600,00	3.922.400,00	34,73
Retribusi Izin Perikanan - LO	6.064.489.850,00	390.215.000,00	5.674.274.850,00	1.454,14
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	468.004.356,00	146.537.000,00	321.467.356,00	219,38
Jumlah	**14.442.114.805,58**	**12.941.066.055,42**	**1.501.048.750,16**	**11,60**

Berdasarkan tabel di atas, peningkatan signifikan terdapat pada realisasi Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan tahun 2020 sebesar Rp6.064.489.850,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 atau meningkat 1.454,14%.

		2020	2019
c)	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO**	**Rp66.742.299.552,32**	**Rp62.036.454.577,66**

Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada laporan LO pada Tahun 2020 sebesar Rp66.742.299.552,32. Jika Pendapatan tersebut dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp62.036.454.577,66 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.705.844.974,66 atau 7,59%. Pendapatan tersebut diuraikan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.122
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan)	(%)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	66.552.692.440,32	61.561.586.672,66	4.991.105.767,66	8,11
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO	189.607.112,00	474.867.905,00	(285.260.793,00)	(60,07)
Jumlah	**66.742.299.552,32**	**62.036.454.577,66**	**4.705.844.974,66**	**7,59**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terbesar diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bagian Laba atas Penyertaan

Modal Perusahaan Milik Daerah/BUMD-LO yakni sebesar Rp66.552.692.440,32 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.991.105.767,66 atau 8,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan Milik Swasta-LO mengalami penurunan sebesar Rp285.260.793,00 atau 60,07%.

		2020	2019
d)	**Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO**	**Rp157.055.693.470,92**	**Rp191.622.298.696,55**

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO pada tahun 2020 sebesar Rp157.055.693.470,92. Jika Pendapatan tersebut dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp191.622.298.696,25 maka terjadi penurunan sebesar Rp34.566.605.225,33 atau 18,04%.dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.123

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO	986.247.398,01	-	986.247.398,01	-
Penerimaan Jasa Giro - LO	13.832.780.653,81	17.219.360.818,85	(3.386.580.165,04)	(19,67)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	11.154.000,00	-	11.154.000,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	176.742.257,00	886.264.001,14	(709.521.744,14)	(80,06)
Pendapatan Denda Pajak - LO	5.162.779.487,00	15.705.947.996,00	(10.543.168.509,00)	(67,13)
Pendapatan dari Pengembalian -LO	714.451.181,08	-	714.451.181,08	-
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO	1.030.750.000,00	4.897.355.000,00	(3.866.605.000,00)	(78,95)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	1.164.735.466,67	-	1.164.735.466,67	-
Pendapatan BLUD - LO	132.543.942.930,13	134.499.385.882,61	(1.955.442.952,48)	(1,45)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	1.432.110.097,22	18.413.984.997,65	(16.981.874.900,43)	(92,22)
Jumlah	**157.055.693.470,92**	**191.622.298.696,25**	**(34.566.605.225,33)**	**(18,04)**

Tabel 5.120 menunjukkan bahwa rincian obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO seluruhnya mengalami penurunan. Penurunan Lain-lain Pendapatan yang Sah disebabkan adanya penurunan pendapatan yang signifikan pada Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO yang menurun sebesar Rp16.981.874.900,43 atau 92,22%, Pendapatan Denda atas Keterlambatan menurun sebesar Rp709.521.744,14 atau 80,06%, Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat-LO menurun sebesar

Rp3.866.605.000,00 atau 78,95% dan Pendapatan Denda Pajak-LO sebesar Rp10.543.168.509,00 atau 67,13%. Menurunnya pendapatan salah satunya dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid-19 yang membatasi setiap aktivitas.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer

2020	2019
Rp2.600.610.433.395,00	**Rp3.023.584.911.097,00**

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pendapatan Transfer – LO pada Tahun 2020 sebesar Rp2.600.610.433.395,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp3.023.584.911.097,00 mengalami penurunan sebesar Rp422.974.477.702,00 atau 13,99%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124
Rekapitulasi Pendapatan Transfer – LO

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	2.575.681.809.395,00	2.994.301.818.097,00	(418.620.008.702,00)	(13,98)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	24.928.624.000,00	20.694.982.000,00	4.233.642.000,00	20,46
Bantuan Keuangan - LO	-	8.588.111.000,00	(8.588.111.000,00)	(100,00)
JUMLAH	**2.600.610.433.395,00**	**3.023.584.911.097,00**	**(422.974.477.702,00)**	**(13,99)**

Berdasarkan Perbandingan capaian Pendapatan Transfer - LO tahun 2020 dan tahun 2019 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

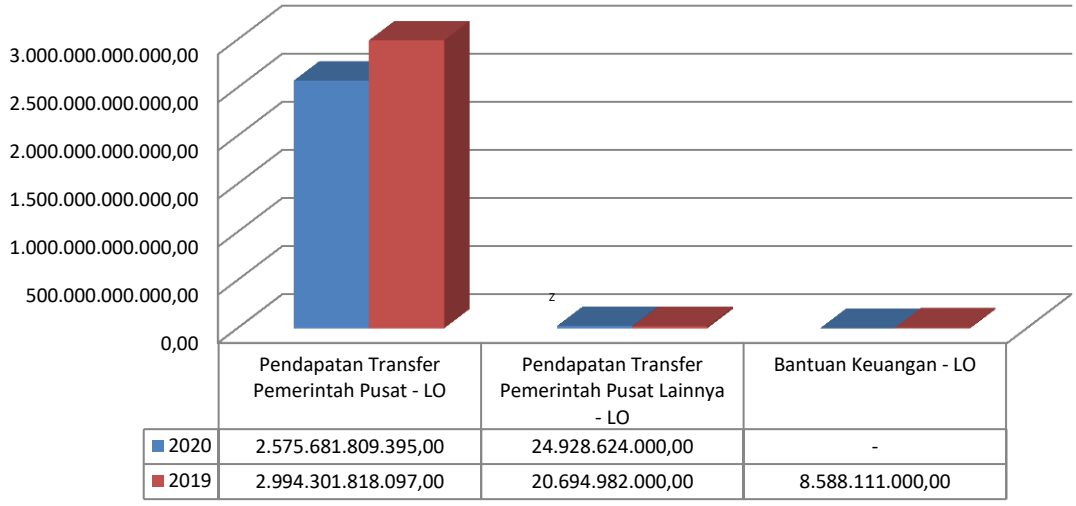

Gambar 5.11
Perbandingan Pendapatan Transfer - LO tahun 2020 dan tahun 2019

a)	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO**	**2020**	**2019**
		Rp2.575.681.809.395,00	**Rp2.994.301.818.097,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO pada tahun 2020 sebesar Rp2.575.681.809.395,00. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.994.301.818.097,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp418.620.008.702,0,00 atau 13,98%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125
Rekapitulasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagi Hasil Pajak - LO	89.136.505.394,00	51.489.956.127,00	37.646.549.267,00	73,11
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	186.784.605.210,00	98.123.993.969,00	88.660.611.241,00	90,36
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.488.847.818.000,00	1.637.588.970.000,00	(148.741.152.000,00)	(9,08)
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	810.912.880.791,00	1.207.098.898.001,00	(396.186.017.210,00)	(32,82)
JUMLAH	**2.575.681.809.395,00**	**2.994.301.818.097,00**	**(418.620.008.702,00)**	**(13,98)**

1. Bagi Hasil Pajak – LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO tahun 2020 sebesar Rp89.136.505.394,00. Jika pendapatan tersebut dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp51.489.956.127,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp37.646.549.267,00 atau 73,11%. Pendapatan tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.126
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan - LO	27.069.787.057,00	22.302.977.438,00	4.766.809.619,00	21,37
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan - LO	806.008.709,00	2.471.105.663,00	-1.665.096.954,00	(67,38)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perhutanan - LO	45.829.200,00	269.158.032,00	-223.328.832,00	(82,97)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	41.324.375.699,00	23.252.589.067,00	18.071.786.632,00	77,72
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	308.925.398,00	2.235.998.945,00	-1.927.073.547,00	(86,18)
PBB (Upah Pungut)	945.978.058,00	958.126.982,00	-12.148.924,00	(1,27)
Bagi Hasi dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya - LO	158.682.117,00	0,00	158.682.117,00	-

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kurang Bayar Bagi Hasil Non Migas Lainnya Bagian Daerah Tahun Anggaran 2019 - LO	121.326.123,00	0,00	121.326.123,00	-
Kurang Bayar Bagi Hasil Migas Lainnya Bagian Daerah Tahun Anggaran 2020 - LO	1.267.513.091,00	0,00	1.267.513.091,00	-
Kurang Bayar DBH PBB Sektor Perkebunan Tahun Anggaran 2019 - LO	113.474.287,00	0,00	113.474.287,00	-
Kurang Bayar DBH PBB Sektor Perhutanan Tahun Anggaran 2019 - LO	7.187.582,00	0,00	7.187.582,00	-
Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah Tahun Anggaran 2019 - LO	28.770.457,00	0,00	28.770.457,00	-
Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 TA. 2019 Yang Dialokasikan TA. 2020 - LO	16.938.647.616,00	0,00	16.938.647.616,00	-
Jumlah	**89.136.505.394,00**	**51.489.956.127,00**	**37.646.549.267,00**	**73,11**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh meningkatnya berapa jenis obyek pendapatan dan adanya penerimaan pendapatan obyek baru. Adapun obyek pendapatan yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah Pendapatan Bagi Hasil dari PBB Sektor Perhutanan - LO Tahun 2020 meningkat sebesar Rp4.766.809.619,00 atau 21,37% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil dari PPh pasal 25 dan pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 - LO Tahun 2019 meningkat sebesar Rp18.071.786.632,00 atau 77,72%, serta adanya penerimaan kurang salur/bayar tahun 2019.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam – LO

Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA - LO tahun 2020 sebesar Rp186.784.605.210,00. Jika capaian Pendapatan tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp98.123.993.969,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp88.660.611.241,00 atau 90,36%. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LO

dikelompokkan menjadi 11 (sebelas) jenis dengan komposisi yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.127
Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA – LO

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	585.325.150,00	1.681.688.627,00	-1.096.363.477,00	(65,19)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	708.769.461,00	859.059.635,00	-150.290.174,00	(17,49)
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO	3.100.046.857,00	6.596.996.676,00	-3.496.949.819,00	(53,01)
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO	2.955.151.195,00	2.283.676.384,00	671.474.811,00	29,40
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	18.663.504.536,00	26.544.169.479,00	-7.880.664.943,00	(29,69)
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	4.822.290.764,00	6.581.153.150,00	-1.758.862.386,00	(26,73)
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	14.388.240.200,00	53.577.250.018,00	-39.189.009.818,00	(73,14)
Kurang Bayar DBH SDA Minerba (Royalti) TA. 2019 - LO	13.958.972.361,00	0,00	13.958.972.361,00	100,00
Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi 15% TA. 2018 Dialokasikan TA. 2020 - LO	4.160.081.229,00	0,00	4.160.081.229,00	100,00
Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi TA. 2019 Dialokasikan TA. 2020 - LO	13.641.355.537,00	0,00	13.641.355.537,00	100,00
Kurang Bayar Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi TA. 2019 - LO	109.800.867.920,00	0,00	109.800.867.920,00	100,00
Jumlah	**186.784.605.210,00**	**98.123.993.969,00**	**88.660.611.241,00**	**90,36**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh adanya penerimaan pendapatan obyek baru, berupa penerimaan pendapatan kurang salur/bayar tahun 2019.

3. Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO tahun 2020 sebesar Rp1.488.847.818.000,00. Jika capaian Pendapatan tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.637.588.970.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp148.741.152.000,00 atau 9,08%.

4. Dana Alokasi Khusus LO

Capaian Dana Alokasi Khusus–LO tahun 2020 sebesar Rp810.912.880.791,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.207.098.898.001,00

maka terjadi penurunan sebesar Rp396.186.017.210,00 atau 32,82%. pendapatan Dana Alokasi Khusus - LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.128
Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Alokasi Khusus Fisik - LO	398.720.423.734,00	355.022.848.001,00	43.697.575.733,00	12,31
Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO	412.192.457.057,00	852.076.050.000,00	(439.883.592.943,00)	(51,62)
Jumlah	**810.912.880.791,00**	**1.207.098.898.001,00**	**(396.186.017.210,00)**	**(32,82)**

b) **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO**

2020	2019
Rp 24.928.624.000,00	**Rp 20.694.982.000,00**

Pada tahun 2020 pemerintah Provinsi Sulawesi mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp24.928.624.000,00. Dana Insentif Daerah tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp4.233.642.000,00 atau 20,46% dari tahun sebelumnya.

c) **Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya - LO**

2020	2019
Rp 0,00	**Rp8.588.111.000,00**

Tahun 2020 tidak terdapat penerimaan atas pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LO yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

2020	2019
Rp67.182.015.787,85	**Rp167.911.216.452,09**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp67.182.015.787,85, jika capaian Pendapatan – LO tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp167.911.216.452,09 maka terjadi penurunan sebesar Rp100.729.200.664,24 atau 59,99%. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO pada tahun 2020 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.129
Rekapitulasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah - LO	66.500.935.261,85	167.911.216.452,09	(101.410.281.190,24)	(60,40)
Pendapatan Lainnya - LO	681.080.526,00	0,00	681.080.526,00	-
JUMLAH	**67.182.015.787,85**	**167.911.216.452,09**	**-100.729.200.664,24**	**(59,99)**

Komposisi Pendapatan Hibah juga dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini:

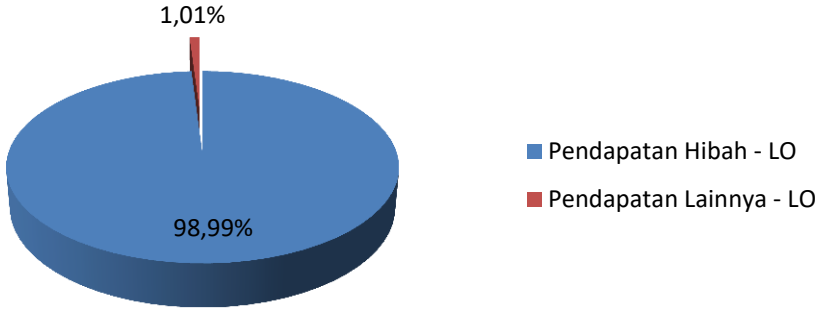

Gambar 5.12
Komposisi Pendapatan Hibah – LO

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, Pendapatan Hibah kontribusi tertinggi sebesar 98,99% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan sisanya adalah pendapatan lainnya sebesar 1,01%.

		2020	2019
a)	**Pendapatan Hibah - LO**	**Rp 66.500.935.261,85**	**Rp 167.911.216.452,09**

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2020 sebesar Rp66.500.935.261,85. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp167.911.216.452,09 maka terjadi penurunan sebesar Rp101.410.281.190,24 atau 60,40%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.130
Rekapitulasi Pendapatan Hibah-LO

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	64.013.136.685,85	11.763.640.215,00	52.249.496.470,85	444,16
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	154.197.791.737,09	(154.197.791.737,09)	(100,00)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO	2.487.798.576,00	1.949.784.500,00	538.014.076,00	27,59
JUMLAH	**66.500.935.261,85**	**167.911.216.452,09**	**(101.410.281.190,24)**	**(60,40)**

		2020	2019
b)	**Pendapatan Lainnya - LO**	**Rp681.080.526,00**	**Rp 0,00**

Pendapatan Lainya-LO pada tahun 2020 sebesar Rp681.080.526,00 merupakan sumbangan pihak ketiga atas bantuan penanggulangan bencana. Di tahun 2019 tidak terdapat penerimaan pendapatan lainya – LO.

5.4.2 Beban	2020	2019
	Rp3.499.154.779.563,84	Rp3.905.654.559.116,70

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban pada tahun 2020 sebesar Rp3.499.154.779.563,84. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp3.905.654.559.116,70 maka terjadi penurunan sebesar Rp406.499.779.552,86 atau 10,41%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.131
Beban tahun 2020

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Operasi	3.003.714.397.505,84	3.460.389.188.419,70	(456.674.790.913,86)	(13,20)
Transfer	495.440.382.058,00	445.265.370.697,00	50.175.011.361,00	11,27
JUMLAH	**3.499.154.779.563,84**	**3.905.654.559.116,70**	**(406.499.779.552,86)**	**(10,41)**

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan beban tahun anggaran 2020 dapat pula digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

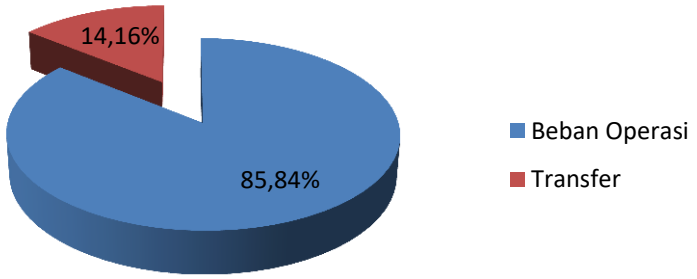

Gambar 5.13
Komposisi Beban-LO tahun 2020

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan dan diuraikan bahwa dari realisasi beban operasi tahun 2020 terdapat sebesar 85,84% adalah beban operasional yang mencakup beban pegawai, beban barang dan jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban lain-lain, dan sebesar 14,16% adalah beban Transfer yang mencakup beban

transfer bagi hasil pajak daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

a)	**Beban Operasi**	**2020**	**2019**
		Rp 3.003.714.397.505,84	**Rp3.460.389.188.419,70**

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi tahun 2020 sebesar Rp3.003.714.397.505,84 jika dibanding dengan tahun sebelumnya, beban operasi tahun 2020 bekurang sebesar Rp456.674.79.913,87 atau 13,20%. Rrincian beban operasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.132
Beban Operasi

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	1.355.874.150.078,00	1.318.530.690.852,00	37.343.459.226,00	2,83
Beban Barang dan Jasa	896.929.145.395,13	966.574.485.372,90	(69.645.339.977,77)	(7,21)
Beban Hibah	354.001.850.000,00	583.016.266.316,34	(229.014.416.316,34)	(39,28)
Beban Bantuan Sosial	1.191.500.000,00	824.000.000,00	367.500.000,00	44,60
Beban Penyusutan dan Amortisasi	351.834.698.902,58	569.113.732.453,84	(217.279.033.551,26)	(38,18)
Beban Penyisihan Piutang	4.238.255.606,78	598.766.823,12	3.639.488.783,66	607,83
Beban Lain - Lain	39.644.797.523,35	21.731.246.601,50	17.913.550.921,85	82,43
JUMLAH	**3.003.714.397.505,84**	**3.460.389.188.419,70**	**(456.674.790.913,87)**	**(13,20)**

Rincian beban operasi diuraikan sebagai berikut:

1.	**Beban Pegawai**	**2020**	**2019**
		Rp1.355.874.150.078,00	**Rp1.318.530.690.852,00**

Beban pegawai adalah beban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan pengeluaran beban pegawai.

Beban pegawai tahun 2020 Sebesar Rp1.355.874.150.078,00 mengalami peningkatan sebesar Rp37.343.459.226,00 atau 2,83% dibanding dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.318.530.690.852,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133
Beban Pegawai

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan	958.536.086.108,00	963.342.310.035,00	(4.806.223.927,00)	(0,50)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	226.568.933.345,00	214.907.676.607,00	11.661.256.738,00	5,43
Beban Penerimaan Lannya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.617.196.000,00	9.603.047.280,00	14.148.720,00	0,15
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	20.279.100.000,00	18.457.867.379,00	1.821.232.621,00	9,87
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	325.907.024,00	245.121.440,00	80.785.584,00	32,96
Beban Uang Lembur	20.065.000,00	0,00	20.065.000,00	0,00
Beban Honorarium PNS	2.720.295.000,00	1.850.481.000,00	869.814.000,00	47,00
Beban Honorarium Non PNS	78.823.994.419,00	76.836.369.726,00	1.987.624.693,00	2,59
Beban Pegawai BOS	47.059.861.182,00	20.838.727.473,00	26.221.133.709,00	125,83
Beban Pegawai BLUD	11.922.712.000,00	12.449.089.912,00	(526.377.912,00)	(4,23)
Jumlah	**1.355.874.150.078,00**	**1.318.530.690.852,00**	**37.343.459.226,00**	**2,83**

		2020	2019
2.	**Beban Barang dan Jasa**	**Rp896.929.145.395,13**	**Rp966.574.485.372,90**

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja barang jasa lainnya.

Beban barang dan jasa tahun 2020 Sebesar Rp896.929.145.395,13 mengalami penurunan sebesar Rp69.645.339.977,77 atau 7,21% dibanding dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 966.574.485.372,90. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.134
Beban Barang dan Jasa

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bahan Pakai Habis	31.176.125.358,80	42.765.949.050,77	(11.589.823.691,97)	(27,10)
Beban Persediaan Bahan/ Material	63.156.658.970,34	72.303.322.983,22	(9.146.664.012,88)	(12,65)
Beban Jasa Kantor	102.226.442.522,40	144.630.558.993,46	(42.404.116.471,06)	(29,32)
Beban Premi Asuransi	41.074.142.759,00	41.196.711.749,67	(122.568.990,67)	(0,30)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	18.280.580.026,51	18.041.643.255,86	238.936.770,65	1,32

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Cetak dan Penggandaan	19.099.652.026,00	30.080.398.805,00	(10.980.746.779,00)	(36,50)
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.395.346.284,66	12.937.880.963,68	(7.542.534.679,02)	(58,30)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	654.877.500,00	1.419.148.000,00	(764.270.500,00)	(53,85)
Beban Sewa Alat Berat	-	160.000.000,00	(160.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.684.231.422,00	5.025.025.774,00	(3.340.794.352,00)	(66,48)
Beban Makanan dan Minuman	31.515.521.610,00	51.165.609.307,00	(19.650.087.697,00)	(38,40)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.301.688.500,00	3.823.934.900,00	(2.522.246.400,00)	(65,96)
Beban Pakaian Kerja	1.010.364.690,00	2.237.520.460,00	(1.227.155.770,00)	(54,84)
Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.948.488.113,00	4.642.475.387,00	(2.693.987.274,00)	(58,03)
Beban Perjalanan Dinas	108.380.332.119,00	191.338.202.899,00	(82.957.870.780,00)	(43,36)
Beban Pemeliharaan	71.206.817.303,48	83.771.926.049,07	(12.565.108.745,59)	(15,00)
Beban Jasa Konsultasi	11.916.085.515,00	34.124.275.606,00	(22.208.190.091,00)	(65,08)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	170.926.272.397,56	-	170.926.272.397,56	-
Beban Barang untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	688.750.000,00	147.700.000,00	541.050.000,00	366,32
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	337.000.000,00	1.913.350.000,00	(1.576.350.000,00)	(82,39)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	963.233.151,00	4.705.207.886,00	(3.741.974.735,00)	(79,53)
Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	83.450.000,00	857.525.000,00	(774.075.000,00)	(90,27)
Beban Barang dan Jasa BOS	94.765.067.690,00	98.693.849.802,00	(3.928.782.112,00)	(3,98)
Beban Barang dan Jasa BLUD	118.816.730.536,38	120.352.634.319,17	(1.535.903.782,79)	(1,28)
Beban Alat Rumah Tangga	321.286.900,00	239.634.182,00	81.652.718,00	34,07
Jumlah	**896.929.145.395,13**	**966.574.485.372,90**	**(69.645.339.977,77)**	**(7,21)**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

a. Rata-rata beban tahun 2020 menurun dari beban tahun 2019, namun demikian terdapat peningkatan beban yang sangat signifikan pada beban barang untuk dijual kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp541.050.000 atau 366,32% dari tahun 2019.

b. Pada kondisi normal pengakuan belanja pada Laporan LRA sama dengan pengakuan beban pada Laporan Operasional, namun pada akhir tahun anggaran terjadi kondisi yang menyebabkan transaksi diperlukan penyesuaian bertambah atau berkurang sehingga menyebabkan perbedaan antara Laporan LRA dan LO tersebut.

c. Pada Laporan Operasional tahun 2020 tercatat beban barang dan Jasa sebesar Rp896.929.145.395,13 dan pada Laporan Realisasi Anggaran SAP tercatat

Realisasi anggaran belanja barang dan Jasa sebesar Rp907.419.260.623,95 dari nilai kedua laporan tersebut terjadi perbedaan disebabkan adanya penyesuaian pada akhir terhadap akun – akun sesuai ketentuan yang relevan mempengaruhi kedua laporan tersebut. Terhadap perbedaan tersebut akan dijelaskan pada pembahasan khusus pengungkapan perbedaan baik Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA maupun Beban dengan Belanja.

		2020	2019
3.	**Beban Hibah**	**Rp 354.001.850.000,00**	**Rp583.016.266.316,34**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah tahun 2020 Sebesar Rp354.001.850.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp229.014.416.316,34 atau 39,28% dibanding dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp583.016.266.316,34. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.135
Beban Hibah tahun 2020

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat - LO	4.262.000.000,00	126.055.639.505,34	(121.793.639.505,34)	(96,62)
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan - LO	268.218.000.000,00	33.036.000.000,00	235.182.000.000,00	711,90
Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan - LO	81.521.850.000,00	423.924.626.811,00	(342.402.776.811,00)	(80,77)
JUMLAH	**354.001.850.000,00**	**583.016.266.316,34**	**(229.014.416.316,34)**	**(39,28)**

		2020	2019
4.	**Beban Bantuan Sosial**	**Rp1.191.500.000,00**	**Rp824.000.000,00**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengakuan beban bantuan sosial tahun 2020 sebesar Rp1.191.500.000,00.

5.	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**2020**	**2019**
		Rp351.834.698.902,58	**Rp569.113.732.453,84**

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2020 Rp351.834.698.902,58 mengalami penurunan sebesar Rp217.279.033.551,26 atau 38,18% dibanding dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp569.113.732.453,84, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.136
Beban Penyusutan Dan Amortisasi Tahun 2020

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	165.648.197.241,58	135.588.093.319,40	30.060.103.922,18	22,17
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	39.840.130.356,00	37.709.250.450,00	2.130.879.906,00	5,65
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO	145.221.328.422,00	126.595.302.059,00	18.626.026.363,00	14,71
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO	132.576.255,00	-	132.576.255,00	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	992.466.628,00	157.713.216,46	834.753.411,54	529,29
Beban Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	0,00	269.063.373.408,98	(269.063.373.408,98)	(100,00)
JUMLAH	**351.834.698.902,58**	**569.113.732.453,84**	**(217.279.033.551,26)**	**(38,18)**

Rincian beban penyusutan dapat dilihat pada lampiran 27.

6.	**Beban Penyisihan Piutang**	**2020**	**2019**
		Rp4.238.255.606,78	**Rp598.766.823,12**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 sebesar Rp4.238.255.606,78 mengalami kenaikan sebesar Rp3.639.488.783,66 atau 607,83% dibanding dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp598.766.823,12, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.137
Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	**4.238.246.606,78**	**598.766.823,12**	**3.639.479.783,66**	**607,83**
- Beban Penyisihan Piutang Pajak - LO	67.069.273,53	511.078.275,23	(444.009.001,70)	**(86,88)**
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi - LO	15.765.689,75	0,00	15.765.689,75	**-**
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - LO	4.155.411.643,50	87.688.547,89	4.067.723.095,61	**4.638,83**
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**-**
JUMLAH	**4.238.255.606,78**	**598.766.823,12**	**3.639.488.783,66**	**607,83**

7.	Beban Lain-Lain	2020	2019
		Rp 39.644.797.523,35	Rp21.731.246.601,50

Beban lain-lain adalah kewajiban pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selain dari kategori beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi maupun beban penyisihan piutang. Pengakuan Beban Lain-Lain tahun 2020 sebesar Rp39.644.797.523,35 mengalami kenaikan sebesar Rp17.913.550.921,85 atau 82,43% dibanding dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp21.731.246.601,50:

Tabel 5.138
Beban Lain-Lain

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penurunan Nilai Investasi - LO	23.333.918.109,35	-	23.333.918.109,35	-
Beban Lain - Lain Lainnya - LO	16.310.879.414,00	21.731.246.601,50	(5.420.367.187,50)	(24,94)
JUMLAH	**39.644.797.523,35**	**21.731.246.601,50**	**17.913.550.921,85**	**82,43**

5.4.3	Beban Transfer	2020	2019
		Rp 495.440.382.058,00	Rp 445.265.370.697,00

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan beban transfer sebesar Rp495.440.382.058,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.175.011.361,00 atau 11,27% dibanding dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 445.265.370.697,00,dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139
Beban Transfer

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**452.181.139.028,00**	**425.898.706.019,00**	**26.282.433.009,00**	**6,17**
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	452.181.139.028,00	425.898.706.019,00	26.282.433.009,00	6,17
BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**43.259.243.030,00**	**19.366.664.678,00**	**23.892.578.352,00**	**123,37**
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	41.112.876.530,00	18.122.094.278,00	22.990.782.252,00	126,87
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.146.366.500,00	1.244.570.400,00	901.796.100,00	72,46
JUMLAH	**495.440.382.058,00**	**445.265.370.697,00**	**50.175.011.361,00**	**11,27**

5.4.4	Surplus/(Defisit) Non Operasional	2020	2019
		Rp (6.442.034.573,90)	Rp 0,00

Surplus/(Defisit) Non Operasional 2020 sebesar Rp(6.442.034.573,90), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.140
Surplus/(Defisit) Non Operasional

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
DEFISIT NON OPERASIONAL - LO	**6.442.034.573,90**	**0,00**	**6.442.034.573,90**	**-**
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	604.500.000,00	0,00	604.500.000,00	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.837.534.573,90	0,00	5.837.534.573,90	-
JUMLAH	**(6.442.034.573,90)**	**0,00**	**(6.442.034.573,90)**	**-**

- Defisit penjualan aset non lancar sebesar Rp604.500.000,00 merupakan defisit atas penjualan kendaraan rusak berat yang masih memiliki nilai buku.
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp5.837.534.573,90 merupakan defisit atas penghapusan aset tetap dan aset rusak berat yang masih memiliki nilai buku.

5.4.5	Pos Luar Biasa	2020	2019
		Rp (2.369.404.263,00)	Rp 0,00

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pos Luar Biasa tahun 2020 sebesar Rp(2.369.404.263,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.141
Pos Luar Biasa

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
BEBAN LUAR BIASA - LO	**2.369.404.263,00**	**0,00**	**2.369.404.263,00**	**-**
Beban Bencana Alam - LO	2.171.404.263,00	0,00	2.171.404.263,00	-
Beban Luar Biasa Lainnya - LO	198.000.000,00	0,00	198.000.000,00	-
JUMLAH	**(2.369.404.263,00)**	**0,00**	**(2.369.404.263,00)**	**-**

5.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi non keuangan, pembiayaan dan non anggaran dengan penjelasan masing-masing aktivitas sebagai berikut:

		2020	2019
5.5.1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	**Rp 576.637.341.282,12**	**Rp865.938.598.944,68**

Aktivitas operasi per 31 Desember 2020 adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntasi. Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan kemampuan Pemerintah Daerah, dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp576.637.341.282,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.142
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	4.192.255.367.782,07	4.128.089.990.869,78
Arus Kas Keluar	(3.615.618.026.499,95)	(3.262.151.391.925,10)
Jumlah Arus Kas Bersih	**576.637.341.282,12**	**865.938.598.944,68**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukan bahwa pendapatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah cukup untuk membiayai seluruh aktivitas kegiatan operasional Pemerintah.

Saldo Arus kas bersih dari aktivitas operasi periode 31 Desember 2020 adalah selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar sebesar Rp576.637.341.282,12, maka terjadi penurunan 33,41% dari tahun 2019 atau Rp289.301.257.662,56. Di dalam Arus Kas bersih dari aktivitas operasi tersebut termasuk juga aktivitas operasi (pendapatan dan belanja) BLUD dan BOS.

b. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Merupakan penerimaan kas daerah yang bersumber dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun rincian penerimaan arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

Tabel 5.143
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	914.780.331.698,60	896.321.261.948,00
Pendapatan Retribusi Daerah	14.690.106.655,58	12.670.320.760,42
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	21.914.954.430,00	18.375.395.982,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	170.211.316.456,89	163.424.676.367,36
Dana Bagi Hasil Pajak	89.136.505.394,00	51.489.956.127,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	186.784.605.210,00	98.123.993.969,00
Dana Alokasi Umum	1.488.847.818.000,00	1.637.588.970.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.265.857.865.620,00	1.207.098.898.001,00
Dana Penyesuaian	24.928.624.000,00	20.694.982.000,00
Pendapatan Hibah	14.422.159.791,00	13.713.424.715,00
Pendapatan Lainnya	681.080.526,00	8.588.111.000,00
Jumlah	**4.192.255.367.782,07**	**4.128.089.990.869,78**

c. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Merupakan pengeluaran kas daerah yang bersumber dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun rincian arus kas keluar dari aktivitas operasi sebagai berikut :

Tabel 5.144
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)
Belanja Pegawai	1.348.495.563.229,00	1.315.443.298.690,00
Belanja Barang	907.419.260.623,95	1.046.327.640.711,10
Belanja Hibah	885.470.850.000,00	461.119.320.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.191.500.000,00	824.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	43.259.243.030,00	19.366.664.678,00
Belanja Tak Terduga	2.399.381.313,00	-
Bagi Hasil Pajak	427.382.228.304,00	419.070.467.846,00
Jumlah	**3.615.618.026.499,95**	**3.262.151.391.925,10**

5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2020 (Rp664.366.202.042,95)	2019 (Rp875.594.697.526,07)

Arus kas dari aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Aktivitas investasi pada TA 2020 menunjukan arus kas keluar bersih sebesar (Rp664.366.202.042,95) yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada TA 2020 lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat.

Tabel 5.145
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	1.073.689.348,00	63.130.000,00
Arus Kas Keluar	(665.439.891.390,95)	(875.657.827.526,07)
Jumlah Arus Kas Bersih	**(664.366.202.042,95)**	**(875.594.697.526,07)**

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelaporan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Per 31 Desember 2020 nilai Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar (Rp664.366.202.042,95) dan per 31 Desember 2020 terjadi penurunan sebesar Rp211.228.495.483,12 atau 24,12% dari tahun 2019 sebesar (Rp875.594.697.526,07).

Kondisi tersebut menunjukan bahwa arus kas keluar berupa belanja modal tidak diimbangi dengan arus kas masuk atas pendapatan aset tetap, namun penurunan kas tersebut dapat dibiayai sebagian dari arus kas masuk dari aktivitas operasi dan aktivitas penerimaan pembiayaan.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Merupakan penerimaan kas atas aktivitas pelepasan sumber daya ekonomi berupa aset tetap pemerintah daerah. Adapun rincian dari kas masuk dari aktivitas investasi sebegai berikut :

Tabel 5.146
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)
Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	86.360.000,00	61.182.000,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	1.081.950,00	500.000,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	986.247.398,00	1.448.000,00
Jumlah	**1.073.689.348,00**	**63.130.000,00**

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Merupakan pengeluaran kas atas aktivitas penguasaan sumber daya ekonomi berupa belanja modal untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan dating. Adapun rincian dari kas masuk dari aktivitas investasi sebegai berikut :

Tabel 5.147
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)
Belanja Tanah	835.750.000,00	1.181.910.100,00
Belanja Peralatan dan Mesin	229.478.761.975,00	257.512.641.350,35
Belanja Bangunan dan Gedung	244.805.546.096,95	265.391.804.467,88
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.282.208.399,00	265.461.184.605,84
Belanja Aset Tetap Lainnya	43.037.624.920,00	47.072.287.002,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	39.038.000.000,00
Jumlah	**665.439.891.390,95**	**875.657.827.526,07**

5.5.3	**Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan**	**2020**	**2019**
		Rp0,00	**Rp0,00**

Arus kas dari aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Tahun anggaran 2020 tidak terdapat arus kas dari aktivitas pembiayaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.148
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih	**-**	**-**

5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	2020 (Rp1.349.379,00)	2019 Rp0,00

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Dalam TA 2020 arus kas bersih dari aktivitas non anggaran adalah sebesar (Rp1.349.379,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.149
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	178.352.937.929,74	215.259.625.598,41
Arus Kas Keluar	(178.354.287.308,74)	(215.259.625.598,41)
Jumlah Arus Kas Bersih	**(1.349.379,00)**	**-**

Saldo Arus kas Bersih dari aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2019 sebesar (Rp1.349.379,00) mengalami penurunan sebesar Rp1.349.379,00 atau 100,00% dari tahun 2019 sebesar Rp0,00.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris merupakan Penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) selama tahun 2020 dan koreksi SiLPA tahun sebelumnya atas perhitungan kas tahun sebelumnya. Adapun rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 5.150
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Jenis Potongan	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Iuran Wajib Pegawai 1%	6.180.333.821,00	-
Iuran Wajib Pegawai 2%	-	11.440.527.822,00
Iuran Wajib Pegawai 8%	45.478.068.134,00	45.686.694.923,00
Taspen	-	-
Taperum	806.449.000,00	1.080.653.000,00
Pajak Penghasilan Ps. 21	38.043.542.843,00	38.760.283.533,00
Pajak Penghasilan Ps. 22	5.275.834.207,10	6.413.612.690,84
Pajak Penghasilan Ps. 23	1.725.618.490,00	2.651.132.627,00
Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	9.238.731.966,00	14.028.089.547,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	71.507.769.149,64	95.080.324.346,57
Lainnya	13.596.343,00	17.102.921,00
Sewa Rumah	56.040.000,00	75.900.000,00
Hutang Kelebihan	26.953.976,00	25.304.188,00
Jumlah	**178.352.937.929,74**	**215.259.625.598,41**

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp178.354.287.308,74 merupakan pengeluaran terdiri atas :

- Pengeluaran perhitungan fihak ketiga sebesar Rp178.354.287.308,74, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel 5.148 dibawah ini

Tabel 5.151
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Jenis Potongan	2020	2019
Iuran Wajib Pegawai 1%	6.180.333.821,00	-
Iuran Wajib Pegawai 2%	-	11.440.527.822,00
Iuran Wajib Pegawai 8%	45.478.068.134,00	45.686.694.923,00
Taspen	-	-
Taperum	806.449.000,00	1.080.653.000,00
Pajak Penghasilan Ps. 21	38.044.892.222,00	38.760.283.533,00
Pajak Penghasilan Ps. 22	5.275.834.207,10	6.413.612.690,84
Pajak Penghasilan Ps. 23	1.725.618.490,00	2.651.132.627,00
Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	9.238.731.966,00	14.028.089.547,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	71.507.769.149,64	95.080.324.346,57
Lainnya	13.596.343,00	17.102.921,00
Sewa Rumah	56.040.000,00	75.900.000,00
Hutang Kelebihan	26.953.976,00	25.304.188,00
Jumlah	**178.354.287.308,74**	**215.259.625.598,41**

		2020	2019
5.5.5	**Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode**	**(Rp 87.730.210.139,83)**	**(Rp 9.656.098.581,39)**

Penurunan bersih kas selama periode tahun 2019 sebesar Rp9.656.089.581,39 menurun sebesar Rp78.074.111.558,44 atau 808,55% sehingga tahun 2020 menjadi (Rp87.730.210.139,83). Lebih lanjut penurunan bersih kas selama periode per 31 Desember 2020 adalah merupakan akumulasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.

	2020	2019
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	576.637.341.282,12	865.938.598.944,68
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(664.366.202.042,95)	(836.556.697.526,07)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	(39.038.000.000,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(1.349.379,00)	-
	(87.730.210.139,83)	**(9.656.098.581,39)**

5.5.6 Saldo Awal Kas

2020	2019
Rp 429.939.655.799,60	**Rp439.536.145.306,97**

Saldo awal Kas tahun 2019 sebesar Rp439.536.145.306,97 atau turun sebesar Rp9.596.489.507,37 atau 2,18% sehingga saldo awal tahun 2020 menjadi sebesar Rp429.939.655.799,60, dengan rincian:

	2020	2019
a. Saldo akhir kas di BUD	417.477.463.604,65	411.642.791.006,43
b. Kas Di Bendahara Penerimaan	1.357.000,00	10.000,00
c. Saldo akhir Kas lainnya	114.470.599,30	20.240.270.162,25
d. Kas di BLUD	9.182.066.112,65	2.538.760.274,31
e. Kas di Bendahara BOS	3.164.298.483,00	5.114.313.863,98
	429.939.655.799,60	**439.536.145.306,97**

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya

2020	2019
(Rp 9.164.495,00)	**Rp 59.609.074,02**

Koreksi kurang atas SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp9.164.495,00 merupakan atas kesalahan pembukuan penyajian saldo kas dana BOS tahun 2019.

5.5.8 Saldo Akhir Kas

2020	2019
Rp 342.200.281.164,77	**Rp 429.939.655.799,60**

Saldo akhir Kas tahun 2019 sebesar Rp429.939.655.799,60 atau turun sebesar Rp87.739.374.634,83 atau 20,41% sehingga saldo akhir tahun 2020 menjadi sebesar Rp342.200.281.164,77 dengan rincian:

	2020	2019
a. Saldo akhir kas di BUD	316.571.833.399,24	417.477.463.604,65
b. Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	1.357.000,00
c. Kas Di Bendahara Pengeluaran	238.480,00	
d. Saldo akhir Kas lainnya	0,00	114.470.599,30
e. Kas di BLUD	7.666.118.451,53	9.182.066.112,65
f. Kas di Bendahara BOS	17.962.090.834,00	3.164.298.483,00
	342.200.281.164,77	**429.939.655.799,60**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah. Mengacu pada definisi atas kebijakan tersebut, maka Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyajian laporan ekuitas tahun 2020 adalah merupakan penyajian dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini secara ringkas laporan perubahan ekuitas Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.152
Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2020

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Ekuitas awal	6.012.626.098.544,27	5.239.731.314.140,64
2	Surplus /defisit-LO	313.744.562.929,63	449.569.122.916,72
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	64.204.138.613,76	323.325.661.486,91
	Ekuitas akhir	**6.390.574.800.087,66**	**6.012.626.098.544,27**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

1. Ekuitas awal sebesar Rp6.012.626.098.544,27 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2019.
2. Surplus/defisit – LO sebesar Rp313.744.562.929,63, merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020. Surplus/Defisit merupakan selisih antara Pendapatan – LO dengan Beban LO pada Laporan Operasional.
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi tambah/kurang atas akun-akun tahun yang berkenaan pada tahun sebelumnya dan akun-akun pada tahun pelaporan sebesar Rp64.204.138.613,76 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.153
Laporan Perubahan Koreksi Ekuitas tahun 2020

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas	(9.164.495,00)
2	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	313.808.011,85
3	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Beban Dibayar Dimuka	(44.371.318,33)
5	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi	(15.987.163.013,72)
6	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap	(49.832.943.408,67)
7	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya	206.483.945.029,38
9	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban	(76.719.972.191,75)
10	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Lainnya	-
	Nilai koreksi	**64.204.138.613,76**

Untuk lebih jelasnya, Laporan Perubahan Ekuitas kaitannya dengan penambahan dan pengurangan perubahan tersebut dapat dilihat dalam *lampiran 36*.

Ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp6.390.574.800.087,66 nilai ekuitas tersebut sama nilai ekuitas yang tercatat pada Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

5.7 Pengungkapan Perbedaan Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.7.1 Perbedaan Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA.

LO	LRA	SELISIH
Rp3.821.710.781.330,37	**Rp4.193.329.057.130,07**	**(Rp371.618.275.799,70)**

Pendapatan – LO pada tahun 2020 sebesar Rp3.821.710.781.330,37 dan Pendapatan – LRA tahun 2020 sebesar Rp4.193.329.130,07. Terdapat perbedaan sebesar (Rp371.618.275.799,70) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.154
Pendapatan – LO dan Realisasi Pendapatan – LRA Tahun 2020

Uraian	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	1.153.918.332.147,52	1.122.670.398.589,07	31.247.933.558,45
Pendapatan Transfer	2.600.610.433.395,00	3.055.555.418.224,00	(454.944.984.829,00)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	67.182.015.787,85	15.103.240.317,00	52.078.775.470,85
Jumlah	**3.821.710.781.330,37**	**4.193.329.057.130,07**	**(371.618.275.799,70)**

a) Pendapatan Asli Daerah

LO	LRA	SELISIH
Rp 1.153.918.332.147,52	**Rp 1.122.670.398.589,07**	**Rp 31.247.933.558,45**

Pendapatan Asli Daearah LO pada tahun 2020 sebesar Rp1.153.918.332.147,52 dan Pendapatan Asli Daerah – LRA tahun 2020 sebesar Rp1.122.670.398.589,07. Terdapat perbedaan sebesar Rp31.247.933.558,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.155
Pendapatan – LO dan Realisasi Pendapatan – LRA Tahun 2020

Uraian	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	915.678.224.318,70	914.780.331.698,60	897.892.620,10
Pendapatan Retrbusi Daerah	14.442.114.805,58	14.690.106.655,58	(247.991.850,00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	66.742.299.552,32	21.914.954.430,00	44.827.345.122,32
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	157.055.693.470,92	171.285.005.804,89	(14.229.312.333,97)
Jumlah	**1.153.918.332.147,52**	**1.122.670.398.589,07**	**31.247.933.558,45**

1. Pendapatan Pajak Daerah	LO	LRA	SELISIH
	Rp915.678.224.318,70	**Rp914.780.331.698,60**	**Rp 897.892.620,10**

Perbedaan antara pendapatan Pajak Daerah - LO dengan pendapatan Pajak Daerah – LRA Tahun 2020 adalah sebesar Rp897.892.620,10 selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.156
Perbandingan
Pendapatan Asli Daerah LO dan Pendapatan Asli Daerah LRA

Uraian	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	245.750.055.645,00	245.771.629.745,00	(21.574.100,00)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	225.916.116.700,00	225.916.116.700,00	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	216.624.694.929,00	216.310.270.970,00	314.423.959,00
Pajak Air Permukaan	12.062.969.691,70	11.457.926.930,60	605.042.761,10
Pajak Rokok	215.324.387.353,00	215.324.387.353,00	0,00
Jumlah	**915.678.224.318,70**	**914.780.331.698,60**	**897.892.620,10**

Pendapatan Pajak Daerah LRA		**914.780.331.698,60**
Penambah :		
- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020	195.938.107,00	
- Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2020	21.682.311.681,00	
- Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2020	1.516.663.339,10	
Jumlah Penambah		23.394.913.127,10
Pengurang		
- Pelunasan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019	(217.512.207,00)	
- Pelunasan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2019	(21.367.887.722,00)	
- Pelunasan Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2019	(911.620.578,00)	
Jumlah Pengurang		(22.497.020.507,00)
Pendapatan Pajak Daerah LO		**915.678.224.318,70**

2. Pendapatan Retribusi Daerah	LO	LRA	SELISIH
	Rp14.442.114.805,58	**Rp14.690.106.655,58**	**(Rp247.991.850,00)**

Perbedaan antara Pendapatan Retribusi - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Tahun 2020 adalah sebesar Rp65.065.210.592,00 selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.157
Perbandingan
Pendapatan Retribusi Daerah LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA

Uraian	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	456.512.200,00	456.312.200,00	200.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.167.179.570,58	3.374.786.420,58	(207.606.850,00)
Retribusi Terminal	39.971.000,00	39.971.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	2.771.015.450,00	2.811.600.450,00	(40.585.000,00)
Retribusi Penyeberangan Air	109.503.979,00	109.503.979,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.345.823.400,00	1.345.823.400,00	0,00
Retribusi Izin Trayek	15.215.000,00	15.215.000,00	0,00
Retribusi Izin Perikanan	6.064.489.850,00	6.064.489.850,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	468.004.356,00	468.004.356,00	0,00
Jumlah	**14.442.114.805,58**	**14.690.106.655,58**	**-247.991.850,00**

Pendapatan Retribusi Daerah LRA		**14.690.106.655,58**
Penambah :		
- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2020	4.600.000,00	
- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020	47.110.950,00	
- Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 2020	183.268.000,00	
Jumlah Penambah		234.978.950,00
Pengurang		
- Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2019	(4.400.000,00)	
- Pelunasan PiutangPemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2019	(254.717.800,00)	
- Pelunasan Piutang Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2019	(223.853.000,00)	
Jumlah Pengurang		(482.970.800,00)
Pendapatan Retribusi Daerah LO		**14.442.114.805,58**

	LO	LRA	SELISIH
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**Rp66.742.299.552,32**	**Rp21.914.954.430,00**	**Rp44.827.345.122,32**

Perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA pada Tahun 2020 sebesar Rp44.827.345.122,32 selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.158
Perbandingan
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA

Uraian	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	66.552.692.440,32	21.725.347.318,00	44.827.345.122,32
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	189.607.112,00	189.607.112,00	0,00
Jumlah	**66.742.299.552,32**	**21.914.954.430,00**	**44.827.345.122,32**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah LRA		**21.914.954.430,00**
Penambah :		
- Pengumuman Laba BUMD	65.096.796.739,24	
- Penambahan Ekuitas di BUMD	1.455.895.701,08	
Jumlah Penambah		66.552.692.440,32
Pengurang :		
- Pembagian Deviden BUMD	(21.725.347.318,00)	
Jumlah Pengurang		(21.725.347.318,00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan LO		**66.742.299.552,32**

	LO	LRA	SELISIH
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**Rp157.055.693.470,92**	**Rp171.285.005.804,89**	**(Rp14.229.312.333,98)**

Perbedaan antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah–LO dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA tahun 2020 adalah sebesar (Rp14.229.312.333,98) selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.159
Perbandingan
Pendapatan Retribusi Daerah LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA

Uraian	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	986.247.398,01	986.247.398,00	0,01
Penerimaan Jasa Giro	13.832.780.653,81	13.832.780.653,81	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	11.154.000,00	11.154.000,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	176.742.257,00	176.742.257,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	5.162.779.487,00	5.162.779.487,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	714.451.181,08	714.451.181,08	0,00

Uraian	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	1.030.750.000,00	1.030.750.000,00	0,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	87.441.950,00	(87.441.950,00)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.164.735.466,67	826.176.084,00	338.559.382,67
Pendapatan BLUD	132.543.942.930,13	147.024.372.696,78	(14.480.429.766,65)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.432.110.097,22	1.432.110.097,22	0,00
Jumlah	**157.055.693.470,92**	**171.285.005.804,89**	**(14.229.312.333,97)**

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA		**171.285.005.804,89**
Penambah :		
- Piutang Sewa Tahun 2020	144.290.000,00	
- Piutang Kemitraan dengan Pihak Ketiga 2020	247.776.000,00	
- Piutang BLUD	39.978.221.599,73	
- Pelunasan Piutang Tahun 2019	150.603.986,66	
Jumlah Penambah		40.520.891.586,39
Pengurang		
- Pelunasan Piutang Tahun 2019	(42.600.000,00)	
- Pelunasan Piutang BLUD	(54.458.651.366,38)	
- Pendapatan Diterima Dimuka 2020	(161.510.603,99)	
- Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	(87.441.949,99)	
Jumlah Pengurang		(54.750.203.920,36)
PendapatanLain-lain PAD yang Sah LO		**157.055.693.470,92**

b) Pendapatan Transfer	**LO**	**LRA**	**SELISIH**
	Rp 2.600.610.433.395,00	**Rp 3.055.555.418.224,00**	**Rp454.944.984.829,00**

Pendapatan Transfer LO pada tahun 2020 sebesar Rp2.600.610.433.395,00 dan Pendapatan Transfer – LRA tahun 2020 sebesar Rp3.055.555.418.224,00. Terdapat perbedaan sebesar Rp454.944.984.829,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.160
Perbandingan
Pendapatan Transfer LO dan Pendapatan Transfer LRA

Uraian	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.575.681.809.395,00	3.030.626.794.224,00	(454.944.984.829,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	24.928.624.000,00	24.928.624.000,00	0,00
Jumlah	**2.600.610.433.395,00**	**3.055.555.418.224,00**	**(454.944.984.829,00)**

Pendapatan Transfer LRA		**3.055.555.418.224,00**
Pengurang		
- Pendapatan BOS untuk SDN dan SMPN	(454.603.000.000,00)	
- Utang Kelebihan Pendapatan Transfer DAK Pariwisata	(341.984.829,00)	
Jumlah Pengurang		(454.944.984.829,00)
PendapatanTransfer LO		**2.600.610.433.395,00**

Penyajian Pendapatan Dana BOS dalam Laporan Operasional memedomani Buletin Teknis No. 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang mengatur dana BOS yang disalurkan kepada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari unit kerja kabupaten/kota, kinerjanya merupakan bagian dari kinerja pemerintah kabupaten/kota. Saat menerima transfer yang merupakan kewajiban untuk segera disalurkan, Dana BOS dicatat sebagai utang bukan pendapatan.

	LO	LRA	SELISIH
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**Rp 67.182.015.787,85**	**Rp 15.103.240.317,00**	**Rp 52.078.775.470,85**

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO pada tahun 2020 sebesar Rp67.182.015.787,85 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA tahun 2020 sebesar Rp15.103.240.317,00. Terdapat perbedaan sebesar Rp52.078.775.470,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.161
Perbandingan
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dan
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA

Uraian	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Hibah	66.500.935.261,85	14.422.159.791,00	52.078.775.470,85
Pendapatan Lainnya	681.080.526,00	681.080.526,00	0,00
Jumlah	**67.182.015.787,85**	**15.103.240.317,00**	**52.078.775.470,85**

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA		**15.103.240.317,00**
Penambah :		
- Pendapatan Hibah Barang	52.078.775.470,85	
Jumlah Penambah		52.078.775.470,85
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO		**67.182.015.787,85**

Terdapat selisih antara pendapatan Hibah - LO dan pendapatan Hibah – LRA sebesar Rp52.078.755.470,85 merupakan Pendapatan Hibah berupa Barang dan Aset baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diuraikan sebagai berikut:

a. Perolehan hibah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp17.069.078.185,00 berupa:
   - Aset tanah Rp 1.920.000.000,00
   - Aset Peralatan dan Mesin Rp 2.883.898.185,00
   - Aset Gedung dan Bangunan Rp12.265.180.000,00
b. Porolehan hibah pada Dinas Pangan sebesar Rp78.400.000,00 beradasarkan Berita Acara Serta Terima No No.B.2274/PL.040/J.1/08/2019, tanggal 28 Agustus 2019 berupan aset peralatan dan mesin.
c. Perolehan hibah pada Dinas Kehutanan sebesar Rp5.647.319.525,00 berupa :
   - Aset Peralatan dan Mesin Rp 3.191.283.491,00
   - Aset Gedung dan Bangunan Rp 2.456.036.034,00
d. Perolehan hibah pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp117.607.500,00 berupa :
   - Aset Tanah Rp 85.000.000,00
   - Aset Peralatan dan Mesin Rp 32.607.500,00
e. Perolehan hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp472.872.700 berupa Hibah kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat dengan Berita Acara Perjanjian Hibah : BA.41/BNPB/04/2013 tgl 25 april 2013 dan Hibah Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp5.676.720.000,00
f. Perolehan hibah pada Dinas Kesehatan berupa persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp23.016.777.560,85

5.7.2 Perbedaan Beban Operasi pada Laporan Operasional dan Belanja Operasi Laporan Realisasi Anggaran.

LO	LRA	SELISIH
Rp3.003.714.379.505,84	**Rp 3.142.577.173.852,95**	**(Rp138.862.776.347,11)**

Beban Operasi pada tahun 2020 sebesar Rp3.003.714.379.505,84 dan Belanja Operasi tahun 2020 sebesar Rp3.142.577.173.852,95. Terdapat perbedaan sebesar (Rp138.862.776.347,11) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.162
Perbandingan Beban Operasi dengan Belanja Operasi Tahun 2020

Uraian	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban/Belanja Pegawai	1.355.874.150.078,00	1.348.495.563.229,00	7.378.586.849,00
Beban/Belanja Barang dan Jasa	896.929.145.395,13	907.419.260.623,95	(10.490.115.228,82)
Beban/Belanja Hibah	354.001.850.000,00	885.470.850.000,00	(531.469.000.000,00)
Beban/Belanja Bantuan Sosial	1.191.500.000,00	1.191.500.000,00	0,00
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	351.834.698.902,58	0,00	351.834.698.902,58
Beban Penyisihan Piutang	4.238.255.606,78	0,00	4.238.255.606,78
Beban Lain-lain	39.644.797.523,35	0,00	39.644.797.523,35
Jumlah	**3.003.714.397.505,84**	**3.142.577.173.852,95**	**(138.862.776.347,11)**

	LO	LRA	SELISIH
a) Beban/ Belanja Pegawai	**Rp1.355.874.150.078,00**	**Rp1.348.495.563.229,00**	**(Rp7.378.586.849,00)**

Belanja pegawai pada laporan realisasi anggaran Rp1.348.495.563.229,00 menjadi beban pegawai pada laporan operasional sebesar Rp1.345.287.121.539,45 terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan sebesar (Rp7.378.586.849,00). Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.163
Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2020

Uraian	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	958.536.086.108,00	951.345.494.759,00	7.190.591.349,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	226.568.933.345,00	226.155.257.845,00	413.675.500,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.617.196.000,00	9.617.196.000,00	0,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	20.279.100.000,00	20.279.100.000,00	0,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	325.907.024,00	325.907.024,00	0,00
Honorarium PNS	2.720.295.000,00	2.720.295.000,00	0,00
Honorarium Non PNS	78.823.994.419,00	78.823.994.419,00	0,00
Uang Lembur	20.065.000,00	20.065.000,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	11.922.712.000,00	12.148.392.000,00	(225.680.000,00)
Belanja Pegawai Dana BOS	47.059.861.182,00	47.059.861.182,00	0,00
Jumlah	**1.355.874.150.078,00**	**1.348.495.563.229,00**	**7.378.586.849,00**

Belanja Pegawai		**1.348.495.563.229,00**
Penambah :		
- Utang Pegawai Tunjangan Profesi Guru	7.151.120.605,00	
- Utang Pegawai Tunjangan Khusus Guru	39.470.744,00	

- Utang Pegawai Tambahan Penghasilan Guru PNSD	413.675.500,00	
- Utang Pegawai BLUD 2020	578.900.000,00	
Jumlah Penambah		8.183.166.849,00
Pengurang		
- Pembayaran Utang Pegawai BLUD 2019	(804.580.000,00)	
Jumlah Pengurang		(804.580.000,00)
Beban Pegawai		**1.355.874.150.078,00**

b) Beban/ Belanja Barang dan Jasa	**LO**	**LRA**	**SELISIH**
	Rp896.929.145.395,13	**Rp907.419.260.623,95**	**(Rp10.490.115.228,82)**

Belanja barang dan jasa pada laporan realisasi anggaran Rp907.419.260.623,95 menjadi beban pegawai pada laporan operasional sebesar Rp896.929.145.395,13 terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan sebesar (Rp10.490.115.228,82). Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.164

Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020

Uraian	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Bahan Pakai Habis	31.176.125.358,80	30.084.396.588,00	1.091.728.770,80
Belanja/Beban Bahan/Material	63.156.658.970,34	41.844.746.760,00	21.311.912.210,34
Belanja/Beban Jasa Kantor	102.226.442.522,40	102.360.158.989,40	(133.716.467,00)
Belanja/Beban Premi Asuransi	41.074.142.759,00	41.229.265.944,00	(155.123.185,00)
Belanja/Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	18.280.580.026,50	18.280.580.026,50	0,00
Belanja/Beban Cetak dan Penggandaan	19.099.652.026,00	19.569.255.799,00	(469.603.773,00)
Belanja/Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.395.346.284,67	5.449.184.618,00	(53.838.333,33)
Belanja/Beban Sewa Sarana Mobilitas	654.877.500,00	654.877.500,00	0,00
Belanja/Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.684.231.422,00	1.684.231.422,00	0,00
Belanja/Beban Makanan dan Minuman	31.515.521.610,00	31.515.521.610,00	0,00
Belanja/Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.301.688.500,00	1.301.688.500,00	0,00
Belanja/Beban Pakaian Kerja	1.010.364.690,00	988.914.690,00	21.450.000,00
Belanja/Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.948.488.113,00	1.884.408.500,00	64.079.613,00
Belanja/Beban Perjalanan Dinas	108.380.332.119,00	108.380.332.119,00	0,00
Belanja/Beban Pemeliharaan	71.206.817.303,48	82.232.028.271,59	(11.025.210.968,11)
Belanja/Beban Jasa Konsultansi	11.916.085.515,00	16.845.262.578,00	(4.929.177.063,00)
Belanja/Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	170.926.272.397,56	166.731.127.564,56	4.195.144.833,00
Belanja/Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	688.750.000,00	688.750.000,00	0,00

Uraian	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	963.233.151,00	963.233.151,00	0,00
Belanja/Beban Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	83.450.000,00	83.450.000,00	0,00
Belanja/Beban Barang Dan Jasa Dana BOS	94.765.067.690,00	95.343.226.833,00	(578.159.143,00)
Belanja/Beban Barang dan Jasa BLUD	118.816.730.536,38	138.646.332.259,90	(19.829.601.723,52)
Belanja/Beban Peralatan/Perlengkapan Lainnya	321.286.900,00	321.286.900,00	0,00
Jumlah	**896.929.145.395,13**	**907.419.260.623,95**	**(10.490.115.228,82)**

Belanja Barang dan Jasa		**907.419.260.623,95**
Penambah :		
- Utang Jasa Kantor 2020	388.308.750,00	
- Utang Jasa Konsultasi 2020	182.241.600,00	
- Utang Barang dan Jasa BLUD 2020	43.136.969.669,89	
- Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka 2019	101.752.255,00	
- Beban Sewa Rumah/Gedung Dibayar Dimuka 2019	93.911.666,67	
- Persediaan Bahan Pakai habis 2019	5.025.706.613,90	
- Persediaan Bahan Material 2019	25.521.587.037,58	
- Persediaan Cetak dan Pengadaan 2019	289.612.585,00	
- Persediaan Pakaian Kerja 2019	21.450.000,00	
- Persediaan akaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 2019	64.079.613,00	
- Persediaan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2019	7.914.735.916,00	
- Persediaan Barang dan Jasa BOS 2019	620.255.876,00	
- Persediaan Barang dan Jasa BLUD 2019	7.743.478.009,16	
- Hibah Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.693.497.560,85	
- Belanja Modal Yang Tidak Masuk Aset Tetap	2.535.691.700,00	
Jumlah Penambah		122.333.278.853,05
Pengurang		
- Utang Jasa Kantor 2019	(522.025.217,00)	
- Utang Premi Asuransi 2019	(153.035.484,00)	
- Utang Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 2019	(74.328.000,00)	
- Utang Barang dan Jasa BLUD 2019	(62.209.749.344,28)	
- Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka 2020	(103.839.956,00)	
- Beban Sewa Rumah/Gedung Dibayar Dimuka 2020	(147.750.000,00)	
- Beban Barang dan Jasa BLUD Dibayar Dimuka 2020	(24.645.833,33)	
- Persediaan Bahan Pakai habis 2020	(4.078.132.343,10)	
- Persediaan Bahan Material 2020	(5.091.111.767,24)	
- Persediaan Cetak dan Pengadaan 2020	(759.216.358,00)	
- Persediaan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2020	(33.158.694.743,85)	
- Persediaan Barang dan Jasa BOS 2020	(803.421.905,00)	
- Persediaan Barang dan Jasa BLUD 2020	(8.494.228.088,96)	
- Belanja Barang dan Jasa yang Dikapitalisasi	(17.203.215.041,11)	
Jumlah Pengurang		(132.823.394.081,87)
Beban Barang dan Jasa		**896.929.145.395,13**

c) Beban/ Belanja Hibah	LO	LRA	SELISIH
	Rp354.001.850.000,00	Rp885.470.850.000,00	(Rp531.469.000.000,00)

Belanja hibah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp885.470.850.000,00 menjadi beban hibah pada Laporan Operasional sebesar Rp354.001.850.000,00 terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan tersebut sebesar (Rp531.469.000.000,00).

Tabel 5.165
Perbandingan Antara Beban Hibah Dengan Belanja Hibah tahun 2020

Hibah	LO 2020 (Rp)	LRA 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	4.262.000.000,00	4.262.000.000,00	-
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	268.218.000.000,00	268.218.000.000,00	-
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	81.521.850.000,00	612.990.850.000,00	(531.469.000.000,00)
Jumlah	**354.001.850.000,00**	**885.470.850.000,00**	**(531.469.000.000,00)**

Belanja Hibah		**885.470.850.000,00**
Penambah :		
Pengurang :		
- Penyaluran Dana BOS 2019	(76.866.000.000,00)	
- Penyaluran BOS SDN dan SMPN Kabupaten/Kota	(454.603.000.000,00)	
Jumlah Pengurang		(531.469.000.000,00)
Beban Hibah		**354.001.850.000,00**

Penyajian Belanja Dana BOS dalam Laporan Operasional memedomani Buletin Teknis No. 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang mengatur dana BOS yang disalurkan kepada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari unit kerja kabupaten/kota, kinerjanya merupakan bagian dari kinerja pemerintah kabupaten/kota. Ketika dilaksanakan penyaluran Dana BOS dicatat sebagai kas pada utang.

d) Beban/ Belanja Bantuan Sosial	LO	LRA	SELISIH
	Rp1.191.500.000,00	Rp1.191.500.000,00	Rp0,00

Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran Rp1.191.500.000,00 menjadi beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional sebesar Rp1.191.500.000,00 dan tidak terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan tersebut.

e) Beban Penyusutan dan Amortisasi	LO	LRA	SELISIH
	Rp351.834.698.902,58	Rp0,00	Rp351.834.698.902,58

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2020 dalam Laporan Operasional tercatat sebesar Rp351.834.698.902,58 merupakan pengakuan beban pada laporan operasional tidak tercatat di LRA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.166
Rincian Beban Penyusutan Dan Amortisasi Tahun 2020

Uraian	2020 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	165.648.197.241,58
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.840.130.356,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	145.221.328.422,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	132.576.255,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	992.466.628,00
Jumlah	**351.834.698.902,58**

f) Beban Penyisihan Piutang	LO	LRA	SELISIH
	Rp4.238.255.606,78	Rp0,00	Rp4.238.255.606,78

Beban penyisihan piutang tahun 2020 dalam Laporan Operasional tercatat sebesar Rp4.238.255.606,78 Berikut rinciannya:

Tabel 5.167
Rincian Beban Penyisiha PiutangTahun 2020

Uraian	2020 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	4.238.246.606,78
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	9.000,00
Jumlah	**4.238.255.606,78**

g) Beban Lain–Lain	LO	LRA	SELISIH
	Rp39.644.797.523,35	Rp0,00	Rp39.644.797.523,35

Beban Lain - Lain tahun 2020 dalam Laporan Operasional tercatat sebesar Rp39.644.797.523,35, berikut rinciannya:

Tabel 5.168
Beban Lain-Lain

Uraian	2020 (Rp)
Beban Penuruan Nilai Investasi	23.333.918.109,35
Ekstra Compatible Peralatan dan Mesin	5.212.672.596,00
Ekstra Compatible Gedung dan Bangunan	1.802.535.900,00
Ekstra Compatible Jalan, Irigasi dan Jaringan	217.983.500,00
Ekstra Compatible Aset Tetap Lainnya	9.077.687.418,00
Jumlah	**39.644.797.523,35**

5.7.3 Perbedaan Transfer pada Laporan Operasional dan Transfer Laporan Realisasi Anggaran.

Transfer	LO	LRA	SELISIH
	Rp495.440.382.058,00	**Rp470.641.471.334,00**	**Rp24.798.910.724,00**

Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp470.641.471.334,00 menjadi beban transfer pada Laporan Operasional sebesar Rp495.440.382.058,00 terdapat perbedaan nilai antara kedua laporan tersebut sebesar Rp24.798.910.724,00.

Tabel 5.169
Perbandingan antara Beban Transfer dengan Belanja Transfer Tahun 2020

Uraian	Realisasi - LO (Rp)	Realisasi- LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Transfer Bagi Hasi Pajakl Ke Kabupaten/Kota	452.181.139.028,00	427.382.228.304,00	24.798.910.724,00
Beban Transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya	41.112.876.530,00	41.112.876.530,00	0,00
Beban Transfer bantuan keuangan lainnya	2.146.366.500,00	2.146.366.500,00	0,00
Jumlah	**495.440.382.058,00**	**470.641.471.334,00**	**24.798.910.724,00**

Belanja Transfer		**470.641.471.334,00**
Penambah :		
- Utang Salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020	17.248.005.950,00	
- Utang Salur Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020	12.616.938.760,00	
- Utang Salur Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2020	27.407.906.800,00	
- Utang Salur Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2020	1.497.007.697,00	

Jumlah Penambah		58.769.859.207,00
Pengurang :		
- Penyaluran Utang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019	(7.480.615.974,00)	
- Penyaluran Utang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019	(8.824.950.238,00)	
- Penyaluran Utang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2019	(17.113.575.929,00)	
- Penyaluran Utang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 20219	(551.806.342,00)	
Jumlah Pengurang		(33.970.948.483,00)
Beban Transfer		**495.440.382.058,00**

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1 Kondisi Umum Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di antara 2^0 22′ Lintang Utara dan 3^0 48′ Lintang Selatan, serta 119^0 22′ dan 124^0 22 Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya:

1. Sebelah Utara : Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
2. Sebelah Timur : Provinsi Maluku.
3. Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Sebelah Barat : Selat Makassar.

Luas wilayah Sulawesi Tengah 61.841,29 km^2 dengan jumlah penduduk 2.966.325 jiwa secara administratif Sulawesi Tengah tahun 2020 dibagi dalam 12 Kabupaten, 1 Kota dengan 175 Kecamatan serta 2.017 desa/kelurahan definitif. Luas wilayah dan jumlah penduduk per Kabupaten dapat dilihat dalam tabel 162 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Desa/ Kelurahan
1	Banggai Kepulauan	2.488,79	116.811	144
2	Banggai	9.672,70	365.616	337
3	Morowali	3.037,04	117.330	133
4	P o s o	7.112,25	245.993	170
5	Donggala	4.275,08	299.174	167
6	Tolitoli	4.079,77	230.996	109
7	B u o l	4.043,57	155.593	115
8	Parigi Moutong	5.089,91	474.339	283
9	Tojo Una-una	5.721,15	150.820	146
10	Sigi	5.196,02	234.588	176
11	P a l u	395,06	379.782	46
12	Banggai Laut	725,67	72.298	66
13	Morowali Utara	10.004,28	122.985	125
Jumlah		61.841,29	2.966.325	2.017

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tengah 2010-2020, BPS Sulteng

Sebagaimana yang telah dijelaskan secara umum mengenai batas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga luas wilayah per Kabupaten dan Kotamadya yang terdapat dalam diatas di atas perlu dijelaskan pula batas-batas administrasi yang terdapat pada setiap wilayah Kabupaten dan Kotamadya yang terdapat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Tabel 142 berikut ini:

Tabel 6.2
Batas Administrasi Kabupaten / Kotamadya dalam
Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	NAMA WILAYAH	BATAS ADMINISTRASI			
		UTARA	SELATAN	TIMUR	BARAT
1	Kab. Banggai Kepulauan	Selat Peling/Laut Maluku	Teluk Tolo	Laut Maluku	Selat Peling
2	Kab. Banggai	Teluk Tomini	Selat Peling/Kab. Bangkep, Teluk Tolo	Laut Maluku	Kab. Poso & Kab. Morowali
3	Kab. Morowali	Kab. Poso & Kab. Banggai	Wil. Prov.Sulawesi Tenggara & Prov. Sulawesi Selatan	Teluk Tolo & Laut Maluku	Kab. Poso, Wilayah Prov. Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara
4	Kab. Poso	Wil. Prov. Sulawesi Utara & Wil. Prov Gorontalo	Wil. Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Touna & Kab. Morowali	Kab. Parigi Moutong & Kab. Donggala
5	Kab. Donggala	Kab. Tolitoli	Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat & Kab. Poso	Kab. Parigi Moutong & Kab. Poso	Selat Makassar
6	Kab. Tolitoli	Laut Sulawesi	Kab. Donggala	Kab. Buol	Selat Makassar
7	Kab. Buol	Laut Sulawesi	Kab. Parigi Moutong & Kab. Bualemo Prov. Gorontalo	Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo	Kab. Tolitoli
8	Kab. Parigi Moutong	Kab. Buol, Kab. Tolitoli & Kab. Bualemo Prov. Gorontalo	Kab. Poso	Teluk Tomini	Kota Palu & Kab. Donggala
9	Kab. Tojo Una-una	Teluk Tomini & Gorontalo	Kab. Morowali	Kab. Banggai	Kab. Poso
10	Kab. Sigi Biromaru	Kab. Donggala & Kota Palu	Kab. Luwu Utara Prov. Sulses	Kab. Mamuju & Mamuju Utara Prov. Sulbar	Kab. Poso & Kab. Parigi Moutong
11	Kotamadya Palu	Kab. Donggala	Kab. Donggala	Kab. Parigi & Kab. Donggala	Teluk Palu
12	Kab. Banggai Laut	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru
13	Kab. Morowali Utara	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru	Kab. Baru

Sumber: Data Sulawesi Tengah Dalam Angka 2013/2014 BPS Sulteng

Visi Provinsi Sulawesi Tengah dalam membangun Sulawesi Tengah lima tahun kedepan yaitu :

"SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING"

Melalui serangkaian misi sebagai berikut:

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

6.2 Gambaran Umum Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah

Susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga teknis Daerah dan lembaga lain Daerah adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro.
b. Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
c. Dinas – Dinas Daerah sejumlah 19 (Sembilan belas) Dinas.
d. Lembaga Teknis Daerah sejumlah 18 (tujuh belas) lembaga.
e. Lembaga lain Daerah sejumlah 4 (empat) lembaga.

Unsur – Unsur Pucuk Pimpinan Pemerintahan tersebut diatas adalah dijabat oleh :

a. Gubernur : Drs. H. Longki Djanggola, M.Si
b. Wakil Gubernur : H. Rusli Baco Dg. Palabbi, S.Sos., SH., MH
c. Sekretaris Daerah : H. Mulyono, S.E., Ak., M.M
d. Ketua DPRD : Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP

Dalam menjalankan fungsi organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersedia sumber daya manusia sejumlah 12.271 orang pegawai dengan sebaran berdasarkan golongan dan jabatan per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel 6.3
Daftar Jumlah Pegawai Tahun 2020

Golongan/ Ruang	Eselon				Tenaga Fungsional				Jumlah
	I	II	III	IV	Pendidika	Kesehatan	Lainnya	Staf	
Golongan IV/e	1	-	-	-	-	2	-	-	3
Golongan IV/d	-	25	1	-	3	5	-	1	35
Golongan IV/c	-	12	-	-	12	28	7	2	61
Golongan IV/b	-	8	165	1	915	39	15	12	1.155
Golongan IV/a	-	1	92	248	967	71	23	65	1.467
Jumlah Golongan IV	1	46	258	249	1.897	145	45	80	2.721
Golongan III/d	-	-	16	400	1.053	160	93	354	2.076
Golongan III/c	-	-	-	169	1.152	168	80	755	2.324
Golongan III/b	-	-	-	67	422	152	86	1.129	1.856
Golongan III/a	-	-	-	33	254	215	32	854	1.388
Jumlah Golongan III	-	-	16	669	2.881	695	291	3.092	7.644
Golongan II/d	-	-	-	1	14	77	10	175	277
Golongan II/c	-	-	-	-	16	15	20	822	873
Golongan II/b	-	-	-	-	11	1	9	362	383
Golongan II/a	-	-	-	-	21	3	3	577	604
Jumlah Golongan II	-	-	-	1	62	96	42	1.936	2.137
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	16	16
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	88	88
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	12	12
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	17	17
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	133	133
TOTAL	**1**	**46**	**274**	**919**	**4.840**	**936**	**378**	**5.241**	**12.635**

6.3 Informasi Tambahan Lainnya

a. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan wajib pemerintah daerah provinsi yang juga mencerminkan sifat operasi dan kegiatan pokok yang merupakan unsur dalam lingkup provinsi yang meliputi :

1. Penanganan bidang pendidikan
2. Penanganan bidang kesehatan
3. Penanganan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Penanganan bidang perumahan dan kawasan permukiman
5. Penanganan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
6. Penanganan bidang sosial

7. Penanganan bidang tenaga kerja
8. Penanganan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak
9. Penanganan bidang pangan
10. Penanganan bidang pertanahan
11. Penanganan bidang lingkungan hidup
12. Penanganan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil
13. Penanganan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
14. Penanganan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
15. Penanganan bidang perhubungan
16. Penanganan bidang komunikasi dan informatika
17. Penanganan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
18. Penanganan bidang penanaman modal
19. Penanganan bidang kepemudaan dan olahraga
20. Penanganan bidang statistik
21. Penanganan bidang persandian
22. Penanganan bidang kebudayaan
23. Penanganan bidang perpustakaan
24. Penanganan bidang kearsipan
25. Penanganan bidang kelautan dan perikanan
26. Penanganan bidang pariwisata
27. Penanganan bidang pertanian
28. Penanganan bidang kehutanan
29. Penanganan bidang energi dan sumber daya mineral
30. Penanganan bidang perdagangan
31. Penanganan bidang perindustrian dan
32. Penanganan bidang Transmigrasi

b. Dasar Pelaksanaan Operasional

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang merupakan landasan pelaksanaan utama penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2019 juga didasarkan pada Peraturan Daerah Perubahan Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019.

Pelaksanaan kegiatan operasional dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dilandasi dengan beberapa Peraturan Daerah diantaranya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah serta Peraturan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional.

c. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Berdasarkan pasal 404 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang tersebut dilakukan paling lama 2 tahun sejak undang-undang di undangkan. Pada tahun 2017, telah dilakukan serah terima pengalihan urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten/kota untuk personil, sarana prasarana dan dokumen sesuai berita acara serah terima per oktober 2016, sedangkan untuk pendanaan akan diserahkan pada tahun 2017. Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan secara seksama inventarisasi khususnya sarana dan prasarana, setelah dilakukan verifikasi kembali atas dokumen yang telah diserahkan pada bulan Oktober 2016.

d. Informasi Pendanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN.

   Pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 23, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Maka Pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai bentuk pelimpahan

wewenang dan penugasan kepada pemerintah daerah yang berasal dari dana APBN yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP).

Pendanaan dana Dekon/TP seluruhnya dari APBN, Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak diperkenankan meminta daerah menyediakan dana pendamping (*cost sharing*). Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Nasional. K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur sebelum pelimpahan/penugasan untuk mewujudkan sinergi pusat dan daerah. Gubernur memberitahukan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD perihal rencana penyelenggaraan Dekon/TP. Pengelolaan dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan rekapitulasi realisasi penyerapan anggaran APBN untuk Dana Dekonsentrasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp94.882.219.140,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp97.232.126.000,00 atau 97,58%. Dana Dekon tersebut tersebar pada 40 Satker lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian:

Tabel 6.4
Rekapitulasi Realisasi Dana Dekonsentrasi APBN per 31 Desember 2020

No.	SATKER/Program	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	'Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	53.972.000	53.971.300	-700
2	'Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	50.000.000	50.000.000	0
3	'Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	2.429.545.000	2.422.617.300	-6.927.700
4	'Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	3.646.460.000	3.646.015.355	-444.645
5	'Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	5.314.555.000	5.277.936.971	-36.618.029
6	'Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	1.117.218.000	1.098.447.800	-18.770.200
7	'Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	8.026.484.000	8.016.316.400	-10.167.600
8	'Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	8.541.361.000	8.391.122.225	-150.238.775
9	'Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.733.963.000	1.724.570.000	-9.393.000

No.	SATKER/Program	Anggaran	Realisasi	Sisa
10	'Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	903.590.000	849.189.000	-54.401.000
11	'Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	3.202.641.000	3.174.648.950	-27.992.050
12	'Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	634.870.000	614.779.800	-20.090.200
13	'Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	5.293.261.000	5.177.976.225	-115.284.775
14	'Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	606.053.000	606.051.733	-1.267
15	'Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah	739.095.000	684.967.000	-54.128.000
16	'Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	456.890.000	435.030.000	-21.860.000
17	'Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	2.137.348.000	2.116.817.172	-20.530.828
18	'Dinas Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah	210.504.000	210.504.000	0
19	'Dinas Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah	1.429.657.000	1.422.238.750	-7.418.250
20	'Dinas Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah	255.549.000	247.907.700	-7.641.300
21	'Dinas Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah	2.925.384.000	2.902.620.800	-22.763.200
22	'Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	200.000.000	199.188.000	-812.000
23	'Dinas Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah	2.213.350.000	1.975.038.400	-238.311.600
24	'Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	420.044.000	420.036.271	-7.729
25	'Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	313.496.000	312.890.523	-605.477
26	'Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	695.654.000	668.661.000	-26.993.000
27	'Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	286.182.000	286.085.900	-96.100
28	'Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	77.457.000	76.630.800	-826.200
29	'Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	432.750.000	432.750.000	0
30	'Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah	58.705.000	58.704.900	-100
31	'Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2.127.790.000	2.073.687.900	-54.102.100
32	'Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	382.000.000	381.000.000	-1.000.000
33	'Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	292.896.000	292.220.800	-675.200
34	'Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	483.795.000	482.238.000	-1.557.000
35	'Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	480.139.000	480.040.000	-99.000

No.	SATKER/Program	Anggaran	Realisasi	Sisa
36	'Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	34.589.943.000	33.967.892.465	-622.050.535
37	'Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	651.654.000	651.177.000	-477.000
38	'Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	288.904.000	285.867.200	-3.036.800
39	'Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	673.659.000	656.522.500	-17.136.500
40	'Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah	2.855.308.000	2.057.859.000	-797.449.000
Jumlah		**97.232.126.000**	**94.882.219.140**	**-2.349.906.860**

Sedangkan rekapitulasi penyerapan anggaran APBN untuk Dana Tugas Pembantuan per 31 Desember 2020 sebesar Rp121.070.346.562,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp121.525.223.000,00 atau 99,63%. Dana Dekonsentrasi tersebut terdapat pada 9 Satker dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.5
Rekapitulasi Realisasi Dana Tugas Pembantuan APBN
per 31 Desember 2020

No.	SATKER/Program	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	'Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	56.706.554.000	56.438.868.337	-267.685.663,00
2	'Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	13.298.665.000	13.244.803.305	-53.861.695,00
3	'Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	4.419.856.000	4.327.068.550	-92.787.450,00
4	'Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	16.001.040.000	15.986.482.950	-14.557.050,00
5	'Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	4.833.020.000	4.830.615.700	-2.404.300,00
6	'Dinas Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah	960.664.000	958.014.000	-2.650.000,00
7	'Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	18.895.040.000	18.876.175.430	-18.864.570,00
8	'Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Prov. Sulawesi Tengah	100.000	0	-100.000,00
9	'Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi	6.410.284.000	6.408.318.290	-1.965.710,00

No.	SATKER/Program	Anggaran	Realisasi	Sisa
	Tengah			
Jumlah		**121.525.223.000,00**	**121.070.346.562,00**	**-4.704.361.386,42**

e. Selama penanganan pendemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menganggarkan sebesar Rp87.236.811.296,81 terdiri atas belanja tak terduga sebesar Rp12.493.331.296,81 dan belanja pada kegiatan sebesar Rp74.743.480.000,00. Dari anggaran tersebut telah direalisasikan selama tahun anggaran 2020 sebesar Rp69.652.138.241,00 yang terdiri dari belanja tidak terduga sebesar Rp198.000.000,00 dan belanja pada kegiatan sebesar Rp69.454.138.241,00

BAB VII
PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berbasis akrual disusun dan disajikan sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

b. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020, dari sisi pendapatan melebihi target sebesar Rp87.212.471.885,12 dari yang dianggarkan sejumlah Rp4.106.116.585.244,95 dicapai sebesar Rp4.193.329.057.130,07 atau 102,12%. Sementara pada sisi belanja tidak mencapai target sebesar Rp254.998.323.153,65 atau hanya 94,38% dari belanja yang dianggarkan sebesar Rp4.536.056.241.044,55 terealisasi sebesar Rp4.281.057.917.890,90. Penerimaan Pembiayaan Daerah mencapai target 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp429.939.655.799,60 dan realisasinya sebesar Rp429.929.141.925,60. Sementara untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah di tahun anggaran 2020 tidak ada penganggaran.

c. Lebih lanjut sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan adalah sebesar Rp342.200.281.164,77. Jumlah tersebut termasuk Kas BOS, Kas di BLUD pada Rumah Sakit RSUD Undata dan Madani.

d. Pada tahun 2020 terdapat kas di Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp 238.480,00 karena sampai akhir 31 Desember 2020 terdapat pendapatan jasa giro yang oleh bendahara pengeluaran belum di setor ke Kas Daerah.

e. Berdasarkan Laporan Operasional Pendapatan-LO sebesar Rp3.821.710.781.330,37, Beban sebesar Rp3.499.154.779.563,84, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp6.442.034.573,90 dan Pos Luar Biasa berupa beban luar biasa sebesar Rp2.369.404.263,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit-LO sebesar Rp313.744.562.929,63.

f. Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas tercatat nilai ekuitas awal sebesar Rp6.012.626.098.544,27 ditambahkan dengan Surplus/defisit-LO sebesar Rp313.744.562.929,63 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp64.204.138.613,76 sehingga ekuitas akhir menjadi sebesar Rp6.390.574.800.087,66.

g. Berdasarkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Awal sebesar Rp429.938.306.420,60 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Akhir sebesar Rp342.200.281.164,77.

h. Pos Neraca Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah per 31 Desember 2020 yakni Jumlah Aset sebesar Rp6.508.588.607.883,54, Jumlah Kewajiban sebesar Rp118.013.807.795,88 dan Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp6.390.574.800.087,66.

i. Posisi Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp342.200.281.164,77

Demikian beberapa catatan penting yang dapat dikemukakan sebagai penutup dari penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2020.

Palu, 19 Mei 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

LONGKI DJANGGOLA